POLITIK DAN PEREMPUAN

(Studi Kasus Strategi Kemenangan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rembang)

Proposal Skripsi

Di susun sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh :

LU'LUATUL QOMARIYAH

2106016081

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama	:	Lu'luatul Qomariyah
NIM	:	2106016081
Jurusan	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Politik dan Perempuan (Studi Kasus Strategi Kemenangan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Rembang)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Juni 2025
Pembimbing

M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP: 198505022019031007

SKRIPSI

POLITIK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS STRATEGI KEMENANGAN LAELA UTARI WIDYANINGSIH DAN RUMINI PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN REMBANG)

Disusun oleh:

Lu'luatul Qomariyah

2106016081

Telah dipertahankan di meja majelis penguji skripsi pada tanggal 17 Jul 2024 dan telah dinyatakan **Lulus**.

Susunan Dewa Penguji

Ketua

Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si

NIP.198505022019031007

Sekertaris

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

Penguji I

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP. 197809302003121001

Dosen Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

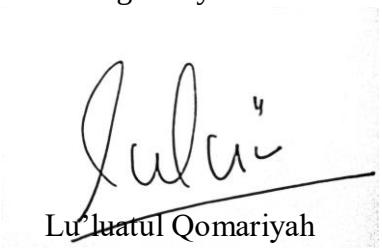
NIP.198505022019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya Lu'luatul Qomariyah menyatakan bahwa terkait dengan skripsi saya yang berjudul "Politik dan Perempuan (Studi Kasus Strategi Kemenangan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rembang)" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri serta didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan UIN Walisongo Semarang maupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain dijadikan referensi serta rujukan dalam penelitian skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi di hari kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam penulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang ada. Terimakasih.

Semarang, 30 Juni 2025

Yang menyatakan



Lu'luatul Qomariyah
2106016081

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji penulis panjatkan akan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul "Politik dan Perempuan (Studi Kasus Strategi Kemenangan Ni'ma Diana dan Rumini pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rembang)". Kemudian sholawat berbingkis salam tidak lupa penulis panjatkan kepada nabi agung, Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita sehingga menjadi umat yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas.

Berakhirnya masa penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan skripsi ini adalah hasil akhir dari masa studi di perkuliahan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwasanya dalam proses pembelajaran menjadi mahasiswa serta dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik uin walisongo semarang, Prof Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, Wakil Dekan 1 Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Moh. Hasan, M. Ag, Wakil Dekan III Dr. H. Moh. Parmudi, M. Si yang telah memberikan arahan beserta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi ilmu politik**.**
3. Bapak M. Nuqlir Bariklana selaku Kaprodi dan Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Sekertaris Jurusan Ilmu Politik, Ibu Masrohatun, yang telah memberikan ilmu dan arahan serta bimbingan selama proses perkuliahan.

5. Bapak Rofiq, M.Si selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Laela Utari Widyaningsih dan Ibu Rumini serta segenap informan yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada penulis serta telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan benar.
8. Ibu dan Ayah penulis, Ibu Ngatmiyati dan Ayah Sismurtopo yang telah memberikan do'a, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik dari segi moral maupun materiil yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta lancar. Tidak lupa kedua adik penulis Fadlol Muflikhul Atif dan Ahmad Basor Ghozali yang telah memberikan warna dalam kesepian hidup penulis.
9. Bapak dan Mama penulis, Bapak Darussalam dan mama Sa'adah yang telah memberikan kejutan kehidupan kepada penulis sehingga penulis memiliki mental sekuat baja dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta adik Aip yang telah lahir di dunia ini.
10. Rekan sejawat penulis, Nur Utami terimakasih sudah membersamai hiruk pikuk kehidupan penulis hingga pada akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan studi.
11. Rekan dan rekanita IPNU IPPNU PAC Sale 2019-2024 yang telah membersamai segala kesakitan penulis, sehingga penulis bisa bangkit dan berdiri hingga sekarang.
12. Teman seperjuangan penulis Maulidatun Nikmah, Afifah Dwinawangsih, Rina Ainur Alfiaini, Nur Aini Safitri, Siti Nur Solikah, Laela Oktavia N.H, Siti Zaenati Magfiroh yang telah memberikan dukungan dan semangat pada masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang
13. Rekan rekan angkatan 21 prodi ilmu politik terkhusus kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan warna dalam masa perkuliahan penulis.

14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian penulis mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Juni 2025

Penulis

Lu'luatul Qomariyah

2106016081

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tidak terhingga kepada ketiga orang tua saya Ibu Ngatmiyati dan Ayah Sismurtopo yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta kepada Bapak Darussalam yang telah memberikan genetik keras kepala kepada saya.

Untuk dosen pembimbing saya yakni Bapak Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan segala ilmu serta arahan selama penyusunan serta penulisan skripsi.

MOTTO

“Tidak ada yang menyakitimu kecuali itu pikiranmu, tidak ada yang membatasimu kecuali itu ketakutanmu, tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali itu keyakinanmu”

(Maulana Jalaludin Ar-Rumi)

“Sungguh ada banyak hal di dunia ini yang bisa jadi kita susah payah menggapainya, memaksa ingin memilikinya, ternyata kuncinya dekat sekali: cukup dilepaskan, maka dia datang sendiri. Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika”

(Tere Liye)

ABSTRAK

Konsep mengenai keterwakilan perempuan masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang telah menunjukkan perubahannya. Dimana pencalonan kandidat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang telah melebihi ambang batas kuota, yakni sebesar 40%. Namun pada tahap penetapan calon DPRD terpilih, kandidat yang lolos hanya berjumlah lima orang saja, dua diantaranya adalah Laela Utari Widyaningsih dan Rumini. Laela Utari Widyaningsih merupakan kandidat baru yang berangkat dari partai PDI Perjuangan. Sedangkan Rumini, juga seorang kandidat baru dari Partai Hanura. Fenomena yang terjadi pada Pemilu 2024 tersebut menjadi menarik untuk dibahas, karena melihat konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang masih terbatas. Selanjutnya penulis juga ingin melihat bagaimana strategi kemenangan yang dilakukan oleh dua kandidat baru yaitu Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kursi DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024.

Analisis data penelitian yang digunakan penulis adalah melalui teori gender dari Mansur Fakih, dimana teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang. Sedangkan analisis kedua menggunakan teori politik keluarga dari Djati untuk melihat bagaimana strategi politisi perempuan dalam memenangkan kursi DPRD di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang serta strategi kemenangan politisi perempuan Laela Utari Wdiyaningsih dan Rumini pada kontestasi Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang. Sedangkan data lapangan diperoleh dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara, studi literatur dari tulisan yang relevan sebelumnya serta yang terakhir dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, hambatan yang diperoleh kandidat perempuan di Kabupaten Rembang dalam keterwakilan perempuan dikarenakan pertama keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang masih dibatasi struktur sosial dan budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Kedua, kebijakan afirmasi 30% hanya dijalankan sebagai peraturan simbolis tanpa adanya dukungan pembinaan, pelatihan maupun pendanaan bagi calon perempuan. Selanjutnya, strategi yang dilakukan oleh politisi perempuan Laela Utari Widyaningsih berupa, pertama mobilisasi jaringan keluarga, tokoh politik dan Partai PDI Perjuangan, kedua menggunakan isu kesejahteraan masyarakat dalam narasi kampanye, ketiga melalui komunikasi bisnis keluarga. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh politisi perempuan Rumini adalah dengan memanfaatkan modal sosial berupa istri kepala desa, kemudian memanfaatkan jaringan lokal seperti RT, PKK, dan kader posyandu, selanjutnya representasi perempuan produktif dan rakyat kecil, terakhir adalah menggunakan politik relasional dan pendekatan emosional ke konstituen.

Kata Kunci: Perempuan, Politik, Strategi Kemenangan, Pemilu Legislatif, Gender, Keluarga Politik.

ABSTRACT

The concept of women's representation is still an interesting topic to discuss. Women's representation in the 2024 elections in Rembang Regency has shown changes. The nomination of candidates in the 2024 elections in Rembang Regency has exceeded the quota threshold, which is 40%. However, at the stage of determining the elected DPRD candidates, only five candidates passed, two of whom were Laela Utari Widyaningsih and Rumini. Laela Utari Widyaningsih was a new candidate from the PDI-P party. Rumini, meanwhile, is also a new candidate from the Hanura Party. The phenomenon that occurred in the 2024 elections is interesting to discuss, because it sees the context of women's representation in Rembang Regency is still limited. Furthermore, the author also wants to see how the winning strategy carried out by the two new candidates, Laela Utari Widyaningsih and Rumini, in winning the Rembang Regency DPRD seat in the 2024 elections.

The research data analysis used by the author is through Mansur Fakih's gender theory, where the theory is used to see how the context of women's representation in Rembang Regency. While the second analysis uses Djati's theory of family politics to see how female politicians' strategies in winning DPRD seats in Rembang Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach used to explain the context of women's representation in Rembang Regency and the winning strategies of female politicians Laela Utari Wdiyaningsih and Rumini in the 2024 election contestation in Rembang Regency. Meanwhile, field data was obtained from the results of field observations conducted by researchers and then continued by conducting interviews, literature studies from previous relevant writings and finally documentation.

The results of the study show that the obstacles obtained by female candidates in Rembang Regency in women's representation are due to the first, women's representation in Rembang Regency is still limited by the social structure and patriarchal culture that is still developing in society. Second, the 30% affirmation policy is only implemented as a symbolic regulation without any coaching, training or funding support for female candidates. Furthermore, the strategies carried out by female politician Laela Utari Widyaningsih are, first, mobilizing family networks, political figures and the PDI-P Party, second, using the issue of public welfare in the campaign narrative, third, through family business communication. Meanwhile, the strategy carried out by female politician Rumini is to utilize social capital in the form of the wife of the village head, then utilize local networks such as RT, PKK, and posyandu cadres, then represent productive women and small people, finally using relational politics and emotional approaches to constituents.

Keywords: Women, Politics, Victory Strategy, Legislative Elections, Gender, Poltiical Family.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 4
C. TUJUAN PENELITIAN 5
D. MANFAAT PENELITIAN 5
E. TINJAUAN PUSTAKA 5
F. KERANGKA TEORI 9
G. METODE PENELITIAN 13
H. SISTEMATIKA PENULISAN 17

BAB II KERANGKA TEORI **20**
A. GENDER 20
B. POLITIK KELUARGA (*FAMILY POLITIC)* 22
C. GENDER OWNERSHIP DALAM POLITIK LOKAL 25

BAB III *LANDSCAPE* KABUPATEN REMBANG **28**
A. KONDISI UMUM KABUPATEN REMBANG 28
B. DAPIL II DAN V: KONTEKS ELEKTORAL 45
C. PROFIL TOKOH: LAELA UTARI WIDYANINGSIH 49
D. PROFIL TOKOH: RUMINI 52

BAB IV KONTEKS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD REMBANG . 57
A. ANALISIS KETERWAKILAN: DATA DAN REALITAS 58
B. HAMBATAN STRUKTURAL DAN BUDAYA LOKAL 65
C. EVALUASI KEBIJAKAN AFIRMASI DAN KUOTA 30% 67
D. POLITIK LOKAL DAN PREFERENSI PEMILIH 71

BAB V STRATEGI POLITIK LAELA UTARI WIDYANINGSIH DAN RUMINI 74
A. STRATEGI LAELA UTARI WIDYANINGSIH 74
B. STRATEGI RUMINI 78
C. ANALISIS PERBANDINGAN STRATEGI 83
D. REFLEKSI TEORITIS 89

BAB VI KESIMPULAN 94
A. KESIMPULAN 94
B. KETERBATASAN PENELITIAN DAN AGENDA RISET LANJUTAN 97

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Rembang 29
Tabel 3. 2 294 Desa di Kabupaten Rembang..... 30
Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2023 36
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2024 37
Tabel 3. 5 Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Rembang..... 38
Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 40
Tabel 3. 7 Komposisi Kursi DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024..... 45
Tabel 3. 8 Calon Terpilih dan Perolehan Suara Dapil II Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024 46
Tabel 3. 9 Caleg Terpilih dan Perolehan Suara Dapil V Kabupaten Rembang..... 47
Tabel 4. 1 Jumlah Caleg Perempuan dan Caleg Terpilih Pemilu 2024 Kab. Rembang 60
Tabel 4. 2 Daftar Pemilih Tetap di Dapil II dan Dapil V Kabupaten Rembang Tahun 2024 62
Tabel 4. 3 Keterwakilan Perempuan pada Setiap Partai Politik 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Rembang 29
Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang 35
Gambar 3. 3 Jumlah Kepercayaan Penduduk Rembang Tahun 2024 38
Gambar 3. 4 Laela Utari Widyaningsih DPRD Kab. Rembang 49
Gambar 3. 5 Rumini DPRD Kab. Rembang 52

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Modern ini konsep mengenai representasi politik perempuan masih menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas. Dalam dunia perpolitikan keterwakilan perempuan merupakan tolak ukur dalam memeriksa serta menilai penegakan prinsip demokrasi di Indonesia (Rowa, 2015). Dimana demokrasi menjadi instrumen penting yang memiliki fungsi dalam melindungi hak asasi masyarakat tanpa membedakan kelas, agama, warna kulit, jenis kelamin serta berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi. Selain itu juga demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif serta kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan baik di level lokal maupun nasional (Iskandar, 2017).

Partisipasi politik perempuan dalam konstestasi politik elektoral menjadi sebuah hal penting yang harus diwacanakan. Hal tersebut terlihat bahwa persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga politik (legislatif maupun eksekutif) sebagai penentu kebijakan masih sedikit. Realitas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab minimnya representasi politik perempuan dalam ranah politik. Meliputi, pertama problem budaya patriarki dimana secara tradisi kaum perempuan selalu menjadi pihak yang disepelekan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan distribusi peran dan fungsi sosial perempuan baik pada sektor publik maupun privat. Problem kultural tersebut menjadikan kaum perempuan secara terpaksa harus menerima peran serta fungsi tradisionalnya, sehingga menjadi sebuah hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

Kedua, problem institusional dimana terdapat berbagai regulasi serta institusi sosial politik yang selalu mendiskriminasi kaum perempuan dengan mengekang aktivitas sosial-politik mereka. Melihat alasan tersebut maka penting untuk menciptakan inklusivitas politik yang lebih baik dengan metode mendorong dan meningkatkan representasi politik perempuan, dibuktikan dengan kehadiran dan munculnya aksi-aksi, gerakan sosial politik identitas perempuan dari berbagai negara yang menuntut penghapusan berbagai bentuk hegemoni dan dominasi laki-laki

terhadap perempuan di ranah politik. Tuntutan yang dijelaskan diatas membuka kacamata pemerintah untuk menghasilkan kebijakan kuota atau reservation seats dalam mendorong kaum perempuan agar berpartisipasi aktif pada konstestasi politik elektoral (Windyastuti, 2017).

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen, dapat disiasati dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi *(affirmation action)* untuk diterapkan di dalam struktur badan pengurus parpol dan daftar calon anggota legislatif (caleg) (Aristo, 2020). Dimana konsep afirmasi tersebut sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terbentuk sejak pasca reformasi. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 yang memberikan penegasan bahwa setiap 3 (tiga) orang bakal calon, setidaknya terdapat 1 (satu) kandidat perempuan. Pengupayaan tersebut semakin di elaborasikan pada setiap pemilihan umum. Begitu juga yang terjadi pada pencalonan perempuan di Kabupaten Rembang pada pemilu 2024, hampir seluruh partai sudah mengusung 30% calon perempuan bahkan lebih. Terhitung, bahwasanya terdapat 210 calon legislatif perempuan dari 516 jumlah seluruh calon legislatif yang terdapat di Kabupaten Rembang dengan kuota sebanyak 45 kursi yang tersebar pada 7 dapil (Rembang, 2023).

Banyaknya ketersediaan kursi DPRD di Kabupaten Rembang, tidak menjadikan keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang terpenuhi. Realitanya hanya terdapat 5 politisi perempuan di Kabupaten Rembang yang lolos pada pemilu 2024. Rasio tersebut sebanyak 11% dari 45 kursi dan hanya tersebar pada 3 dapil saja. Dimana 3 dapil tersebut meliputi, pertama yakni dapil II dengan tersedianya 6 kursi legislatif yang berhasil memperoleh suara sebanyak 4 legislatif laki-laki dan 2 legislatif perempuan. Kemudian dapil III dari 7 kursi legislatif yang memperoleh suara sebanyak 5 legislatif laki-laki dan 2 legislatif perempuan. Sedangkan dapil V dari 6 kursi legislatif yang berhasil lolos berjumlah 5 kursi legislatif laki-laki dan 1 legislatif perempuan. Berdasarkan rasio yang tidak seimbang tersebut penulis tertarik untuk melihat bagaimana tindakan politik masyarakat terhadap calon legislatif perempuan pada saat pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rembang melalui 2 politisi perempuan terpilih dari dapil II dan dapil V yakni Laela Utari Widyaningsih dan Rumini.

Laela Utari Widyaningsih, dari dapil II merupakan seorang politisi pendatang baru yang mampu mengalahkan politisi petahana Sulistyo Weti Ariani dari partai PPP. Latar Belakang dari Laela Utari Widyaningsih ialah seorang anak dari DPRD petahana Dapil V Widodo. Berangkat dari keluarga politik Laela Utari Widyaningsih atau mba Ela mencari dukungan melaui program kesejahteraan masyarakat yang tidak tepat sasaran yakni PKH. Kemudian pada dapil V, politisi baru Rumini hadir setelah dua pemilu sebelumnya yakni pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 dapil V belum pernah meloloskan legislatif perempuan. Latar belakang Rumini ialah seorang istri dari Kepala Desa yakni Bapak Ali Suyu'udin. Dengan latar belakang tersebut Rumini ingin mewujudkan masyarakat yang lebih produktif. Berdasarkan latar belakang yang dimiliki oleh 2 politisi perempuan diatas, peneliti ingin mencari tahu strategi kemenangan apa yang digunakan. Asumsi awal dari peneliti bahwa keduanya telah memanfaatkan jaringan politik keluarga sebagai strategi kemenangan. Dimana politik keluarga modern ini menjadi sebuah tren dalam meraih kemenangan konstestasi elektoral dan menjadi konsekuensi logis dari karakter kekuasaan yang *self-perpetuated* dan dampak dari *name recognition* dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif (Anggra, 2022).

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi, bahwasannya perempuan yang mencalonkan diri setidaknya memiliki bekal pencalonan kuat. Dimana bekal tersebut akan menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh suara di masyarakat. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai strategi perempuan dalam memenangkan kursi legislatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahsun dkk (2020), Ramadhona dkk (2020), Setya dkk (2020), Samsa (2021), dan Djunaidin dkk (2023). Menemukan hasil bahwasannya perempuan yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif memiliki modal sosial yang mampu memberikan dukungan secara moral maupun materiil. Secara garis besarnya para calon legislatif perempuan memiliki latar belakang yang memang cukup bagus, seperti ayah, kakak maupun suami yang seorang politisi. Selain itu, pengangkatan isu gender juga menjadi modal utama seorang calon perempuan mencalonkan dirinya. Kemudian membahas mengenai perempuan yang memiliki modal sebagai aktivis salah satu organisasi perempuan yang sejalan dengan NU, dimana NU sendiri merupakan salah satu organisasi berbasis agama terbesar di

Indonesia (Mahsun, 2020). Terakhir adalah modal sosial yang dimiliki perempuan berupa seorang mantan ASN yang tentu saja memiliki jaringan politik luas serta mempunyai latar belakang keterkaitan dengan pendiri organisasi Muhammadiyah (Djunadin, 2023).

Secara garis besar, terdapat kesamaan topik kajian pada penelitian terdahulu yang sebelumnya telah peneliti ulas yakni pada strategi kampanye politisi perempuan. Namun, arah dari kajian penulis adalah mengenai minimnya legislatif perempuan yang bisa lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang pada pemilu tahun 2024. Dimana pembahasan mengenai sedikitnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang belum dibahas secara terperinci. Fokus kajian ini adalah mengenai mengapa hanya sedikit perempuan yang bisa lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih serta Rumini untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Rembang.

Lolosnya Laela Utari Widyaningsih dan Rumini sebagai bagian dari 45 DPRD Kabupaten Rembang menjadi sebuah kajian yang menarik bagi penulis, kajian tersebut termuat dalam "Politik dan Perempuan (Studi Kasus Strategi Kemenangan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kab. Rembang)". Dimana topik tersebut perlu dikaji karena memiliki koridor penting pada bidang politik terkhusus keterwakilan perempuan yang selama ini belum terpenuhi kuota 30 persennya.

B. RUMUSAN MASALAH

Menurut latar belakang diatas yang telah penulis rincikan, bahwasannya penulis akan merumuskan masalah penelitiannya dan berusaha fokus pada minimnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang dan bagaimana strategi kampanye politisi perempuan dalam memenangkan kursi DPRD di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa hanya sedikit perempuan yang bisa lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang pada pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kursi DPRD Kabupaten Rembang pada pemilu tahun 2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Menurut umusan masalah yang sudah penulis tulis, akan tertera beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa hanya terdapat sedikit perempuan yang bisa lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang pada pemilu tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kursi DPRD Kabupaten Rembang pada pemilu tahu 2024.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharap mampu menjadi bahan acuan baru bagi penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan pada kemudian hari.
2. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam menyajikan informasi ilmiah di bidang politik mengenai politik dan perempuan di Indonesia terkhusus Kabupaten Rembang.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menyajikan sebuah informasi baru bagi penulis serta pembaca, baik dalam kalangan akademik ataupun non-akademik dalam bidang politik terkhusus mengenai politik dan perempuan.

Kemudian manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dengan jelas sehingga wawasan baru akan didapatkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya mengenai politik dan perempuan pada pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi pengetahuan baru bagi penulis serta pembaca terkhusus masyarakat Kabupaten Rembang mengenai politik dan perempuan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan setelah penulis menggali berbagai informasi dari penelitian sebelumnya, atau bisa kita sebut dengan literatur review. Dimana literatur

review tersebut disesuaikan dengan tema yang akan diangkat oleh penulis. Pengkajian dari penelitian terdahulu dilakukan karena sebagai bahan untuk melihat cara pandang yang berbeda serta menjadi pelengkap bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga penulis bisa merecreat hasil dari penelitian tersebut. Topik mengenai politik dan perempuan telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu penulis melakukan literature review untuk melihat berbagai perbedaan. Penulis mengelompokkan hasil dari literature review tersebut menjadi :

1. **Strategi Politik Kemenangan Politisi Perempuan**

   Pada tema ini, peneliti ingin membahas berbagai kajian yang sesuai dengan strategi politik kemenangan calon perempuan. Strategi kemenangan oleh politisi perempuan yang memanfaatkan isu gender telah diteliti oleh, (Mahsun dkk, 2020) dan (Samsa dkk, 2021). Kedua artikel tersebut membahas mengenai modal sosial yang dimiliki oleh legislatif terpilih pada tahun 2019. Modal sosialnya berupa isu gender yang digunakan ketika melakukan kampanye. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahsun dkk, 2020) bukan hanya membahas mengenai isu gender dalam kampanyenya, melainkan isu gender yang dibarengi dengan praktik klientelisme. Bahkan para calon tersebut juga merupakan aktivis dari organisasi islam perempuan terbesar yakni muslimat dan fatayat. Dimana organisasi fatayat dan muslimat adalah organisasi perempuan dengan landasan ahlusunnah wal jamaah yang sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Samsa dkk, 2021) menjelaskan bahwasannya isu gender menjadi strategi yang cukup kuat untuk dibahas karena memberikan pengaruh yang begitu besar. Dimana pembahasan mengenai isu gender tentu saja harus dibarengi dengan pencanangan sebuah program yang pro terhadap perempuan. Pada akhirnya banyak sekali anggota di lembaga maupun organisasi bergerak ke daerah lain dan membantu mempromosikan program gender yang ditawarkan. Mereka merasa tergerak karena pada dasarnya perempuan selalu menjadi yang nomor dua. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwasannya politik identitas perempuan masih sangat mampu untuk digunakan sebagai modal kampanye untuk memenangkan kursi pada pemilu.

   Strategi kemenangan yang dimanfaatkan oleh politisi perempuan adalah mengenai latar belakang yang dimiliki oleh calon perempuan terkait. Penelitian

tersebut telah dilakukan oleh (Setya dkk, 2020) dan (Djunadin dkk, 2023). Kedua artikel membahas mengenai latar belakang calon legislatif perempuan yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan kampanye di masyarakat. Pada penelitian (Setya dkk, 2020) membahas bahwa perempuan yang memiliki latar belakang keluarga seorang politisi mampu mengalahkan kampanye yang dilakukan oleh kandidat lainnya. Hal tersebut dibarengi dengan modal sosial kampanye berupa pendidikan dan pengalaman dalam beroorganisasi sehingga strategi politik bisa tepat sasaran. Kemudian penelitian (Djunadin dkk, 2023) membahas bahwasannya calon legislatif perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki modal sosial dengan latar belakang anggota keluarga yang menjadi politisi. Disamping itu caleg tersebut juga merupakan seorang ASN dan mantan mahasiswa dari kalangan penyuluhan pertanian serta keluarga besar caleg tersebut memiliki keterkaitan dengan pendiri Muhamadiyah di Sulawesi Tengah. Sehinggakoneksi yang di dapatkan begitu luas. Kedua artikel tersebut memberikan gambaran bahwasannya latar belakang yang dimiliki oleh caleg perempuan mempengaruhi suara pemilih. Dimana dengan latar belakang tersebut koneksi yang di dapatkan akan semakin besar.

Strategi berikutnya yang dimanfaatkan oleh politisi perempuan adalah mengenai kemampuan komunikasi dari caleg perempuan tersebut. Dimana strategi ini telah dibahas oleh (Ramadhona dkk, 2020) dan (Milana, 2021). Secara garis besar kedua penelitian tersebut membahas mengenai seorang kandidat perempuan yang diharuskan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan strategi lainnya. Tanpa kemampuan tersebut, penyampaian ide perubahan di masyarakat dan pendekatan kandidat kepada audiens tidak akan berjalan secara maksimal.

2. Isu Perempuan dalam Kampanye

Pada tema perempuan dan politik, peneliti ingin membahas berbagai kajian yang cukup relevan dengan tema terkait. Pembahasan mengenai isu perempuan dalam kampanye telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, yakni dilakukan oleh (Kiftiyah, 2019) dan (Yoteni dkk, 2023). Kedua penelitian tersebut membahas mengenai batasan-batasan yang dimiliki perempuan karena permasalahan urusan domestik dan simbol-simbol yang tidak responsif terhadap

gender. Menurut (Kiftiyah, 2019) bahwasannya penghambat dari partisipasi perempuan dalam dunia politik disebabkan oleh pemahaman bahwasannya perempuan merupakan seorang makmum dan posisi legislatif adalah posisi imam. Dimana kedudukan makmum tidak bisa menjadi imam karena dapat menyalahi aturan agama. Faktor penghambat berikutnya adalah budaya. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwasannya politik merupakan sebuah praktik yang buruk, dunia yang menipu atau keras, sehingga perempuan tidak akan mampu untuk bertahan lama dalam bidang politik karena perempuan adalah makhluk yang lemah. Kemudian penelitian (Yoteni, 2023) juga membahas mengenai minimnya partisipasi politik perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Namun, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan strategi inklusif dengan menghapus segala hambatan dan memberikan ruang yang setara bagi partisipasi politk. Harapannya adalah perempuan merasa diakui serta didorong aktif dalam proses politik, akan tetapi di lain sisi pemanfaatan strategi inklusif menjadikan minimnya kesadaran akan permasalahan gender dan kekuatan terhadap perubahan budaya.

Kedua, pembahasan mengenai isu perempuan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu oleh (Mahyuddin, 2019), (Fatmawati, 2022) dan (Umari, 2020). Ketiga peneliti tersebut membahas tentang kekuatan yang dimiliki oleh partai dan gender sebagai upaya untuk berkampanye. Pada penelitian (Mahyuddin, 2019) menjelaskan bahwa perempuan mampu membangun basic kekuatan untuk mendukung calon-calon yang dikehendakinya. Basic kekuatan tersebut dibangun dengan memanfaatkan simbol-simbol yang pro terhadap perempuan. Tujuannya adalah untuk menunjukan bahwa perempuan juga memiliki hak dalam memilih calon tertentu. Kemudian (Fatmawati, 2022) menjelaskan bahwa partai dan gender bisa digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan caleg lawan dengan membentuk pesan-pesan negatif. Namun, pesan negatif tersebut tidak dapat tumbuh dengan sendiri melainkan dikaitkan dengan latar belakang yang dimiliki oleh calon kandidat. Dengan pesan-pesan negatif tersebut maka akan mendorong persepsi pemilih yang berakibat pada pengambilan keputusan pemilih. Dalam hal ini perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Terakhir oleh (Umari, 2020) bahwasannya

kampanye yang dilakukan oleh beberapa caleg perempuan di Kota Malang banyak mengadopsi dari latar belakang sosial caleg sebelumnya. Dimana dari ke-4 caleg yang dibahas hanya terdapat 1 caleg yang menggunakan isu perempuan sebagai bahan kampanye. Hasilnya adalah kampanye mengenai isu perempuan masih jarang dibahas karena dianggap kurang menarik dibanding dengan isu-isu yang membahas mengenai kemiskinan (Handoko, 2009).

Berbagai penelitian dari beberapa sarjana terdahulu telah direview oleh penulis sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dengan topik penelitian yang dikaji penulis. Dari beberapa jurnal diatas dapat disimpulkan bahwasannya para sarjana terdahulu lebih banyak mengkaji mengenai strategi kampanye kemenangan politisi perempuan yang memanfaatkan modal sosial seperti isu gender, latar belakang keluarga maupun organisasi, klientelisme, dan lain sebagainya. Dimana strategi tersebut digunakan calon legislatif untuk memperoleh dukungan di masyarakat sehingga calon legislatif memperoleh kemenangan.

Studi penelitian diatas memiliki kesamaan dengan kajian penulis yakni mengenai strategi kemenangan politisi perempuan. Namun terdapat pembeda dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada posisi politisi perempuan. Dimana penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana tindakan politik masyarakat terhadap politisi perempuan di Kabupaten Rembang, mengapa hanya tersebar di beberapa wilayah saja. Karena jika melihat pada tahap pencalonan perempuan, sudah terdapat lebih dari 37,7% calon perempuan yang mencalonkan diri. Sehingga melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan pendekatan menggunakan teori *rasional choice*. Kemudian penulis juga akan menganalisis mengenai strategi apa yang digunakan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Rembang menggunakan teori gender dan politik keluarga.

F. KERANGKA TEORI

Pemaparan teori akan dijelaskan pada bagian ini, dimana terdapat sedikit pemaparan mengenai topik yang sesuai dengan pembahasan permasalahan penulis.

Dimana teori tersebut berfungsi untuk memahami serta menganalisis hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Dibawah ini teorinya:

1. Gender

Secara singkat pengertian gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kultural. Dimana perempuan dianggap sebagai manusia yang memiliki tugas domestik, sifat lemah lembut serta emosional. Sedangkan laki-laki dianggap memiliki sikap yang rasional, kuat, jantan, serta perkasa. Namun sikap-sikap tersebut adalah sikap yang tidak permanen dan bisa terjadi pada diri perempuan maupun laki-laki (Fakih, 2016). Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gender adalah konsep yang menjadi parameter dalam mengidentifikasikan peran laki-laki serta perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial, budaya masyarakat dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendeskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya dinamis (Fakih, 2016).

Pada bidang politik, pengertian gender diidentikan dengan keterlibatan laki-laki serta perempuan dalam kegiatan politik. Namun keterlibatan perempuan tersebut merupakan hal yang sulit untuk dicapai. Karena sebagian dari partai politik masih memiliki anggapan bahwa perempuan ditempatkan sebagai "subordinatif" yaitu hanya mendengarkan berbagai larangan dan lebih banyak menerima serta mengikuti aturan dibandingkan laki-laki. Kemudian laki-laki ditempatkan sebagai "superior" yaitu sebagai pengawas kegiatan perempuan (Abdullah, 2003). Seiring berjalannya waktu politik gender telah mengalami perubahan, hal tersebut terlihat dari banyaknya perempuan yang sudah melibatkan diri dalam dunia politik, sebagai contoh yaitu pada kegiatan perumusan kebijakan, pemilu maupun pilkada (Rasyidin, 2016).

2. Politik Keluarga

Keluarga dan politik merupakan sebuah budaya universal yang memiliki relasi untuk saling mempengaruhi. Dimana posisi politik tersebut ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Koneksinya berupa pemberian bantuan dalam bentuk dukungan baik segi materi maupun moril psikologi. Politik keluarga juga dipandang sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan kepartaian dan

pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, dengan kata lain kecenderungan mengenai politik keluarga semakin tumbuh dan menjadi jalan pintas bagi partai politik dalam memenangkan kontes politik maupun menjamin eksistensi sebuah rezim politik tertentu (Harjanto, 2011).

Istilah politik kekeluargaan merujuk pada proses rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga dengan menduduki jabatan politik maupun pemerintahan yang tidak berdasarkan kemampuan ataupun proseduran yang telah di tetapkan. Akan tetapi didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatan baik karena keturunan maupun perkawinan (Purwaningsih, 2015). Pengertian politik kekeluargaan menurut Pablo, ialah bahwa politik kekeluargaan merupakan sebuah bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan dimana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Selain itu, politik kekerabatan atau politik dinasti dapat diartikan dengan adanya dua orang maupun lebih dalam satu keluarga yang menduduki jabatan politik. Dimana dari kedua orang tersebut, yang cenderung terjadi politik kekerabatan adalah orang kedua.

Definisi dinasti politik juga dijelaskan oleh (Djati, 2013) ialah sebuah strategi politik dalam menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga. Proses terbentuknya hubungan keluarga dan politik dari sudut pandang budaya terbagi menjadi tiga pendekatan, yakni neopatriomonalisme, klan politik, dan predator politik. Neoptatriomonalisme memiliki pengertian bahwa terbentuknya keluarga politik merupakan sebuah akses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak oleh sirkulasi hubungan inti genealogis berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar genealogis yang memiliki kepentingan sama dalam pelanggengan kekuasaan keluarga. Hal tersebut merupakan pemicu dari kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman mengenai keluarga politik. Keluarga politik menurut klan politik menjelaskan bahwa keluarga politik terbentuk karena akses dari warisan feodalisme yang masih sangat kuat dalam masyarakat. Penguasaannya bukan sekedar berasal dari sumber daya ekonomi dalam menggambarkan feodalisme namun terdapat loyalitas dari masyarakat terhadap tokoh informal. Secara umum tokoh informal memiliki banyak masa yang mampu

menunjang kekuasaan keluarga. Kemudian pembahasan yang terakhir yakni pendekatan politk predator yaitu keluarga politik terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik. Jaringan keluarga yang telah menguasai pembangunan daerah dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya (Djati, 2013).

Menurut (Purwaningsih, 2015) keluarga politik terbentuk karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktornya meliputi oligarki politik dalam rekrutmen politik, legislasi politik, lemahnya institusionalisasi partai, kesempatan politik yang diberikan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak. Dengan keluarga politik, indikasi dari buruknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya merupakan hasil dari buruknya kemampuan rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Bertumbuhnya keluarga politik, maka *playing field* juga akan semakin tidak stabil karena keluarga politik akan memperluas pengaruh penguasaan terhadap wilayah dan kontrol terhadap ekonomi, sehingga kontestasi politik memiliki potensi menjadi lebih besar dibandingkan dengan calon lain (Harjanto, 2011).

Menurut Djati, terdapat tiga model kekeluargaan dalam keluarga politik yaitu model familisme, model quasi-familisme dan model ego-familisme.

a. Familisme yakni kekeluargaan politik yang didasarkan pada hubungan darah secara langsung atau hubungan perkawinan dengan kelompok lain. Dimana keluarga politik yang memiliki kedudukan lebih lemah akan mendapatkan keuntungan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena menjamin eksistensi keluarga politik lebih lemah. Pada sisi lain jaringan keluarga akan terbangun menjadi lebih besar karena mampu mengikat keluarga politik lainnya. Poin penting dalam familisme yang mempengaruhi corak dinasti politik adalah seperti loyalitas, kepatuhan serta solidaritas keluarga.
b. Quasi-familisme yang berdasar pada solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Afeksi yang dimaksud bukanlah bentuk kasih sayang, namun bentuk orientasi yang didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Park, 2009). Hal tersebut berarti bahwasannya dimensi dinasti politik berkembang bukan hanya karena

hubungan darah, namun bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah dengan sistem kekerabatan berbasis artifisial.

c. Egoisme-familisme, model dinasti politik ini berdasarkan pada pemenuhan aspek fugsionalisme dibanding menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konsepnya dapat dipahami dari segi kepala daerah dan masyarakat. Jika dari kepala daerah egoisme sama dengan konsep mendahulukan kepentingan keluarga daripada publik dalam pengisian jabatan publik maupun suksesi pemerintah (Park, 2009).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Sebagai upaya untuk penyelesaian pada tulisan ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah salah satu metode riset yang digunakan untuk mengeksplorasi atau mempelajari arti individu maupun kelompok terkait masalah sosial (Creswell, 2013). Dimana penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ialah sebuah cara dalam penelitian yang memiliki fungsi untuk menganalisis suatu hal secara teliti serta menggabungkan berbagai informasi dengan menggunakan prosedur yang disesuaikan dalam pengumpulan data. Berbagai kasus dibatasi oleh waktu serta aktifitas, maka dari itu penulis hanya mampu mengumpulkan informasi secara lengkap sesuai prosedur dan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, penulis mengkaji data-data di lapangan dengan menggunakan isu teoritis. Maka dari itu diperlukan deskripsi secara lengkap mengenai kondisi maupun fenomena mengenai kejadian yang benar-benar nyata. Metode lain yang digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam adalah observasi dan wawancara (Semiawan, 2010).

2. Sumber dan Jenis Data

Upaya penulis dalam mendapatkan berbagai macam informasi sebagai pelengkap dalam penelitian adalah dengan menggunakan 2 jenis sumber data penelitian, yaitu data primer serta data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan melalui berbagai sumber primer maupun asli atau bisa disebut dengan sumber pertama yang berisi mengenai informasi maupun data penelitian (Rahmadi, 2011). Sumber data primer pada penelitian ini ialah Laela Utari Widyaningsih dan Rumini sebagai legislatif perempuan di Kabupaten Rembang. Data primer tersebut merupakan hasil dari wawancara bersama anggota DPR dapil II dan dapil V Kabupaten Rembang serta anggota partai PDI Perjuangan dan Hanura di Kabupaten Rembang serta dengan masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder ialah sebagai sumber yang melengkapi data primer dan didapatkan penulis dari pihak lain maupun pengkaji terdahulu atau data yang di dapatkan dari media cetak maupun massa (Nugrahani, 2014). Buku-buku, jurnal penelitian, artikel, website serta media cetak elektronik yang meliputi berbagai pokok bahasan penelitian dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Sebagai upaya menuju langkah strategis dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai metode dalam mendapatkan data. Jika seorang pengkaji tidak tahu-menahu mengenai teknik pengumpulan data maka akan mustahil pengkaji tersebut mendapatkan data yang sesuai dengan standar (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

a. Observasi

Pengertian dari observasi ialah mengumpulkan data yang ada di lapangan dan dilakukan secara langsung. Menurut salah satu peneliti sebelumnya observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh peneliti secara sistematis, objektif, rasional, dan logis mengenai macam-macam fenomena yang telah terjadi (Kawasati, 2019). Dalam tujuan empirisnya observasi berfungsi dalam memberikan penjelasan mengenai gejala-gejala yang telah terjadi dan dari berbagai gejala tersebut kemudian diinterpretasikan secara

teoritis serta rinci, dimana gambaran kejadian akan mendapatkan penjelasan serta kesimpulan yang sesuai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara demi mendapatkan sebuah informasi dari responden yang diwawancarai (Mundir, 2013). Wawancara yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi dua tahapan, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan dengan membuat daftar pertanyaan, perkiraan jawaban dari narasumber serta lingkup masalah (Nasution, 2011). Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur ialah berisi mengenai garis besar data yang ingin diperoleh tanpa membuat daftar pertanyaan (Mundir, 2013). Kaitannya dengan penulisan ini, penulis ingin melihat sebuah fenomena bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini sebagai legislatif perempuan di Kabupaten Rembang dengan menggunakan pengamatan yang menyeluruh serta kompeherensif dimana penulis sebagai peneliti akan mencari informasi serta menyelidiki fenomena yang diangkat sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam menjawab penelitian.

Pada kajian ini, penulis akan menggunakan kedua teknik wawancara terhadap subjek yang diteliti. Wawancara mendalam memungkinkan utuk seseorang dengan mudah menceritakan kisah mereka. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti Laela Utari Widyaningsih dan Rumini sebagai legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Rembang, tim kemenangan, pengurus partai serta masyarakat setempat.

c. Studi dokumentasi dan literature

Membahas mengenai dokumentasi yakni sebuah metode yang memperlihatkan catatan atau data penting tentang topik yang diteliti sehingga data yang diambil bukan opini dan data tersebut bernilai valid. Studi ini memerlukan dokumentasi dalam menyesuaikan hasil yang terdapat di lapangan yaitu dapat berbentuk foto bersama tim kampanye kemenangan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini. Metode dokumentasi ini dapat membantu penulis

untuk melengkapi data-data yang terkait dengan kajian penelitian yang nantinya akan dirangkum serta di analisa sebagai hasil dari penelitian. Teknik berikutnya ialah studi literatur, dimana studi tersebut mengumpulkan berbagai data yang diperoleh peneliti dari buku-buku, surat kabar serta lain sebagainya yang berkesinambungan dengan fokus penelitian sebagai referensi dalam pembuatan analisis hasil peneltian.

4. Teknik analisis data

Analisis data ialah sebuah teknik pengumpulan serta penyusunan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Data tersebut akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang ringan dimengerti. Analisis data akan berjalan melalui tiga tahapan kegiatan yaitu diawali dengan reduksi, kedua ada penyajian data serta yang terakhir ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman, 2009).

a. Reduksi data

Reduksi data artinya menyelidiki atau membuat laporan menyeluruh yang serupa dengan data pada proses wawancara. Reduksi data suatu proses yang dilaksanakan secara terjadwal dalam proses pengumpulan, memilah data-data penting yang memiliki hubungan dengan penelitian sampai pada saat laporan akhir tersusun secara lengkap. Selain itu reduksi data juga menegakkan analisa yang tajam dan berpola sehingga dapat diambil penyelesaian akhir.

b. Penyajian data

Setelah melalui proses reduksi data, tahapan selanjutnya ialah proses presentasi data yang akan melancarkan penulis dalam mendalami dan memberikan analisis data. Penyajian informasi yang terkumpul dalam penelitian kualitatif ini disusun dalam bentuk teks yang nantinya akan digunakan dalam proses penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah termasuk tahapan yang paling akhir dalam teknik analisis data. Proses ini, kesimpulan yang dibuat wajib tersusun dengan rapi serta di dalamnya mencakup mengenai pengertian terkait berbagai macam penemuan yang di dapat dari fakta lapangan, data-data tersedia didukung

dengan bukti-bukti yang valid. Penelitian kualitatif berisi garis besar yang menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada awal penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini memerlukan sistematika penulisan agar dapat mempermudah pembaca dalam menelaah skripsi ini. Dimana sistematika penulisan merupakan sebuah cara maupun tata urutan rencana laporan penelitian. Selain itu, sistematika penulisan juga memberikan penjelasan mengenai rangkaian serta struktur bab dan sub bab pada penyusunan skripsi yang memberikan pemahaman bahwa terdapat hubungan yang logis serta sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian dan telah disesuaikan dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang sebagai jawaban atas titik tolak permasalahan dalam penelitian yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian terdapat rumusan masalah yaitu berbentuk pertanyaan yang dimunculkan pada penelitian ini. Berlanjut dengan tujuan penelitian sebagai penjelasan mengenai tujuan dari ditulisnya penelitian ini. Selain itu terdapat manfaat penelitian yang digunakan untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yakni ada tinjauan pustaka yang berasal dari berbagai kajian serta memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Dalam metode penelitian penulis menjelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara rinci dan definisi teori serta konsep bagaimana penulis akan menyusun skripsi secara sistematis dan utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab kedua ini penulis akan memaparkan mengenai uraian teoritis yang sesuai dengan objek penelitian penulis. Dimana peneliti akan mengkaji teori gender ownership dan politik keluarga. Penulis akan merujuk penelitian tersebut pada buku-buku terkait serta berbagai penunjang penelitian lainnya.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ketiga ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti. Gambaran umumnya meliputi berbagai kondisi geografis, demografi, struktur sosial-budaya, basis agama serta dinamika politik lokal dan polarisasi partai. Penjelasan lebih lanjutnya adalah mengenai gambaran Kabupaten Rembang yang difokuskan pada dapil II yaitu terletak di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur sedangkan dapil V meliputi Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sale. Selain itu, peneliti akan menambahkan profil dari politisi perempuan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini yang merupakan legislatif perempuan di dapil II dan dapil V serta jejaring keluarga dan koneksi politiknya.

BAB IV KONTEKS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN REMBANG

Bab keempat dari penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama yang telah tertera pada pembahasan sebelumnya. Dimana jawaban dari rumusan masalah tersebut akan berisi mengenai konteks keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rembang.

BAB V STRATEGI POLITISI PEREMPUAN (Laela Utari Widyaningsih dan Rumini)

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kursi DPRD di Kabupaten Rembang. Penulis akan mendapatkan data dari narasumber terkait, yakni Laela Utari Widyaningsih, Rumini, tim kampanye, partai pengusung, serta masyarakat.

BAB PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian berupa jawaban teoritis atau empiris. Dimana pada kesimpulan akan membahas mengenai jawaban atas pertanyaan rendahnya keterwakilan

perempuan di Kabupaten Rembang, bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini serta kaitannya dengan teori gender dan politik keluarga. Selain itu sebagai perbaikan pada penulisan berikutnya penulis akan meminta pembaca untuk memberikan saran serta kritikan. Dikatakan demikian, saran maupun kritik adalah sebuah masukan atau pandangan yang diberikan peneliti bagi berbagai pihak.

BAB II
KERANGKA TEORI

Permasalahan mengenai politik dan perempuan di Kabupaten Rembang merupakan paradigma yang belum terselesaikan. Struktur sosial dan budaya patriarki sangat memberikan batasan terhadap peran perempuan dalam politik. Meskipun pada dasarnya terdapat kebijakan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Kandidat perempuan dari keluarga politik memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih, sementara perempuan dengan latar belakang non-politik harus menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh dukungan dan sumber daya. Penulis akan menyajikan dua kerangka utama dalam menganalisis penelitian yakni dengan menggunakan teori gender dalam politik dan konsep politik keluarga *(dynasty politics)*.

A. GENDER

Menurut Oakley gender dan seks memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Dimana gender merupakan sebuah konstruksi sosial dan budaya yang dapat berkembang melalui proses sosial sedangkan seks adalah istilah biologis mengenai jenis kelamin tertentu (Oakley, 1972). Begitu juga dengan ilmuwan lain seperti Unger dan Crawford yang menjelaskan bahwasannya seks adalah sebuah properti biologis seperti kejantanan atau kewanitaan sedangkan gender merupakan properti budaya masyarakat, maskulinitas dan feminitas (Unger & Crawford, 1993). Berdasarkan pendapat tersebut bahwasannya seks merupakan sebuah aspek biologis seorang individu seperti alat reproduksi laki-laki maupun perempuan yang sudah ada sejak lahir dan pemberian tuhan yang bersifat kodrati sehingga tidak dapat berubah. Sedangkan gender ialah konstruksi sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan peran, identitas, serta representasi diri seorang individu sebagai maskulin maupun feminim dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah melainkan terbentuk dari lingkungan sosial masyarakat.

Membahas mengenai gender tidak jauh dari persoalan-persoalan dengan tema laki-laki dan perempuan. gender merupakan sebuah hal yang melekat, terstruktur secara sosial dan cultural kepada laki laki maupun perempuan menyangkut fungsi, peran, hak, dan kewajiban. Seperti contoh bahwa perempuan merupakan sebuah makhluk yang lemah lembut, keibuan, emosional, cantik, sedangkan laki-laki memiliki sifat yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Namun sikap-sikap tersebut

merupakan sikap yang tidak permanen dan bisa terjadi pada diri perempuan (Fakih, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gender adalah konsep yang menjadi parameter dalam mengidentifikasikan peran laki-laki serta perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial, budaya masyarakat dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendeskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya dinamis (Fakih, 2016).

Pada bidang politik, pengertian gender diidentikan dengan keterlibatan laki-laki serta perempuan dalam kegiatan politik. Namun keterlibatan perempuan tersebut merupakan hal yang sulit dicapai. Karena sebagian dari partai politik masih memiliki anggapan bahwa perempuan ditempatkan sebagai subordinatif yaitu hanya mendengarkan berbagai larangan dan lebih banyak menerima serta mengikuti aturan dibandingkan laki-laki. Kemudian laki-laki ditempatkan sebagai superior yaitu pengawas kegiatan perempuan (Abdullah, 2003). Seiring berjalannya waktu, politik gender telah mengalami perubahan, hal tersebut terlihat dari banyaknya perempuan yang sudah melibatkan diri dalam dunia politik, sebagai contoh pada kegiatan perumusan kebijakan, pemilu maupun pilkada (Rasyidin, 2016)

Mansur Fakih dalam bukunya Analisis gender menjelaskan bahwa terdapat banyak pertentangan dari pihak laki-laki dan perempuan terhadap pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender. Faktor tersebut disebabkan oleh pertama, mempertanyakan status kaum perempuan, yakni permasalahan sistem serta struktur yang sudah mapan bahkan posisi kaum perempuan pada dasarnya yang berarti menggoncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat

Manifestasi ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih :

a. Gender dan marginalisasi yang sumber permasalahannya berasal dari kebijakan pemerintaah yang kurang adil, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Dimana perempuan hanya dianggap sebagai pemutus peraturan.
b. Gender dan subordinasi, berangkat dari pemikiran serta kesadaran gender yang tidak adil, seperti rendahnya posisi perempuan dalam pendidikan serta

pekerjaan. Karena perempuan dianggap akan kembali pada kodrat asalnya yakni mengurus permasalahan rumah (dapur dan anak).

c. Gender dan steorotip, steorotip ini diartikan sebagai kelompok tertentu. Konsep ketidakadilan terhadap perempuan, dilabelkan bahwa tindakan yang merugikan tersebut adalah asal muasalnya dari perbuatan perempuan tersebut.
d. Gender dan Kekerasan (violenc), bukan satu atau dua orang perempuan telah mengalami kekerasan fisik maupun batin dari laki-laki. Pernyataan tersebut dicontohkan dalam agama bahwa perempuan harus tunduk dan patuh terhadap perintah suami, namun bukan berarti pihak laki-laki dapat berlaku semena-mena.

Gender dan beban kerja, beban kerja yang dipikul oleh kaum perempuan terutama ibu rumah tangga sangatlah berat. Pekerjaan domestik tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi perempuan untuk mengerjakannya. Namun, masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap pekerjaan berat tersebut.

B. POLITIK KELUARGA (*FAMILY POLITIC)*

Keluarga dan politik merupakan sebuah budaya universal yang memiliki relasi untuk saling mempengaruhi. Dimana posisi politik tersebut ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Keluarga bukan hanya menjadi institusi dasar yang membentuk nilai dan identitas individu, namun juga berperan sebagai jaringan awal pembentuk kekuasaan serta legitimasi politik. Memiliki koneksi keluarga yang kuat, maka dapat menentukan posisi politik seseorang terlebih pada sistem politik yang mengandalkan kedekatan emosional, loyalitas sosial, serta struktur patronase. Dengan hubungan kekeluargaan tersebut, individu memperoleh akses sumber daya politik, jaringan yang semakin luas, serta kepercayaan publik. Politik keluarga juga dipandang sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, dengan kata lain kecenderungan mengenai politik keluarga semakin tumbuh dan menjadi jalan pintas bagi partai politik dalam memenangkan kontes politik maupun menjamin eksistensi sebuah rezim politik tertentu (Harjanto, 2011).

Istilah politik kekeluargaan merujuk pada proses rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga dengan menduduki jabatan politik maupun pemerintahan yang tidak berdasarkan kemampuan ataupun proseduran yang telah di

tetapkan. Akan tetapi didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatan baik karena keturunan maupun perkawinan (Purwaningsih, 2015). Pengertian politik kekeluargaan menurut Pablo, ialah bahwa politik kekeluargaan merupakan sebuah bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan dimana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Selain itu, politik kekerabatan atau politik dinasti dapat diartikan dengan adanya dua orang maupun lebih dalam satu keluarga yang menduduki jabatan politik. Dimana dari kedua orang tersebut, yang cenderung terjadi politik kekerabatan adalah orang kedua.

Definisi dinasti politik juga dijelaskan oleh (Djati, 2013) ialah sebuah strategi politik dalam menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga. Proses terbentuknya hubungan keluarga dan politik dari sudut pandang budaya terbagi menjadi tiga pendekatan, yakni neopatriomonalisme, klan politik, dan predator politik.

Neoptatriomonalisme memiliki pengertian bahwa terbentuknya keluarga politik merupakan sebuah akses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak oleh sirkulasi hubungan inti genealogis berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar genealogis yang memiliki kepentingan sama dalam pelanggengan kekuasaan keluarga. Hal tersebut merupakan pemicu dari kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman mengenai keluarga politik. Keluarga politik menurut klan politik menjelaskan bahwa keluarga politik terbentuk karena akses dari warisan feodalisme yang masih sangat kuat dalam masyarakat. Penguasaannya bukan sekedar berasal dari sumber daya ekonomi dalam menggambarkan feodalisme namun terdapat loyalitas dari masyarakat terhadap tokoh informal. Secara umum tokoh informal memiliki banyak masa yang mampu menunjang kekuasaan keluarga. Kemudian pembahasan yang terakhir yakni pendekatan politk predator yaitu keluarga politik terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik. Jaringan keluarga yang telah menguasai pembangunan daerah dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya (Djati, 2013).

Menurut (Purwaningsih, 2015) keluarga politik terbentuk karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktornya meliputi oligarki politik dalam rekrutmen politik, legislasi politik, lemahnya institusionalisasi partai, kesempatan politik yang diberikan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem

multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak. Dengan keluarga politik, indikasi dari buruknya institusionalisasi kepartaian ada umumnya merupakan hasil dari buruknya kemampuan rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Bertumbuhnya keluarga politik, maka playing field juga akan semakin tidak stabil karena keluarga politik akan memperluas pengaruh penguasaan terhadap wilayah dan kontrol terhadap ekonomi, sehingga kontestasi politik memiliki potensi menjadi lebih besar dibandingkan dengan calon lain (Harjanto, 2011). Menurut Djati, terdapat tiga model kekeluargaan dalam keluarga politik yaitu model familisme, model quasi-familisme dan model ego-familisme.

a. Familisme yakni kekeluargaan politik yang didasarkan pada hubungan darah secara langsung atau hubungan perkawinan dengan kelompok lain. Dimana keluarga politik yang memiliki kedudukan lebih lemah akan mendapatkan keuntungan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena menjamin eksistensi keluarga politik lebih lemah. Pada sisi lain jaringan keluarga akan terbangun menjadi lebih besar karena mampu mengikat keluarga politik lainnya. Poin penting dalam familisme yang mempengaruhi corak dinasti politik adalah seperti loyalitas, kepatuhan serta solidaritas keluarga.
b. Quasi-familisme yang berdasar pada solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Afeksi yang dimaksud bukanlah bentuk kasih sayang, namun bentuk orientasi yang didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Park, 2009). Hal tersebut berarti bahwasannya dimensi dinasti politik berkembang bukan hanya karena hubungan darah, namun bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah dengan sistem kekerabatan berbasis artifisial.
c. Egoisme-familisme, model dinasti politik ini berdasarkan pada pemenuhan aspek fugsionalisme dibanding menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konsepnya dapat dipahami dari segi kepala daerah dan masyarakat. Jika dari kepala daerah egoisme sama dengan konsep mendahulukan kepentingan keluaga daripada publik dalam pengisian jabatan publik maupun suksesi pemerintah (Park, 2009).

C. GENDER OWNERSHIP DALAM POLITIK LOKAL

Gender Ownership dalam politik lokal adalah konsep yang mengacu pada sejauh mana perempuan tidak hanya memiliki akses tetapi juga kontrol dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Konsep ini menekankan bahwa kepemilikan politik bukan hanya soal jumlah perempuan yang duduk di posisi politik, tetapi bagaimana perempuan benar-benar memiliki ruang dan kekuatan untuk menentukan arah kebijakan dan pengelolaan pemerintahan.

Menurut Naila Kabeer (1999), ownership dalam konteks pemberdayaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam ranah politik lokal, hal ini berarti perempuan harus memiliki kekuatan untuk berpartisipasi secara penuh, mengendalikan proses politik, dan mempengaruhi kebijakan, bukan sekadar menjadi simbol atau representasi. Moser (1993) menekankan pentingnya analisis gender dalam perencanaan pembangunan, termasuk politik lokal, di mana perempuan harus memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap sumber daya dan kekuasaan. Moser juga menyoroti hambatan-hambatan struktural dan budaya yang membatasi gender ownership, seperti norma patriarki dan stereotip yang melekat di masyarakat. Kemudian Chant (2002) juga menjelaskan bahwa kepemilikan gender dalam politik lokal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk peran gender. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural yang nyata, representasi perempuan dalam politik tetap akan bersifat simbolis dan tidak membawa perubahan substansial.

Gender Ownership dalam konteks politik lokal merujuk pada sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, serta pengaruh atas sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah atau komunitas lokal. Konsep ini tidak hanya melihat jumlah representasi perempuan dalam struktur politik, tetapi juga bagaimana perempuan dapat benar-benar memiliki dan mengendalikan peran serta keputusan dalam proses politik dan pengelolaan pemerintahan lokal. Aspek penting gender ownership dalam politik lokal:

a. Kepemilikan dan Kontrol atas Kekuasaan

Gender ownership menyoroti apakah perempuan tidak hanya duduk di kursi politik, tetapi juga memiliki kekuatan nyata dalam mengambil keputusan,

merancang kebijakan, dan mengelola sumber daya. Ini berarti perempuan bukan sekadar "pemilik nama" atau token representation, melainkan pelaku aktif dalam proses politik.

b. Akses dan Kesempatan Setara

Konsep ini juga mencakup akses perempuan terhadap pelatihan, jaringan, dan dukungan yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik lokal. Kesempatan yang sama penting agar perempuan bisa bersaing secara adil dengan laki-laki.

c. Pengaruh budaya dan sosial

Gender ownership memperhatikan hambatan-hambatan sosial dan budaya yang menghalangi perempuan untuk benar-benar 'memiliki" politik lokal, seperti norma patriarki, stereotip gender, dan beban kerja domestik yang tidak seimbang.

d. Dampak terhadap Kebijakan Pro-Gender

Ketika perempuan memiliki ownership yang kuat dalam politik lokal, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap isu-isu gender, seperti perlindungan perempuan, kesejahteraan keluarga, dan pengentasan kemiskinan yang berdampak pada perempuan.

Gender ownership dalam konteks kebijakan kuota 30% merujuk pada sejauh mana perempuan tidak hanya *hadir* secara numerik di lembaga legislatif atau politik lokal, tetapi juga *memiliki kontrol nyata*, *peran aktif*, dan *pengaruh substansial* dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, kehadiran perempuan di kursi parlemen harus dibarengi dengan kapasitas dan ruang politik untuk bertindak sebagai aktor pengubah kebijakan, bukan sekadar pengisi kuota atau simbol representasi formal. Di Indonesia, aturan kuota 30% perempuan tercantum dalam:

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (pasal 2 ayat 5).
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.

Tujuan nya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, mengatasi ketimpangan gender dalam representasi politik, mewujudkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Meskipun begitu, kebijakan

kuota 30% telah berlaku, realisasi gender ownership sering kali masih lemah. Beberapa masalah utama:

- Representasi Simbolik (Tokenism)

  Banyak perempuan dicalonkan hanya untuk memenuhi syarat administratif kuota, bukan karena kapasitas atau kesiapan politik mereka. Perempuan sering ditempatkan di posisi “tidak aman” dalam daftar calon legislatif, yang kecil peluangnya untuk terpilih.

- Kurangnya Akses terhadap Sumber Daya Politik

  Perempuan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap dana kampanye, jaringan politik, dan dukungan elite partai (Mansour Fakih, 1996; Naila Kabeer, 1999). Akibatnya, sekalipun dicalonkan, mereka tidak memiliki "*ownership*" terhadap proses politik.

- Budaya Patriarkal dan Stereotip Gender

  Anggapan bahwa perempuan tidak kompeten dalam politik masih mengakar. Bahkan perempuan yang terpilih pun sering dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mencapai g*ender ownership* yang nyata dalam konteks pemenuhan kuota 30%, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis. Pertama, perlu dilakukan **r**eformasi internal dalam tubuh partai politik, terutama dalam proses kaderisasi yang harus berbasis pada kapasitas, integritas, dan ideologi, bukan sekadar kedekatan personal atau hubungan keluarga. Kedua, pendidikan politik dan peningkatan kapasitas perempuan menjadi kunci utama perempuan harus dibekali pemahaman tentang isu publik, strategi politik, komunikasi politik, dan kemampuan advokasi agar dapat berperan aktif dan efektif. Ketiga, perlu ada penguatan jaringan dan solidaritas antar perempuan lintas partai dan sektor untuk mendorong agenda bersama dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di ruang politik. Keempat, peninjauan sistem pemilu dan daftar calon juga sangat penting, agar penempatan perempuan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memberi peluang nyata untuk terpilih. Tanpa langkah-langkah tersebut, kuota 30% hanya akan menciptakan keterwakilan semu tanpa perubahan substansial dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam politik.

BAB III
LANDSCAPE KABUPATEN REMBANG

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai kondisi Kabupaten Rembang serta profil politisi perempuan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini. Pada bab ini akan menyajikan latar sosio-politik dan geografis dari wilayah penelitian serta profil subjek yang diteliti untuk memberikan konteks sosial yang melandasi analisis strategi politik.

A. KONDISI UMUM KABUPATEN REMBANG

1. Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Rembang

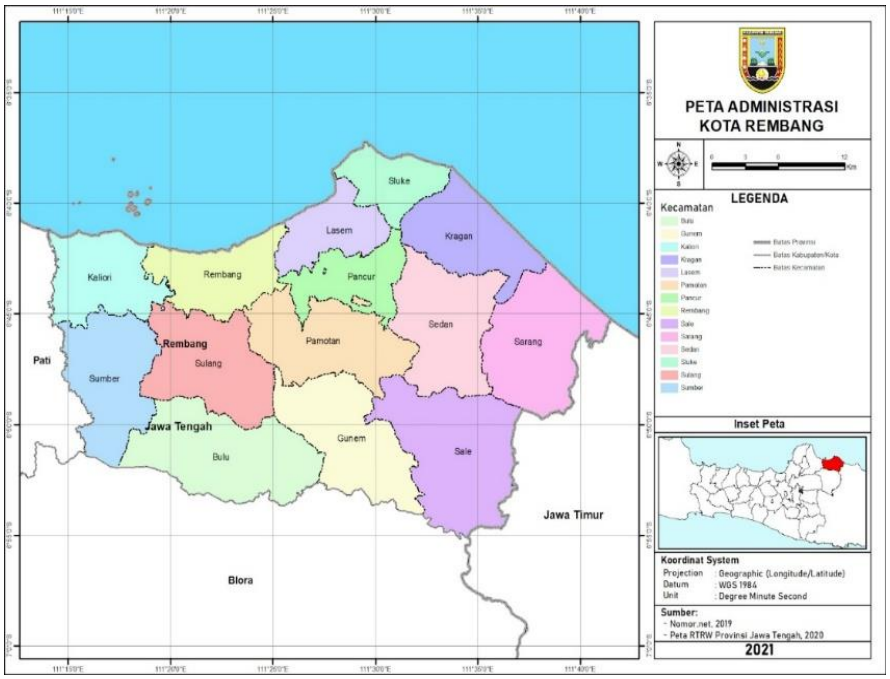
a. Letak Geografis

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian paling timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kabupaten Rembang terletak pada garis koordinat 111’00’-111’30’ bujur timur dan 6’30’-7’6’ lintang selatan. Batas administrasinya adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Blora

Menurut kantor pertanahan luas Kabupaten Rembang sekitar 11.973 ha berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 ha pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 ha pada ketinggian 101-500m dpl, dan 3.112 ha pada ketinggian lebih dari 500 m dpl. Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 ha yang terdiri dari lahan sawah sebesar 29.058 ha (28,65%), lahan bukan sawah sebesar 39.938 ha (39,38%) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 ha (31,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan yakni 32,94%, hutan 23,45% dan sawah tadah hujan sebesar 20,08% (rembangkab.go.id). Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 287 desa, dan 7 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan sale (10.714 ha) dan disusul kecamatan bulu (10.240 ha).

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Rembang



Sumber: JDIH Kabupaten Rembang

Berdasarkan data administratif, Kabupaten Rembang terbagi menjadi empat belas wilayah kecamatan, pertama Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sulang, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pancur, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sluke, dan Kecamatan Lasem. Kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah yang berbeda antar satu dengan lainnya, dimana rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Rembang

	Kecamatan *Subdistrict*	**Luas (km^2)** *Total Area (km^2)*	**Persentase** *Percentage*
1	Sumber	76,73	7,57
2	Bulu	102,4	10,10
3	Gunem	80,2	7,91
4	Sale	107,15	10,57
5	Sarang	91,33	9,01
6	Sedan	79,64	7,85
7	Pamotan	81,56	8,04
8	Sulang	84,54	8,34
9	Kaliori	61,5	6,06

10	Rembang	58,81	5,80
11	Pancur	45,93	4,53
12	Kragan	61,66	6,08
13	Sluke	37,59	3,71
14	Lasem	45,04	4,44
Rembang		**1014,08**	**100,00**

Sumber/*Source*: BPN Kabupaten Rembang/*Land Office of Rembang Regency*

Berdasarkan empat belas kecamatan tersebut, Kabupaten Rembang memiliki dua ratus sembilan puluh empat (294) desa. Desa tersebut meliputi:

Tabel 3. 2 294 Desa di Kabupaten Rembang

Kecamatan Sumber	Kecamatan Bulu	Kecamatan Lasem
1. Ronggomulyo	1. Mlatirejo	1. Karasgede
2. Logede	2. Sendangmulyo	2. Jolotundo
3. Pelemsari	3. Pondokrejo	3. Sumbergirang
4. Logung	4. Warugunung	4. Karangturi
5. Krikilan	5. Pinggan	5. Babagan
6. Kedungtulup	6. Cabean	6. Dorokandang
7. Jatihadi	7. Lambangan Kulon	7. Gedongmulyo
8. Polbayem	8. Lambangan Wetan	8. Dasun
9. Sumber	9. Sumbermulyo	9. Soditan
10. Jadi	10. Karangasem	10. Ngemplak
11. Grawan	11. Pasedan	11. Selopuro
12. Randuagung	12. Ngulaan	12. Sendangcoyo
13. Sukorejo	13. Jukung	13. Ngargomulyo
14. Tlogotunggal	14. Bulu	14. Kajar
15. Bogorejo	15. Mantingan	15. Gowak
16. Megulung	16. Kadiwono	16. Sendangasri
17. Kedungasem		17. Tasiksono
18. Sekarsari		18. Sriombo
		19. Bonang
		20. Binangun

Kecamatan Gunem	Kecamatan Sale	Kecamatan Kragan
1. Kajar 2. Timbrangan 3. Tegaldowo 4. Pasucen 5. Suntri 6. Dowan 7. Trembes 8. Gunem 9. Kulutan 10. Sidomulyo 11. Telgawah 12. Sendangmulyo 13. Panohan 14. Demaan 15. Banyuurip 16. Sambongpayak	1. Tahunan 2. Ngajaran 3. Mrayun 4. Bancang 5. Sale 6. Joho 7. Jinanten 8. Gading 9. Wonokerto 10. Sumbermulyo 11. Tengger 12. Bitingan 13. Pakis 14. Ukir 15. Rendeng	1. Tanjungsari 2. Sendangmulyo 3. Sendangwaru 4. Ngasinan 5. Kendalagung 6. Mojokerto 7. Tanjungan 8. Kebloran 9. Karanganyar 10. Karanglincak 11. Karangharjo 12. Kragan 13. Tegalmulyo 14. Balongmulyo 15. Narukan 16. Sudan 17. Terjan 18. Sandang 19. Watupecah 20. Woro 21. Sumurpule 22. Plawangan 23. Sumbergayam 24. Pandangan Wetan 25. Pandangan Kulon 26. Sumurtawang Sumbersari
Kecamatan Sarang	**Kecamatan Sedan**	**Kecamatan Sluke**
1. Lodan Kulon	1. Ngulahan	1. Sanetan

2. Lodan Wetan 3. Bonjor 4. Tawangrejo 5. Sampung 6. Baturno 7. Babaktulung 8. Nglojo 9. Jambangan 10. Pelang 11. Gilis 12. Gunungmuly o 13. Gonggang 14. Sumbermuly o 15. Kalipang 16. Dadapmulyo 17. Sendangmuy o 18. Banowan 19. Temperak 20. Karangmang u 21. Bajingjowo 22. Bajingmedur o 23. Sarangmedur o	2. Pacing 3. Karas 4. Mojosari 5. Gesikan 6. Sambiroto 7. Sedan 8. Karangasem 9. Sidorejo 10. Sidomulyo 11. Kedungringi n 12. Gandrirojo 13. Candimulyo 14. Lemahputih 15. Kumbo 16. Dadapan 17. Sambong 18. Bogorejo 19. Kenongo 20. Jambeyan 21. Menoro	2. Rakitan 3. Bendo 4. Labuhan Kidul 5. Sendangmulyo 6. Blimbing 7. Manggar 8. Jatisari 9. Langgar 10. Sluke 11. Jurangrejo 12. Leran 13. Trahan 14. Pangkalan
Kecamatan Pamotan	**Kecamatan Sulang**	**Kecamatan Pancur**
1. Megal	1. Tanjung 2. Kemadu	1. Japeledok 2. Jeruk

2. Ngemplakrejo 3. Pragen 4. Samaran 5. Gambiran 6. Bamban 7. Bangunrejo 8. Pamotan 9. Sidorejo 10. Tempaling 11. Joho 12. Mlagen 13. Kepohagung 14. Mlawat 15. Segoromulyo 16. Ketangi 17. Sendangagung 18. Gegersimo 19. Sumbangrejo 20. Japerejo 21. Tulung 22. Ringin 23. Sumberejo	3. Sulang 4. Pomahan 5. Rukem 6. Korowelang 7. Karangharjo 8. Jatimudo 9. Kunir 10. Glebeg 11. Bogorame 12. Kaliombo 13. Sudo 14. Karangsari 15. Pragu 16. Kebonagung 17. Seren 18. Pranti 19. Pedak 20. Landoh 21. Kerep	3. Doropayung 4. Karaskepoh 5. Tuyuhan 6. Pandan 7. Gemblengmulyo 8. Sumberagung 9. Kalitengah 10. Sidowayah 11. Kedung 12. Punggurharjo 13. Langkir 14. Pancur 15. Pohlandak 16. Warugunung 17. Criwik 18. Wuwur 19. Ngulangan 20. Banyurip 21. Johogunung 22. Trenggulunan Ngroto
Kecamatan Kaliori	**Kecamatan Rembang**	
1. Meteseh 2. Maguan 3. Sidomulyo 4. Wiroto 5. Banggi	1. Kedungrejo 2. Turusgede 3. Kumendung 4. Sridadi 5. Padaran	

6. Kuangsan 7. Gunungsari 8. Sendangagung 9. Karangsekar 10. Babadan 11. Pengkol 12. Sambiyan 13. Mojorembun 14. Tunggulsari 15. Tambakagung 16. Mojowarno 17. Dresi Kulon 18. Dresi Wetan 19. Tasikharjo 20. Purworejo 21. Bogoharjo 22. Banyudono 23. Pantiharjo	6. Tlogomulyo 7. Kasreman 8. Punjulharjo 9. Tritunggal 10. Pasarbanggi 11. Gedangan 12. Weton 13. Ngotet 14. Mondoteko 15. Ngadem 16. Ketanggi 17. Pulo 18. Waru 19. Magersari 20. Gegunung Kulon 21. Gegunung Wetan 22. Pacar 23. Tanjungsari 24. Sumberejo 25. Tasikagung 26. Sawahan 27. Leteh 28. Sidowayah 29. Kutoharjo 30. Pandean 31. Sukoharjo 32. Kabongan Lor 33. Kabongan Kidul	

	34. Tireman	

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

b. Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Kondisi demografis Kabupaten Rembang menunjukan adanya pertumbuhan penduduk dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 665.501 ribu jiwa. Mayoritas penduduk adalah usia produktif (64,78%), diikuti oleh anak-anak (20,51%) dan usia lanjut (14,71%). Di Kabupaten Rembang, wilayahnya banyak dihuni oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. jumlah penduduk laki-laki berkisar sebanyak 334,294 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 331.207 jiwa.

Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUMBER	18.899	19.127	**38.026**
2	BULU	14.510	14.394	**28.904**
3	GUNEM	12.683	12.530	**25.213**
4	SALE	20.048	19.814	**39.862**
5	SARANG	32.460	31.440	**63.900**
6	SEDAN	29.513	28.471	**57.984**
7	PAMOTAN	26.146	25.529	**51.675**
8	SULANG	20.224	20.216	**40.440**
9	KALIORI	21.759	22.246	**44.005**
10	REMBANG	46.356	46.881	**93.237**
11	PANCUR	16.106	15.870	**31.976**
12	KRAGAN	34.013	33.484	**67.497**
13	SLUKE	15.373	15.206	**30.579**
14	LASEM	26.204	25.999	**52.203**
TOTAL		**334.294**	**331.207**	**665.501**

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang

Penduduk terbanyak di Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang dengan jumlah 93.237 jiwa, dilanjut dengan Kecamatan Kragan sebanyak 67.497 jiwa, kemudian Kecamatan Sarang yaitu sebanyak 63.900 jiwa. Berikut urutan penduduk terbanyak nomor 4 sampai penduduk yang paling sedikit. Kecamatan Sedan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 yakni sejumlah 57.984 jiwa, kemudian Kecamatan Lasem sebanyak 52.203 jiwa, Kecamatan Pamotan sebanyak 51.675 jiwa, Kecamatan Kaliori 44.005 jiwa, Kecamatan Sulang sebanyak 40.440 jiwa, Kecamatan Sale sebanyak 39.862, Kecamatan Sumber sebanyak 38.026 jiwa, Kecamatan Pancur 31.976 jiwa, Kecamatan Sluke sebanyak

30.576 jiwa, Kecamatan Bulu sebanyak 28.904 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunem 25.211 jiwa.

Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2023

Kecamatan	**Kepadatan Pnduduk per KM (jiwa)**
Sumber	481,99
Bulu	283,57
Gunem	290,99
Sale	364,96
Sarang	684,47
Sedan	645,03
Pamotan	638
Sulang	468,45
Kaliori	699,81
Rembang	1.524,83
Pancur	739,67
Kragan	1.007,59
Sluke	792.22
Lasem	1.109,39
Kab. Rembang	636,8

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang menunjukkan angka 636,8 jiwa/km. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang, tepatnya 14 kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi terletak di Kecamatan Rembang yakni sebesar 1.524,83 jiwa/km. Kemudian kecamatan dengan kepadatan penduduk nomor dua terletak di Kecamatan Lasem, sebesar 1.109,39 jiwa/km, diikuti oleh Kecamatan Kragan yakni sebesar 1.007,59 jiwa/km, Kecamatan Sluke sebesar 792,22 jiwa/km, Kecamatan Pancur sebesar 739,67 jiwa/km, Kaliori sebesar 699,81 jiwa/km, Kecamatan Sarang sebesar 684,87 jiwa/km, Kecamatan Sedan sebesar 645,03 jiwa/km, Kecamatan Pamotan sebesar 638 jiwa/km, Kecamatan Sumber sebesar 481,99 jiwa/km, Kecamatan Sulang sebesar 468,85 jiwa/km,

Kecamatan Sale sebesar 364,96 jiwa/km, dan Kecamatan Gunem sebesar 290,99 jiwa/km. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Bulu yakni sebesar 283,57 jiwa/km.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kelompok umur	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	
0-4	24.733	23.736	48.463
5-9	23.384	22.367	45.751
10-14	22.855	21.481	44.336
20-24	25.437	23.801	49.238
25-29	25.160	24.009	49.169
30-34	25.431	25.190	50.621
35-39	25.142	25.281	50.423
40-44	24.790	24.514	49.304
45-49	24.601	24.450	49.051
50-54	22.093	22.055	44.148
55-59	19.624	19.998	39.622
60-64	16.657	17.253	33.910
65+	27.642	31.573	59.215
jumlah	331.870	328.296	665.501

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

Tabel diatas menunjukkan bahwasannya kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 banyak di dominasi oleh penduduk dengan rentang usia 65+ dengan jumlah sebesar 59.215 jiwa dan memiliki dominasi jenis kelamin perempuan. penduduk dengan rentang usia terbanyak kedua yakni penduduk usia 35-39 tahun sebanyak 50.423 jiwa yang di dominasi oleh perempuan sebesar 25.281 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit yakni penduduk dengan rentang usia 60-64 yang berjumlah sebesar 33.910 dengan dominasi penduduk perempuan sebesar 17.253 jiwa.

Penduduk Kabupaten Rembang digolongkan berdasar pada jumlah kepercayaan yang dianut.

Gambar 3. 3 Jumlah Kepercayaan Penduduk Rembang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	KEPERCAYAAN	JUMLAH
1	SUMBER	37.968	4	40	0	0	0	14	**38.026**
2	BULU	28.829	16	43	2	0	6	8	**28.904**
3	GUNEM	25.205	5	0	0	0	0	3	**25.213**
4	SALE	39.776	55	31	0	0	0	0	**39.862**
5	SARANG	63.863	19	10	0	8	0	0	**63.900**
6	SEDAN	57.979	3	2	0	0	0	0	**57.984**
7	PAMOTAN	51.590	67	14	0	4	0	0	**51.675**
8	SULANG	40.339	80	12	5	0	0	4	**40.440**
9	KALIORI	43.860	51	79	0	3	0	12	**44.005**
10	REMBANG	90.267	1.490	1.229	37	164	4	46	**93.237**
11	PANCUR	31.955	11	1	0	9	0	0	**31.976**
12	KRAGAN	67.034	176	158	1	101	0	27	**67.497**
13	SLUKE	30.501	54	20	0	4	0	0	**30.579**
14	LASEM	50.517	956	535	1	150	33	11	**52.203**
TOTAL		**659.683**	**2.987**	**2.174**	**46**	**443**	**43**	**125**	**665.501**

Sumber: DKB Semester II Tahun 2024

Penduduk Kabupaten Rembang menganut berbaga macam kepercayaan. Kepercayaan yang paling banyak dianut di Kabupaten Rembang adalah agama Islam dengan jumlah sebanyak 659.683 jiwa, kemudian terdapat sebanyak 2.987 jiwa penduduk yang menganut agama Kristen. Penduduk yang menganut agam Katholik sebanyak 2.174 jiwa, kemudian penduduk yang menganut agama Hindu sebanyak 46 jiwa, penduduk yang menganut agama Budha sebanyak 443 jiwa dan sebanyak 23 penduduk menganut agama Konghucu.

Kemudian penduduk Kabupaten Rembang digolongkan berdasarkan mata pencaharian. Dimana penduduk Kabupaten Rembang memiliki beragam mata pencaharian.

Tabel 3. 5 Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Rembang

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	70.525	64.048	134.573
2.	Mengurus Rumah Tangga	9	124.730	124.739
3.	Pelajar/mahasiswa	56.399	47.428	103.827
4.	pensiunan	2.092	1.238	3.330

5.	PNS	3.645	2.870	6.515
6.	TNI	708	5	713
7.	Petani/Pekebun	66.504	38.702	105.206
8.	Peternak	83	38	121
9.	Nelayan/Perikanan	18.884	206	19.090
10.	Industri	117	72	189
11.	Kontruksi	222	3	225
12.	Transportasi	674	2	676
13.	Karyawan Swasta	21.172	9.794	30.966
14.	Karyawan BUMN	500	117	617
15.	Karyawan BUMD	138	82	220
16.	Karyawan Honorer	372	436	808
17.	Buruh	4.516	980	5.496
18.	Guru	1.419	3.459	4.878
19.	Dokter	60	95	155
20.	Perawat	146	351	497
21.	Sopir	3.848	0	3.848
22.	Wiraswasta	71.598	27.708	99.306
23.	Perangkat Desa	1.441	437	1.878
24.	Kepala Desa	204	25	229
25.	Lainnya	9.018	8.380	17.398

Sumber: DKB Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data diatas bahwasannya masyarakat Kabupaten Rembang memiliki sumber mata pencaharian yang beragam. Hal tersebut dikarenakan bentuk tipologi Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan laut jawa sehingga terdapat kurang lebih 19.090 masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau buruh nelayan. Masyarakat yang menjadi nelayan atau buruh nelayan sebagian besar tinggalnya di pesisir pantai. Kemudian Kabupaten Rembang juga memiliki bentuk tanah yang subur sehingga banyak juga masyarakat yang menjadi petani yakni sebanyak 105.206 ribu jiwa. Kemudian terdapat 30.966 penduduk yang menjadi Karyawan Swasta, 617 penduduk yang menjadi karyawan BUMN, 220 penduduk yang menjadi karyawan BUMD, 808 penduduk yang menjadi karyawan honorer. Selanjutnya terdapat sebanyak 189 penduduk yang bekerja pada bidang industri, sebanyak 225 penduduk yang bekerja pada bidang konstruksi, terdapat sebanyak 676 penduduk yang bekerja pada bidang transportasi. Kemudian terdapat sebanyak 6515 penduduk yang

menjadi PNS, sebanyak 713 penduduk yang menjadi TNI, sebanyak 4.878 penduduk yang berprofesi sebagai guru, sebanyak 5.496 penduduk yang menjadi buruh, 155 penduduk yang menjadi dokter, 497 penduduk yang menjadi perawat, 3.484 penduduk yang menjadi sopir, sebanyak 99.306 penduduk yang menjadi wiraswasta, 1.878 penduduk yang menjadi perangkat desa, 229 penduduk yang menjadi Kepala Desa, 124.739 penduduk yang mengurus rumah, 103.827 penduduk yang menjadi mahasiswa, 134.573 penduduk yang belum bekerja dan 17.398 lainnya.

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	144.262 jiwa
Belum tamat SD/ sederajat	73.866 jiwa
Tamat SD/ sederajat	195.780 jiwa
SLTP/ sederajat	127.769 jiwa
SLTA/ sederajat	93.668 jiwa
D-I/D-II	1.747 jiwa
Akademi/ D-III/ Sarjana muda	4.739 jiwa
D-IV/ Strata I	22.643 jiwa
Strata II	943 jiwa
Strata III	30 jiwa

Sumber: DKB Semester II Tahun 2024

Penduduk Kabupaten Rembang memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Dimana terdapat sebanyak 144.262 jiwa penduduk yang belum sekolah atau tidak sekolah, kemudian terdapat sebanyak 73.866 jiwa penduduk yang belum tamat SD/Sederajat, terdapat 195.780 jiwa penduduk yang tamat SD/Sederajat, terdapat 127.769 jiwa penduduk yang menempuh SLTP/Sederajat, terdapat 93.668 jiwa penduduk yang menempuh SLTA/Sederajat, terdapat 1.747 jiwa penduduk yang menempuh D-I/D-II, terdapat 4.739 jiwa penduduk yang menempuh pendidikan akademi/ D-III/ Sarjana muda, terdapat 22.643 penduduk yang menempuh D-IV/ Strata I, terdapat 943 penduduk yang menempuh Strata II, dan terdapat 30 jiwa penduduk yang menempuh strata III.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi sosial, budaya dan ekonomi

yang beragam. Penduduk di Kabupaten Rembang dihuni oleh beberapa etnis dengan mayoritas dihuni etnis jawa diikuti oleh etnis madura dan etnis lainnya. Banyaknya etnis jawa yang menduduki wilayah Kabupaten Rembang menjadikan masyarakat Rembang memiliki jiwa yang kokoh unttuk memegang tradisi, nilai-nilai serta norma kejawen.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang banyak dihuni oleh masyarakat perdesaan, dimana jumlah desa di Kabupaten Rembang mencapai angka 294 desa. Struktur masyarakat perdesaan di Kabupaten Rembang tersebut menunjukkan adanya interaksi harmonis dari warga satu dengan warga lainnya. Nilai gotong-royong masih dijunjung tinggi, dimana mayoritas masyarakat menganggap bahwa gotong royong mampu memperkuat solidaritas sosial antar warga, meningkatkan efisiensi dan produktifitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta konflik yang terjadi di masyarakat menjadi berkurang. Selain itu, masyarakat Kabupaten Rembang juga menganggap gotong-royong sebagai tradisi serta budaya yang harus dilestarikan oleh warganya.

Sejarah kemunculan Kabupaten Rembang sangat beragam, dimana terdapat tiga cerita populer yang berkembang di masyarakat. Nama Rembang berasal dari kata "Ngrembang" yang memiliki arti memangkas tebu. Dimana pada manuskrip kuno yang ditulis oleh Mbah Guru tahun 1447 M menceritakan bahwa terdapat delapan keluarga dari Campa Banjarmlati. Delapan keluarga tersebut seringkali melakukan perjalanan dan berpindah tempat. Pada saat itu mereka menebang pohon bakau yang tumbuh liar di sekitar sungai, kemudian membuat perkampungan dengan nama Kabongan. Penebangan pohon yang dilakukan oleh keluarga Campa Banjarmlati adalah untuk mendirikan usaha pabrik gula merah. Setelah mengalami proses panjang akhirnya mereka akan melakukan upacara suci yang dinamakan "ngrembang sakawit" yang menjadi asal usul kata Rembang.

Sejarah selanjutnya juga ditemukan dalam kitab Negarakertagama yang ditulis pada zaman kerajaan Majapahit. Rembang yang menjadi bawahan Majapahit memiliki pelabuhan laut yang tidak pernah sepi. Kemudian pelabuhan laut tersebut menjadi tempat singgah armada Laksamana Cheng Ho dari Cina, dimana hal tersebut memberikan pengaruh budaya Tiongkok di Kabupaten Rembang terkhusus di Lasem. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda,

Rembang menjadi tempat berdirinya sekolah khusus perempuan pribumi pertama oleh R.A Kartini yang menjadi salah satu tokoh emansipasi wanita Indonesia. Namun, menjadi salah satu tempat berdirinya sekolah emansipasi wanita tidak menjadikan Rembang benar-benar melek terhadap keterwakilan perempuan. Alasannya adalah sekolah tersebut tetap tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. hal tersebut menjadikan masyarakat di Kabupaten Rembang tetap berfikir tradisional.

Kondisi Ekonomi di Kabupaten Rembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, dimana mayoritas penduduk bergantung pada sektor tersebut. Wilayah Kabupaten Rembang sendiri terdiri dari pesisir dan pegunungan. Wilayah utara di dominasi oleh dataran rendah pesisir sedangan wilayah selatan merupakan bagian dari pegunungan Kendeng. Pada wilayah pesisir mayoritas masyarakat mengantungkan hidup dari laut, utamanya yang tinggal di Kecamatan Rembang, Kaliori, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Hasil mayoritas di wilayah lautnya adalah tambak ikan dan tambak garam. Tradisi yang mengakar pada wilayah pesisir adalah tradisi sedekah laut yang dilakukan satu tahun sekali. Tradisi tersebut dilakukan dengan melarungkan sesaji ke laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan. Kemudian di wilayah Lasem sendiri merupakan kota tua peninggalan peradaban Jawa-Tionghoa, dimana terdapat peninggalan sejarah yang menjadi tempat wisata berupa arsitektur klenteng dan Kirab Kimsin Makco serta pelestarian batik Lasem yang sangat diminati masyarakat.

Wilayah selatan Kabupaten Rembang masyarakat mayoritas menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian dan perkebunan utamanya di Kecamatan Bulu, Sale, dan Gunem. Di wilayah ini tradisi yang masih mengakar adalah tradisi sedekah bumi. Tradisi tersebut dilakukan satu tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Selain itu di Kabupaten Rembang juga memiliki tradisi lokal yang mengakar kuat. Tradisinya berupa kesenian jawa yaitu tayub, wayang kulit, keroncong dan festival thong-thong klek.

Pada tahun 2025 Kabupaten Rembang masih dikategorikan menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Tercatat dalam data BPS Maret 2024 bahwa kemiskinan berada pada angka 14,02% atau sebanyak

91,45 ribu orang. Dimana mengalami penurunan dari 14,17% atau sebanyak 91,97 ribu orang pada Maret 2023. Angka penurunanya sebesar 0,52 ribu jiwa atau 0,15% selama satu tahun. Jika melihat kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi, pada Maret 2024 Kabupaten Rembang berada pada tingkat ke-7 (tujuh) dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa tengah. Sedangkan di wilayah Keresidenan Pati pada tahun 2023 Kabupaten Rembang menempati persentase penduduk miskin tertinggi dari 5 kabupaten yakni Blora, Jepara, Pati, Kudus, dan Rembang. Namun pada tahun 2024 Kabupaten Rembang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan diikuti oleh kabupaten lain (BPS, 2025). Kemajuan tersebut masihlah rentan terhadap kemerosotan ekonomi yang tercermin pada garis kemiskinan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistika, 2025) Kabupaten Rembang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang triwulan I-2025 menunjukan adaanya tren pertumbuhan yang ditandai dengan adanya lonjakan dalam realisasi investasi. Pada triwulan I-2025 total investasi mencapai Rp. 375,35 miliar jauh dari target 120% dari Rp. 312,79 miliar serta menyumbang 27,2% dari target tahunan Rp. 1,379 triliun dalam RPJMD 2025-2029. Nilai tersebut sekitar 86% berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang berpotensi menguatkan ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pemasok lokal. Investasi tersebut difokuskan pada sektor jasa, pertambangan, perdagangan, industri barang kulit dan alas kaki, serta utilitas menyerap ribuan lapangan kerja baru dan mencerminkan iklim usaha yang kondusif.

Anggaran daerah atau APBD 2025 mengalami kenaikan untuk pertama kalinya yakni sebesar Rp. 2 triliun dengan belanja yang diarahkan untuk infrastruktur, pendidikan serta kesehatan (BPS, 2025). Walaupun demikian, muncul kekhawatiran mengenai potensi defisit sekitar Rp. 200 miliar akibat pembayaran ASN yang belum teranggarkan penuh, yang menuntut revisi APBD. Pemerintah daerah melakukan antisipasi dengan pemangkasan pos non utama serta pencanangan program prioritas sektor publik melalui bedah rumah, validasi data kemiskinan ekstrem, serta memperluas kerja sama vokasional dan CSR desa-desa prioritas.

d. Dinamika Politik di Kabupaten Rembang

Dinamika politik di Kabupaten Rembang tidak terlepas dari struktur sosial dan kultural desa yang sangat kuat. Politik lokal di daerah berlangsung dalam konteks hubungan antar individu seperti kekerabatan, keagamaan dan patron-klien. Hubungan tersebut lebih dominan daripada menggunakan pendekatan rasionalitas kebijakan. Pada setiap momentum pemilu, baik legislatif maupun kepala daerah, dinamika politik di Kabupaten Rembang memperlihatkan pola khasnya yaitu politik berbasis kedekatan personal. Dimana pemilih seringkali menentukan pilihan berdasarkan relasi dengan kandidat misal sebagai sanak saudara, teman satu komunitas atau bagian dari jaringan sosial tertentu. Hal tersebut menstabilkan politik pada satu sisi namun menyulitkan gagasan-gagasan yang ditawarkan kandidat baru.

Posisi Elit desa dalam proses politik memiliki peran yang sangat signifikan. Kepala desa, tokoh agama, pengurus organisasi kemasyarakatan, hingga pengelola lembaga pendidikan islam menjadi aktor penting dalam mengarahkan dukungan politik masyarakat. Walaupun pada dasarnya Kepala Desa diharuskan memiliki sifat netral dalam pemilu. Jika kita lihat desa menjadi unit sosial politik yang strategis diperebutkan oleh para kandidat. Karena intensitas hubungan sosial masyarakat pada akar desa sangat kuat serta komunikasi politik lebih banyak berlangsung secara lisan dan berbasis tatap muka. Maka dari itu pola kampanye langsung dari rumah kerumah dan melalui kegiatan keagamaan atau hajatan warga menjadi strategi dominan yang dilakukan kandidat dalam meraih simpati.

Dominasi elit lokal di Kabupaten Rembang mulai mengalami gelombang regenerasi politik, dimana contoh langsungnya adalah dengan muncul generasi muda serta politisi perempuan. Namun, regenerasi tersebut tidak muncul secara organik, karena sebagian besar dari mereka lahir dari keluarga politisi atau tokoh yang telah mapan. Walaupun demikian, kemunculan mereka memberikan nuansa baru dalam politik daerah dengan pendekatan yang lebih modern serta responsif terhadap isu sosial dan aktif membangun komunikasi melalui media sosial. Sementara itu, perilaku pemilih di Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan pragmatis. Dimana dukungan yang diberikan kepada para

kandidiat seringkali ditentukan dengan imbalan konkret, janji program langsung atau kedekatan emosional. Hal tersebut menciptakan ruang bagi praktik transaksional dan politik uang terutama menjelang hari pemilihan. Secara keseluruhan politik di Kabupaten Rembang merupakan gambaran dari sistem demokrasi lokal yang berjalan dalam bingkai relasi sosial yang kuat serta kontekstual.

B. DAPIL II DAN V: KONTEKS ELEKTORAL

1. Komposisi Kursi dan Karakter Pemilih

Kabupaten Rembang memiliki 45 kursi DPRD yang tersebar pada 7 daerah pemilihan. Dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan wilayah dan jumlah penduduk.

Tabel 3. 7 Komposisi Kursi DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024

Dapil	Wilayah	Jumlah Kursi
Dapil 1	Kecamatan Rembang	6 kursi
Dapil 2	Kecamatan Pancur dan Lasem	6 kursi
Dapil 3	Kecamatan Kragan dan Sluke	7 kursi
Dapil 4	Kecamatan Sarang dan Sedan	8 Kursi
Dapil 5	Kecamatan Sale dan Pamotan	6 Kursi
Dapil 6	Kecamatan Sulang, Gunem, dan Bulu	6 Kursi
Dapil 7	Kecamatan Sumber dan Kaliori	6 kursi

Sumber:

Dapil II yang mencakup wilayah Kecamatan Pancur dan Lasem memiliki alokasi 6 kursi DPRD Kabupaten Rembang. Persaingan ketat antar partai besar dan caleg lokal terjadi pada Pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan dapil II terkhusus Lasem merupakan wilayah multikultural

dengan pemilih yang rasional sedangkan Pancur lebih cenderung konservatif dan kultural-religius. Kemudian Dapil V juga mengalokasikan sebanyak 6 kursi. Dimana kekuatan pemilih di dapil ini tersebar pada daerah agraris dan pegunungan, dengan pola pemilih yang dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan calon legislatif, termasuk hubungan kekeluargaan, jaringan pesantren, serta afiliasi lokal. Basis sosialnya adalah dengan pendekatan politik relasional dan mobilisasi melalui struktur informal, seperti tokoh masyarakat atau kiai lokal. Secara umum dapil II dan dapil V memperlihatkan persaingan semi terbuka dimana kandidat dilihat berdasarkan keterlibatan dalam aktifitas sosial masyarakat, representasi kelompok tertentu atau jaringan keluarga lebih dapat mempengaruhi masyarakat daripada kekuatan partai. Hal tersebut terlihat dari beragamnya partai memperoleh kursi pada pemilu 2024.

2. Peta Persaingan dan Persebaran Suara

Peta persaingan dan persebaran suara di Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024 dinilai cukup merata. Masing-masing partai politik telah menunjukkan taringnya seperti yang terjadi di dapil II yakni Lasem-Pancur dan dapil V Sale-Pamotan.

Tabel 3. 8 Calon Terpilih dan Perolehan Suara Dapil II Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024

Caleg terpilih Dapil II	Partai	Jumlah suara
Laela Utari Widyaningsih	PDI Perjuangan	2.949
Moh Nur Hasan	Hanura	5.947
Frida Iriani	NasDem	3.694
Achmad Lutfy Arifin	PKB	4.007
Achmad Shodikin	Demokrat	3.207
Puji Santoso	Gerindra	5.405

Sumber:

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasannya partai yang mendapatkan suara terbanyak berasal dari partai Hanura dengan calon terpilih Moh. Nur Hasan, perolehan suaranya mencapai 5.947 suara pada dapil II. Kemudian perolehan terbanyak kedua oleh calon petahana yakni

Puji Susanto dari Partai Gerindra sebanyak 5.405. perolehan suara terbanyak selanjutnya adalah calon petahana Achmad Lutfi Arifin dari partai PKB dengan jumlah suara sebanyak 4.007. selanjutnya suara sebanyak 3.694 diperoleh oleh calon petahana perempuan yang berasal dari partai NasDem yakni Frida Iriani. Kemudian Achmad Shodikin mendapatkan suara sebanyak 3.207, beliau berasal dari partai Demokrat. Terakhir, suara sebanyak 2.949 diperoleh calon perempuan baru dari partai PDI Perjuangan yakni Laela Utari Widyaningsih (KPU No. 1035 Tahun 2024).

Persaingan antar partai besar di dapil II semakin kuat, terutama ketika terjadinya perpindahan tokoh lokal dari partai lain ke Hanura menjelang pendaftaran, termasuk dua mantan ketua partai Golkar dan PAN (radarkudus.jawapos.com). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memperebutkan kursi. Kemudian pada 20 februari 2024, perhitungan suara telah menunjukkan angka 71,9% dengan kata lain detail suara masing-masing caleg belum terpublikasi. Namun, terjadi proses litigasi pemilu, diketahui dengan adanya gugatan PHPU yang diajukan oleh partai PPP terkait perolehan suara caleg nomor urut 1 minhatul Maula Thomafi yang memperoleh 3.398 suara akan tetapi tidak mendapatkan kursi (wawancara: laela). Partai-partai besar seperti Hanura, PKB, Gerindra, PDIP, Demokrat, dan Nasdem telah berhasil mendapatkan kursi DPRD dari dapil II. Dengan demikian peluang untuk partai menengah dan figur baru semakin terbuka kuat melalui strattegi penguatan relasi lokal terutama di Lasem dan Pancur.

Tabel 3. 9 Caleg Terpilih dan Perolehan Suara Dapil V Kabupaten Rembang

Caleg terpilih	Partai	Jumlah suara
Widodo	PDI Perjuangan	3.183
Abdul Rouf	PPP	6.829
Abdul Mu'id	PPP	4.454
Joko Suwito	PKB	3.557

Muhammad Kumorohadi	Demokrat	3.673
Rumini	Hanura	5.133

Sumber:

Tabel diatas menunjukkan jumlah perolehan suara di Dapil V Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024. Perolehan suara terbanyak di dapil v dimenangkan oleh Abdul Rouf yang berasal dari PPP yakni sebanyak 6.829. Kemudian perolehan suara terbanyak kedua sebanyak 5.133 dari partai Hanura dan merupakan calon perempuan baru yakni Rumini. kemudian yang ketiga sebanyak 4.454 suara dimenangkan oleh Abdul Muid yang berasal dari PPP. Selanjutnya suara sebanyak 3.673 diperoleh oleh Muhammad Kumorohadi dari partai Demokrat. Perolehan suara sebanyak 3.557 diperoleh oleh Joko Suwito yang merupakan calon petahana dari partai PKB. Terakhir suara sebanyak 3.183 diperoleh oleh Widodo calon petahana yang berasal dari partai PDI Perjuangan (KPU No. 1035 Tahun 2024).

Kontestasi yang terjadi di dapil V pada pemilu 2024 berjalan cukup kompetitif dengan ketersediaan sebanyak 6 kursi DPRD. Persaingan yang terjadi di daerah ini di dominasi oleh partai-partai besar seperti PPP,PKB, PDIP, dimana partai tersebut memiliki basis pemilih yang kuat pada komunitas agraris dan tradisional. Persebaran suara dinilai merata diantara desa-desa dengan karakteristik sosial homogen, yakni mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang menjadikan kampanye berbasis kedekatan personal, jaringan kiai, serta hubungan emosional. Demokrat pada pemilu 2024 memperoleh sura sebanyak 7.185, akan tetapi dengan angka tersebut partai Demokrat belum mampu mengalahkan partai-partai yang telah mengakar di wilayah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan di dapil V masih menggunakan pengaruh politik relasional dan jaringan sosial berbasis komunitas lokal. Berdasarkan hasil Pemilu 2024 menjadikan dapil v cerminan bagaimana kekuatan politik pada tingkat desa dan kecamatan memberikan pengaruh yang cukup besar.

C. PROFIL TOKOH: LAELA UTARI WIDYANINGSIH

Gambar 3. 4 Laela Utari Widyaningsih DPRD Kab. Rembang



Sumber: KPU Kab. Rembang

Laela Utari Widyaningsih atau sering dikenal dengan nama "mba Ela" merupakan salah satu anggota DPRD termuda di Kabupaten Rembang periode 2024-2029. Pada saat usia 26 tahun, Laela telah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di Kabupaten Rembang. Dalam meniti karir Laela mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya yang juga seorang DPRD petahana Kabupaten Rembang Dapil V Sale-Pamotan.

Laela merupakan alumni jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sebagai alumni Hubungan Internasional Laela ingin memfokuskan program kerjanya pada kesejahteraan masyarakat terutama pada masalah penyaluran Program Kerja Harapan (PKH). Selain itu Laela juga berkomitmen untuk mengawasi serta mengevaluasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

1. Latar Sosial dan Modal Politik

Tumbuh besar dalam lingkungan keluarga politisi menjadikan Laela memiliki posisi strategis dalam kancah politik lokal di Kabupaten Rembang. Mempunyai ayah seorang senior DPRD Kabupaten Rembang dan pengurus inti DPC PDI Perjuangan Rembang menjadikan Laela lebih mudah dalam melakukan kampanye. Laela didukung penuh oleh ayahnya bahkan keluarga besar hingga komunitas remaja dan jaringan partai PDI-Perjuangan. Selanjutnya Laela juga memiliki akses penuh pada usaha turun temurun keluarganya, yakni usaha koperasi simpan pinjam yang telah tersebar di seluruh Kabupaten Rembang hingga luar Kabupaten. Dengan usaha tersebut memberikan kemudahan bagi Laela dalam membentuk tim-tim kemenangan kampanye. Dimana keloyalan pegawai serta konsumen dimanfaatkan Laela untuk menjaring pemilih.

Sebagai anak dari senior politik, Laela mewarisi jaringan struktural partai serta jejaring sosial di akar rumput. Hal tersebut memudahkan beliau dalam mendapatkan jaringan pemilihnya. Isu kesejahteraan yang diusung Laela menunjukkan gerakan yang sangat signifikan. Penyaluran PKH yang tidak merata menjadi salah satu modal politik yang digadang Laela. Banyak masyarakat yang mengantungkan diri pada Laela karena program kerja yang dijanjikannya.

2. Jejaring Keluarga dan Koneksi Politik

Berangkat dari keluarga politik, menjadikan Laela masuk dalam struktur politik kekerabatan atau sering dikenal dinasti politik. Jejaring yang didapatkan Laela adalah berasal dari ayahnya, Widodo yang merupakan senior DPRD Kabupaten Rembang serta menjadi sekertaris DPC PDI Perjuangan. Widodo dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh karena sudah lama berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian koneksi yang dimiliki juga sangat luas di kalangan tokoh masyarakat, perangkat desa serta pemilih loyal PDI Perjuangan di desa-desa. Laela juga memanfaatkan koneksi politik yang bersumber dari struktur formal dan informal. Pada partai PDI Perjuangan Laela mendapatkan dukungan langsung dari mesin partai politik tingkat DPC Rembang yang dikendalikan oleh ayahnya. Kemudian kader-kader PAC serta ranting juga memiliki peran besar dalam mendistribusikan suara pada saat kampanye.

Dukungan yang diberikan mencakup logistik, jejaring tokoh lokal, serta penguatan figur laela sebagai representasi generasi muda PDI Perjuangan.

Usaha yang dimiliki oleh keluarga Laela juga memberikan kesempatan besar untuk memperluas koneksi politiknya. Usaha koperasi simpan pinjam yang berdiri puluhan tahun menjadikan pegawai-pegawai yang bergabung menjadi loyal. Selain itu masyarakat yang menjadi nasabah juga diberikan kemudahan serta diskon jika akan melakukan pinjaman, dengan begitu masyarakat juga memberikan keloyalannya terhadap Laela.

3. Afiliasi Partai dan Basis Dukungan

Laela merupakan kader muda dari partai PDI Perjuangan yang berhasil memperoleh kursi pada pemilu 2024. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang memiliki basis massa kuat di Kabupaten Rembang, terutama pada wilayah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut Laela mendapatkan dukungan penuh dari partai PDI Perjuangan karena dianggap sebagai regenerasi berikutnya. Kehadiran Laela merupakan angin segar bagi masyarakat, dengan sosoknya yang muda dianggap akan memberikan pembaruan dan lebih melek terhadap teknologi.

Mesin politik PDI Perjuangan sangat aktif menggalang suaranya. Ranting dan PAC pun ikut bermain peran dalam distribusi logistik dan penggalangan dukungan pada masa kampanye. Selain itu keberadaan kepala desa, tokoh masyarakat dan simpatisan partai memberikan dukungan besar terhadap suara yang diperoleh Laela.

Sebagai golongan muda Laela banyak mendapat dukungan dan simpati dari kaum muda maupun perempuan. kedekatannya dengan isu-isu sosial membuatnya mudah diterima sebagai representasi aspirasi perempuan dan masyarakat kelas bawah.

D. PROFIL TOKOH: RUMINI

Gambar 3. 5 Rumini DPRD Kab. Rembang



Sumber: KPU Kab. Rembang

Rumini atau sapaan akrabnya adalah "Mbak Rum" menjadi salah satu politisi perempuan di Kabupaten Rembang yang lolos pada pemilihan legislatif tahun 2024. Beliau menjadi satu-satunya politisi perempuan yang lolos di daerah pemilihan V Kabupaten Rembang. Rumini lahir pada tanggal 5 Agustus 1978 di Rembang. Beliau memiliki suami yang menjabat sebagai Kepala Desa 2 periode berturut-turut yaitu Bapak Ali Suyu'udin, dimana dalam pernikahannya beliau dikaruniai dua orang anak. Rumini dikenal sebagai sosok yang ramah, pekerja keras serta mandiri. Sebelum menjabat sebagai DPRD beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan memiliki toko sembako serta meubel kayu. Kesibukan lain yang beliau geluti adalah sebagai kepala ibu PKK di Desa Sumbermulyo. Dimana sudah banyak sekali kegiatan positif kemasyarakatan yang dilakukan demi keberlangsungan kegiatan PKK.

Rumini telah bergabung dengan Partai Hanura pada tahun 2023 dan langsung memperoleh jabatan menjadi bendahara DPC Partai Hanura. Kemudian Rumini diusung oleh Partai Hanura menjadi caleg di dapil V yakni Kecamatan Sale dan Kecamatan Pamotan. Sebelumnya yang akan diusung oleh partai adalah suaminya, Ali Suyu'udin, namun suaminya menolak karena masih mempunyai tanggung jawab menjadi Kepala Desa dan beberapa tokoh lokal juga kurang setuju. Pada akhirnya

Ali Suyu'udin merekomendasikan istrinya kepada Partai Hanura. Hal ini di konfirmasi langsung oleh Rumini pada wawancara tanggal 22 Februari 2025.

> "Sebelumnya itu yang mau dicalonkan jadi DPRD oleh partai itu bapak, nah karena bapak masih menjadi kades dan masyarakat juga kurang setuju karena peran bapak di desa itu lebih dibutuhkan. Nah, bapak langsung ngomong, gimana kalau istri saya aja yang menggantikan saya nyalon DPRD." **(Rumini, wawancara tanggal 22 Februari 2024)**

Rumini terbilang masih baru dalam belajar politik, namun pada Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang Rumini mendapatkan suara terbanyak kedua dari totl seluruh caleg terpilih di Kabupaten Rembang serta suara terbanyak caleg perempuan. Pencapaian tersebut mampu mengalahkan politisi petahana yang memiliki pengalaman politik lebih banyak. Pencapaian yang diperoleh Rumini tidak terlepas dari sosok suaminya yang sebelumnya sudah berkecimpung lama di dunia politik.

> "Bu Rumini itu politisi baru yang berhasil, karena baru berkecimpung sudah mampu mengalahkan petahana dengan perbandingan jumlah suara yang signifikan. Menurut saya kemenangan beliau sedikit banyak dipengaruhi oleh suaminya yang jadi kades." **(Joko, wawancara tanggal 23 Februari 2024)**

1. Latar Desa, Status Sosial, dan Modal Politik

Desa Sumbermulyo merupakan sebuah desa yang terletak pada bagian barat daya Kecamatan Sale. Sebelah utara desa berbatasan langsung dengan Kecamatan Sedan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonokerto dan Sebelah selatan serta barat berbatasan dengan Desa Tengger. Desa Sumbermulyo dikenal sebagai desa agraris karena memiliki sumber daya alam berupa hutan jati yang melimpah dan menjadi hutan lindung. Selain itu Desa Sumbermulyo memiliki struktur topografi perbukitan. Desa ini mempunyai 2 dukuh utama yaitu Dukuh Ngandang dan Dukuh Mbaraan, yang terdiri dari 2 RW (rukun warga) dan 10 RT (rukun tetangga). Berdasarkan data kependudukan Desa Sumbermulyo memiliki penduduk sebanyak 1.759 jiwa yang tersebar dalam 430 kepala keluarga (kampungkb.bkkbn.go.id).

Mata pencaharian penduduk Desa Sumbermulyo sebagian besar adalah petani, buruh tani, pekerja hutan serta buruh diluar desa. Perlu diketahui juga bahwasannya Desa Sumbermulyo menyimpan sejarah yang menarik yakni terdapat peninggalan kolonial Belanda seperti sumur Genuk, bekas tambang batu bara dan puing-puing pabrik piring di kawasan hutan lindung. Potensi pertanian

yang dimiliki Desa Sumbermulyo adalah berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah serta berbagai tanaman hortikultura yang mendukung ketahanan pangan masyarakat (kampungkb bkkbn).

Desa Sumbermulyo membentuk dan menjalankan berbagai organisasi masyarakat melalui kelembagaan desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna dan Kampung KB. Lembaga-lembaga tersebut menujukan struktur sosial yang rapi dan partisipatif. Kemudian kampung KB juga memberikan layaan keluarga seperti BKB, BKR, BKL dengan memperhatikan kesejahteraan pada balita, remaja, dan lansia. Pada tahun 2025 ini Desa Sumbermulyo termasuk dalam program prioritas penurunan stunting di Kabupaten Rembang, dimana hal tersebut menunjukan adanya konsentrasi program kesehatan, sanitasi dan gizi melalui dana desa dan OPD terkait.

Desa Sumbermulyo memiliki legitimasi kepemimpinan lokal serta partisipasi yang begitu kuat. Dimana Kepala Desa dan perangkatnya memiliki peran yang sentral dalam pembangunan serta pengambilan keputusan. Pada sisi lain pengaruh politik kepala desa cukup besar bahkan pada level pemilihan diluar desa seperti Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan di Bawaslu terkait dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam Pilkada 2024 (radarkudus.jawapos.com). Kasus yang terjadi menunjukan bahwa figur lokal desa memang memiliki pengaruh politik yang cukup signifikan sehingga keberpihakan mereka berdampak besar pada politik. Posisi kepala desa di Sumbermulyo bukan hanya menunjukan posisi administratif saja, namun strategis secara politik. Modal politik tersebut menunjukan pengaruh dinamika kekuasaan lokal yang kuat, selain itu figur-figur desa juga memiliki signifikan terhadap sikap politik masyarakat sekaligus menuntut akuntabilitas serta netralitas yang lebih tinggi dalam konteks demokrasi desa.

2. Peran Suami dan Relasi Kekerabatan Politik

Rumini sebagai istri dari Kepala Desa memiliki modal sosial dan politik yang menjanjikan. Dimana beliau mendapatkan dampak yang kompleks dan strategis berupa dukungan emosional, sosial maupun politik dari peran suaminya. Selain itu ia juga mendapatkan akses terhadap jaringan sosial dan administratif yang luas pada tingkat lokal, termasuk dengan tokoh masyarakat, perangkat desa,

kelompok tani, PKK hingga warga pada tingkat RT/RW. Posisi tersebut mampu memberikan kekuatan elektabilitas karena kepala desa sering dianggap sebagai figur yang dihormati.

Relasi kekerabatan politik menjadi sebuah fenomena yang terjadi ketika hubungan keluarga digunakan sebagai sarana untuk membangun atau mempertahankan kekuasaan politik dalam suatu wilayah. Pada konteks desa, relasi tersebut akan terjadi ketika kepala desa menggunakan pengaruh sosial dan politiknya dalam memberikan dukungan atau membuka jalan bagi anggota keluarganya seperti anak, atau kerabat dekat untuk menduduki jabatan politik lainnya. Dukungan yang diberikan Kepala Desa Sumbermulyo berupa dukungan mobilisasi jaringan sosial desa serta pengaruh terhadap opini publik atau penggunaan infrastruktur sosial yang sudah mapan dalam sistem pemerintahan desa. Relasi kekerabatan politik di desa menjadi lebih kompleks karena ikatan sosial antarwarga lebih kuat dan seringkali ditambah dengan hubungan darah, kekeluargaan dan komunitas keagaaman. Sehingga potensi pengaruh politik keluarga menjadi sangat dominan. Hal ini mencerminkan kekuatan simbolik dan praktis dari jaringan kekuasaan keluarga yang dapat mempekuat posisi politik namun beresiko menurunkan kepercayaan publik jika dianggap sebagai upaya memonopoli kekuasaan dalam lingkup keluarga.

3. Pemetaan Dukungan Lokal dan Modal Sosial

Peta dukungan lokal di Desa Sumbermulyo terbentuk berdasarkan jaringan sosial yang erat dan berbasis kepercayaan antarwarga, loyalitas kekerabatan serta efektifitas pelayanan publik selama masa jabatan kepala desa. Dukungan lokal yang didapatkan oleh Rumini meliputi :

a. Kelompok keluarga besar jaringan kekerabatan, dimana keluarga besar dan jaringan kekerabatan menjadi basis dukungan utama, karena hubungan kekeluargaan sangat memberikan pengaruh terhadap pilihan politik di tingkat desa.
b. Perangkat Desa dan Lembaga Desa, sebagai istri pemegang jabatan kepala desa, Rumini secara tidak langsung memiliki akses hubungan formal dan informal dengan perangkat desa dan lembaga desa. Sehingga ketika Rumini

mencalonkan diri seluruh perangkat desa secara moral terdorong untuk memberikan loyalitasnya dalam memberikan dukungan.

c. Kelompok keagamaan, majelis taklim, tokoh agama, pengurus masjid dan ibu-ibu pengajian. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja sering terjadi kegiatan sosial keagamaan yang dimanfaatkan Rumini untuk membangun jaringan pemilihnya.
d. Petani, buruh tani dan kelompok tani, ketika kepala desa berhasil mengelola kebutuhan pokok para petani seperti irigasi, pupuk atau bantuan alat tani maka akan terjalin hubungan timbal balik yang menunjukkan loyalitasnya. Karena kepercayaan rekam jejak kepemimpinan akan sangat menentukan.
e. Organisasi PKK, sebagai istri kepala desa yang aktif dalam kegiatan PKK serta kegiatan sosial akan menjadikan empatinya sebagai modal kampanye.
f. Jaringan Kepala Desa atau organisasi di luar desa, menjadi seorang kepala desa tentu saja membentuk dirinya untuk ikut aktif dalam kegiatan bersosial baik dalam lingkup desa maupun di luar desa. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam membentuk jaringan tim kampanye luar desa.
g. Jaringan teman, memiliki teman di luar desa dimanfaatkan oleh Rumini dalam menjalankan kampanyenya untuk membentuk struktur tim kampanye di luar desa. Dalam menjalankan perannya Rumini melakukan pembentukan jaringan melalui "*door to door*".

BAB IV
KONTEKS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD REMBANG

Permasalahan mengenai politik dan perempuan di Kabupaten Rembang merupakan paradigma yang belum terselesaikan. Struktur sosial dan budaya patriarki sangat memberikan batasan terhadap peran perempuan dalam politik. Meskipun pada dasarnya terdapat kebijakan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Dalam budaya patriarki terdapat pandangan tradisional yang mengharuskan perempuan tetap berada pada urusan domestik, dan politik menjadi domain bagi laki-laki. Kemudian pada partai politik sendiri, akses yang diberikan kepada perempuan juga masih terbatas, seperti pendanaan terhadap kampanye serta kurangnya pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Selain itu, stigma yang diberikan masyarakat terhadap perempuan menjadi penghalang dalam proses seleksi calon legislatif, dimana perempuan tidak lebih banyak yang memperoleh dukungan dari partai-partai politik yang struktur kepemimpinannya dikuasai oleh laki-laki.

Permasalahan yang masih menjadi bahan pertimbangan adalah mengenai dominasi keluarga dalam politik, yaitu di Kabupaten Rembang sendiri beberapa caleg perempuan berasal dari keluarga politik yang sudah mapan, seperti istri atau anak dari seorang politisi sebelumnya. Terdapat juga pengaruh keluarga terhadap pemilih yakni caleg perempuan mewarisi nama besar keluarga, meskipun mungkin belum memiliki pengalaman atau kapasitas yang memadai. Kandidat perempuan dari keluarga politik memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih, sementara perempuan dengan latar belakang non-politik harus menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh dukungan dan sumber daya.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai analisa temuan di lapangan terkait konteks keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang sendiri merupakan wilayah yang menyediakan 45 kursi DPRD. Dengan banyaknya kursi tersebut perempuan yang berhasil lolos dalam pemilu hanya berjumlah lima orang dan terbagi pada tiga dapil yaitu dapil II, dapil III, dan dapil V. Pasalnya mayoritas dapil di Kabupaten Rembang tidak meloloskan calon perempuan. Analisa tersebut peneliti lakukan setelah adanya temuan di lapangan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi literatur. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisa dengan menggunakan teori gender dari Mansur Fakih

sebagai upaya mendeskripsikan dan menganalisis keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang. Manifestasi gender menurut Mansoer Fakih meliputi, gender dan marginalisasi perempuan, gender dan subordinasi, gender dan steorotip, serta gender dan kekerasan.

A. ANALISIS KETERWAKILAN: DATA DAN REALITAS

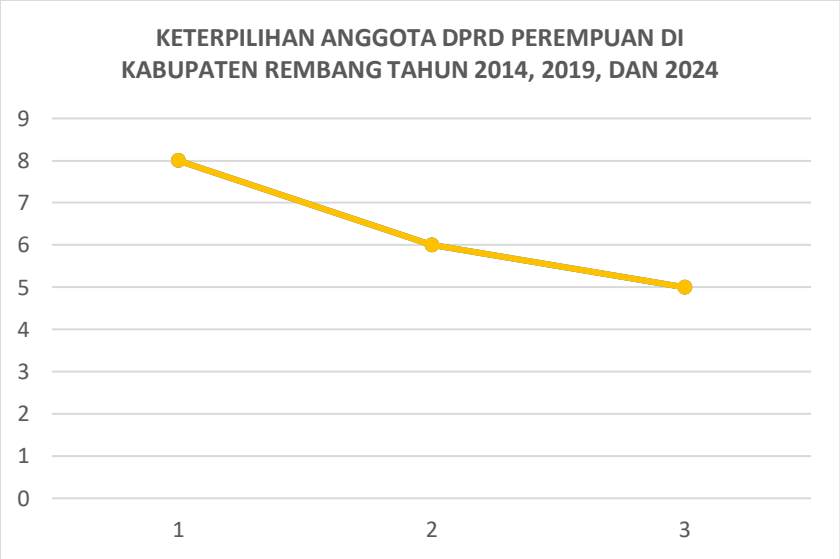
Konteks keterwakilan merujuk pada partisipasi serta kehadiran perempuan pada berbagai bidang pengambilan keputusan, termasuk politik, pemerintahan, ekonomi serta sektor lainnya. Dengan tujuan untuk memastikan peran setara antara perempuan dan laki-laki pada pembuatan kebijakan serta keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks politik keterwakilan tersebut sering dikaitkan dengan kesetaraan gender serta keadilan sosial.

1. Statistik Caleg Perempuan dan Caleg Terpilih

Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rembang merupakan salah satu proses demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat maupun kepala daerah secara langsung. Momentum tersebut bukan hanya sebagai sarana peralihan kekuasaan, namun juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan serta pembangunan daerah. Pelaksanaan pemilu juga menjadi proses dari dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai elemen, seperti partai politik, tokoh masyarakat, kelompok pemilih dan penyelenggara pemilu. Meskipun pemilu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun pada pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi kelompok tertentu, terbatasnya sosialisasi, serta masih kuatnya praktik politik berbasis relasi kekerabatan dan patronase. Kabupaten Rembang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk perdesaan, dimana hal tersebut menjadikan dinamika pemilu di Kabupaten Rembang sering dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, kedekatan komunitas serta struktur sosial. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Rembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang menjadikan pola pikir dan preferensi politik mereka terpengaruhi. Maka dari itu, hubungan antarindividu lebih banyak bersifat personal atau dominan dibanding berfikir secara rasionalitas politik modern. Hal tersebut juga berakibat pada kegiatan konstestasi pemilu di Kabupaten Rembang khususnya Pemilu 2024, dimana para

kandidat yang terpilih mayoritasnya adalah laki-laki, sedangkan kandidat perempuan yang terpilih adalah kandidat dengan modal signifikan.

Gambar baru keterpilihan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Rembang tahun 2014, 2019 dan 2024



Sumber : kpu.go.id

Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran perempuan pada arena politik masih sangat minim dan cenderung mengalami stagnasi. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwasannya terjadi penurunan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Pemilu 2014 terdapat keterwakilan perempuan sebanyak 8 DPRD perempuan, dimana 8 DPRD tersebut berangkat dari partai-partai besar seperti Sulistyo Weti Ariani dari partai PPP, Imroatus Sholichah berangkat dari partai Demokrat, kemudian Sahningsih dari Partai Harapan, Hj. Hikmah Purnamawati dari Partai Demokrat, Sumarsih berangkat dari Partai PDI Perjuangan, Paramita Prapanca A. Dari Partai Harapan, kemudian Frida Iriani dari Partai PDI Perjuangan, dan Ayu Ardiah Mayasari dari Partai Gerindra (Kep. DPRD Kab. Rembang No. 8 Tahun 2014). Sedangkan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6 DPRD perempuan, yaitu Sulistyo Weti Ariani dari Partai PPP, Siti Rizqiyyah Putri dari Partai PPP, Frida Iriani dari Partai Nasdem, Hidayatun Nikmah dari Partai PKB, Sumarsih dari Partai PDI Perjuangan, dan Sahningsih dari Partai PAN. Kemudian pada Pemilu 2024 terjadi penurunan keterwakilan perempuan dari tahun 2014 dan 2019, pemilu 2024 hanya meloloskan 5 politisi perempuan.

"...Terjadi penurunan suara di masyarakat terhadap perempuan, penyebabnya kurang lebih karena janji-janji kampanye yang tidak terlaksana" **(wawancara, Bagus 15 Juni 2025)**

Tabel 4. 1 Jumlah Caleg Perempuan dan Caleg Terpilih Pemilu 2024 Kab. Rembang

Dapil	Jumlah Caleg Perempuan pada Setiap Dapil	Jumlah Caleg Perempuan Terpilih pada Setiap dapil
Dapil I	30 caleg	0
Dapil II	30 caleg	2 caleg
Dapil III	36 caleg	2 caleg
Dapil IV	38 caleg	0
Dapil V	26 caleg	1 caleg
Dapil VI	24 caleg	0
Dapil VII	27 caleg	0

Sumber: Keputusan KPU Kab. Rembang No. 1035 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang memiliki 504 kandidat legislatif yang mendaftarkan diri dalam pertarungan memperebutkan kursi. Dari jumlah tersebut terdapat 211 calon perempuan, rasionya sebesar 40% dari total pendaftar. Dimana pencalonan tersebut ditetapkan pada peraturan perundang-undangan UU No. 8 Tahun 2012, dimana setiap 3 bakal calon laki-laki harus terdapat 1 calon perempuan. Namun, dari sekian banyaknya calon legislatif perempuan, Kabupaten Rembang hanya meloloskan sebanyak 5 politisi, rasionya hanya sebesar 2,4% dari jumlah legislatif perempuan yang mendaftar. Dimana jumlah tersebut sangat jauh dari tahap pencalonan dan menunjukkan tingkat keterpilihan perempuan masih sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan struktural, kultural, dan politik yang terjadi masih sangat kuat. Maka dari itu, keterwakilan perempuan sampai saat ini masih begitu rentan.

"...Angka keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang itu tergolong rendah, masyarakatnya juga masih acuh terhadap calon perempuan dan terkesan bodo amat" **(Laela, wawancara 13 Juni 2024).**

Rasio ketersediaan 45 kursi DPRD di Kabupaten Rembang, tidak menjadikan kuota keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang terpenuhi. Dimana hanya 2,4 % dari jumlah keterwakilan perempuan yang mendaftar, dan sebesar 11% dari ketersediaan kursi di DPRD. Keterwakilan tersebut hanya menempati wilayah tertentu saja, 3 dapil tersebut meliputi, pertama yakni dapil II dengan tersedianya 6 kursi legislatif yang berhasil memperoleh suara sebanyak 4 legislatif laki-laki dan 2 legislatif perempuan. Kemudian dapil III dari 7 kursi legislatif yang memperoleh suara sebanyak 5 legislatif laki-laki dan 2 legislatif perempuan. Sedangkan dapil V dari 6 kursi legislatif yang berhasil lolos berjumlah 5 kursi legislatif laki-laki dan 1 legislatif perempuan.

> "Perempuan yang lolos pada kursi DPRD itu diletakkan pada komisi yang sama, yaitu komisi 4 katanya komisi 4 itu emang tempat buat perempuan" **(Wawancara, Laela 13 Juni 2025).**
>
> "Perempuan di tempatkan di komisi IV supaya komunikasinya mudah, komisi IV kan cocok dengan perempuan" **(Wawancara, Widodo 30 Juni 2025)**

Penempatan perempuan pada satu komisi saja menunjukkan bahwasannya terdapat pelabelan peran perempuan dalam ruang legislatif, dimana mereka diarahkan untuk isu-isu yang dianggap feminim atau berhubungan dengan sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun bidang-bidang tersebut penting serta relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat, namun penempatannya memberikan batas ruang gerak politisi perempuan untuk terlibat dalam isu strategis lainnya seperti ekonomi, infrastruktur maupun anggaran. Selain itu, penempatan perempuan pada ruang yang sama juga mengakibatkan keterbatasan potensi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang beragam. Walaupun perempuan sudah diberikan tempat untuk memenuhi kuota keterwakilan namun tetap saja ruang gerak yang dimiliki perempuan masih terbatas.

2. Dapil dengan Representasi Rendah, Apa Penyebabnya?

Daerah pemilihan atau dapil yang memiliki representasi rendah merupakan cerminan dari ketimpangan dalam sistem politik yang belum sepenuhnya inklusif. Dimana jumlah kursi yang tersedia di DPRD tidak sebanding dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Akhirnya setiap kursi yang tersedia mewakili pemilih dengan jumlah yang banyak, dengan begitu setiap suara pemilih memiliki pengaruh yang kecil dalam menentukan kandidat terpilih. Penyebab umum dari dapil dengan representasi rendah adalah masalah pada pemetaan wilayah, distribusi penduduk yang tidak merata yang akan menimbulkan praktik kecurangan dalam pemilu.

Perlunya perempuan terlibat dalam politik adalah karena terdapat kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami dengan baik oleh perempuan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan tersebut ketika terdapat seorang perempuan yang hamil serta melahirkan. Selain itu, akibat perbedaan dari organ reproduksi perempuan juga mengalami menstruasi, sebuah hal yang tidak dialami oleh perempuan sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Isu tersebut hanya dapat diangkat oleh perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka memahami bahwa isu tersebut penting.

Isu-isu mengenai perempuan yang jarang dibahas di parlemen seharusnya membuat masyarakat sadar akan kepentingan keterwakilan perempuan pada parlemen. Nilai-nilai patriarki yang mengakar mengakibatkan berbagai kondisi perempuan terletak pada posisi rentan. Praktik pernikahan dini masih marak terjadi, kasus kekerasan seksual yang berakhir tanpa mediasi yang menjadikan perempuan pada posisi yang disalahkan. Kompleksnya permasalahan perempuan di legislatif menuntut akan pentingnya peran perempuan untuk menduduki kursi DPRD.

> "..Perempuan di DPRD masih belum terlihat, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki power yang besar" **(wawancara, Faisol 13 Juni 2025)**

Tabel 4. 2 Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024

Dapil	Kecamatan	Laki	Perempuan	jumlah
Dapil I	Kecamatan Rembang	33.564	35.348	68.192
Dapil II	Kecamatan Lasem	18.906	19.249	38.155
	Kecamatan Pancur	11.809	11.864	23.673
Dapil III	Kecamatan Kragan	25.084	25.120	50.204
	Kecamatan Sluke	11.344	11.637	22.981
Dapil IV	Kecamatan Sarang	23.625	23.109	46.734
	Kecamatan Sedan	21.651	20.904	42.555
Dapil V	Kecamatan Sale	15.314	15.326	30.640
	Kecamatan Pamotan	19.296	19.057	38.353
Dapil VI	Kecamatan Bulu	10.978	11.123	22.101
	Kecamatan Gunem	9.835	9.907	19.742
	Kecamatan Sulang	15.351	15.358	30.889
Dapil VII	Kecamatan Sumber	14.333	14.987	29.320
	Kecamatan Kaliori	16.410	16.981	30.889
Jumlah		247.454	250.171	497.625

Sumber: Instagram *KPU Kab. Rembang*

Melihat tabel diatas bahwasannya ketimpangan jumlah antara pemilih perempuan dan laki-laki kurang lebih sebanyak 2.717 tidak menjadikan keterwakilan perempuan terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender dalam politik lokal masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dimana keterwakilan perempuan masih tergolong rendah, meskipun pada dasarnya terdapat kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Alasannya karena banyak partai politik hanya sekedar memenuhi syarat kuota tanpa benar-benar mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam pencalonan. Pada berbagai kasus, perempuan diberikan daerah pemilihan yang tidak strategis, sehingga membuat peluang mereka untuk terpilih menjadi terbatas. Hal tersebut menjadi lebih buruk ketika terdapat dominasi laki-laki pada tingkat pengambilan keputusan dalam partai politik. Permasalahan berikutnya adalah adanya tantangan berupa norma sosial serta budaya yang memberikan hambatan kepada perempuan. Dimana norma sosial yang ada di masyarakat sering membuat perempuan terpinggirkan dalam dunia politik (Wahyuningsih, 2018).

> "Ketika saya nyalon banyak masyarakat yang memberikan judgement kepada saya, mereka bilang perempuan ko nyalon politik, udah umur segitu seharusnya nikah aja ga usah aneh-aneh buat nyalon" **(wawancara, Laela 13 Juni 2025).**

Dalam banyak kasus perempuan juga sering dipandang sebelah mata dan dihadapkan pada diskriminasi dunia politik bahkan ketika perempuan memiliki kualifikasi yang cukup dalam memimpin. Diskriminasi tersebut diperburuk dengan pandangan steorotip bahwa perempuan lebih cocok berada dalam rumah daripada di luar rumah. Dunia politik dianggap begitu mengerikan dan masyarakat memandang bahwa perempuan bukanlah entitas yang layak untuk berada pada ranah politik. Bahkan ketika terdapat perempuan yang mencalonkan diri, masyarakat jarang yang memberikan dukungannya. Apalagi ketika perempuan tersebut tidak memiliki basis dukungan politik yang kuat, maka akan lebih susah untuk tergabung dalam ranah politik.

B. HAMBATAN STRUKTURAL DAN BUDAYA LOKAL

Sistem politik di Kabupaten Rembang secara umum memiliki kecenderungan bersifat maskulin, dimana dominasi laki-laki dalam berbagai lembaga politik serta pengambilan keputusan sangat besar. Regulasi yang seharusnya mendukung perempuan seperti kebijakan kuota keterwakilan sering kali tidak diterapkan secara optimal.

1. Budaya Patriarkis dan Peran Tradisional Perempuan

Secara realitas budaya patriarki masih sangat mendarah daging. Perempuan sering mendapatkan label bahwasannya mereka adalah kelompok yang lemah. Perempuan juga dianggap sebagai entitas yang berada pada kelas dua dan harus berada dirumah serta tidak seharusnya berkecimpung dalam dunia politik yang penuh akan kekuasaan. Sifat kepemimpinan perempuan dinilai sebelah mata. Masyarakat berpendapat bahwa patron pembentuk perempuan hanya mengutamakan perasaan sehingga jauh dari rasionalitas. Sebenarnya perempuan lebih dari mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun pada kenyataannya menunjukkan hal lain. Dimana perempuan tertolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin memberikan peran lebih. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu saja didasari oleh stigma di masyarakat yang menilai bahwa perempuan cukup menjadi makmum saja.

> "Perempuan yang nyalon politik sebenarnya kurang pas, kalau perempuan nyalon maka dia akan jarang dirumah. Nah yang ngurus suami sama anak-anak siapa, kasihan kalau nanti ngga ada yang ngurus, apalagi kalau anak masih kecil." **(wawancara, masyarakat 22 Februari 2025)**

Masyarakat Kabupaten Rembang mayoritasnya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, laki-laki dianggap lebih layak menjadi pemimpin sedangkan perempuan dianggap sebagai pendukung. Perspektif tersebut didukung oleh steorotip gender yang menempatkan perempuan dalam posisi sub ordinat dan menghambat mereka untuk menccapai posisi strategi di politik. selain itu penafsiran agama yang bias terhadap gender juga mendukung peminggiran perempuan, sehingga peran mereka dalam mengambil keputusan menjadi terbatas. Sedikitnya jumlah pemilih dari kalangan perempuan dapat menjadi

salah satu faktor pembatas perempuan untuk mendapatkan suara dalam proses pemilihan, terutama konteks politik perdesaan. Ketika keterwakilan perempuan memiliki basis rendah dalam pemilihan, maka tantangan ganda akan diterima oleh perempuan seperti besarnya dominasi laki-laki dan dukungan massa yang tidak cukup dari sesama perempuan

.

2. Kurangnya Akses Modal, Logistik, dan Relasi Politik

Hambatan terbesar yang dihadapi perempuan dalam mencalonkan diri adalah sedikitnya akses terhadap modal, baik modal finansial maupun modal jaringan politik. Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang yang kompetitif mengharuskan kandidat legislatif memiliki sumber daya yang besar, dimulai dari biaya administrasi pencalonan, logistik kampanye hingga strategi komunikasi politik. Sebagian perempuan tidak memiliki akses besar, dikarenakan proses perjuangannya berawal dari komunitas akar rumput atau tingkat desa sehingga sumber daya ekonomi tidak cukup memadai untuk membiayai proses kampanye. Pada sisi lain, dominasi elite laki-laki dalam struktur partai politik menjadikan perempuan cukup sulit mendapat dukungan struktural, seperti posisi strategis dalam mendaftar atau backingan politik dari tokoh partai. Banyak juga kasus yang menunjukkan bahwa perempuan hanya menjadi pelengkap untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan tanpa mendapatkan dukungan dalam kontestasi pemenangan.

Sedikitnya akses yang dimiliki perempuan terhadap modal sosial-politik semakin memberikan ruang terbatas untuk tampil dalam ranah publik. Dimana jaringan pengusaha, tokoh agama, atau relasi elite lokal sangat susah digapai oleh perempuan karena adanya norma patriarki yang menganggap politik bukanlah domain bagi perempuan. Akibatnya perempuan masih tertinggal dalam kompetisi pencalonan karena kendala terhadap akses modal.

> "..Cukup sulit apabila perempuan mencalonkan diri tidak didasari dengan adanya modal sosial, politik, maupun materi. Bisa kita lihat bahwa masyarakat akan memilih calon yang memberikan uang saku lebih banyak, selain itu juga masyarakat akan milih calon yang dikenal" **(Wawancara, Ali 20 Februari 2025).**

Tidak sedikit perempuan yang memiliki kapasitas serta integritas untuk maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah, namun kualitas tersebut tidak dibarengi dengan sumber daya ekonomi yang memadai. Apalagi bisa kita lihat bahwa untuk bisa maju dalam ranah politik membutuhkan modal ekonomi yang besar. Selain itu, banyak partai politik cenderung mengutamakan kandidat-kandidat dengan modal serta jaringan yang kuat, padahal modal tersebut banyaknya dimiliki oleh laki-laki. Sehingga perempuan kembali tersingkir dalam proses pencalonan internal. Kuota keterwakilan 30% pada umumnya hanyalah implementasi yang bersifat simbolis tanpa adaya dukungan pembinaan, pelatihan maupun pendanaan yang cukup bagi perempuan.

C. EVALUASI KEBIJAKAN AFIRMASI DAN KUOTA 30%

Ketimpangan representasi gender yang besar pada anggota DPRD bertentangan dengan konsep perwakilan, dimana tanpa adanya kehadiran perempuan maka kepentingan perempuan menjadi terabaikan serta tidak mendapatkan perhatian yang proporsional pada ranah legislatif (Phillips, 1995). Sehingga, representasi bukan hanya terbatas pada penyampaian ide namun siapa yang hadir untuk mewakili.

1. Apakah Kuota Efektif?

Kebijakan Afirmasi tertuang dalam peraturan perundang-undangan kepemiluan. Sejak pelaksanaan Pileg secara langsung pada 2004, telah dituangkan upaya tersebut dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 bahwa "Setiap Partai Politik Peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30%". Namun wacana tersebut juga menimbulkan kontroversi bagi perempuan. Dimana terdapat sebagian kaum perempuan yang menolak karena kuota 30% membatasi peran perempuan, karena jika dilihat berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian lagi menyambut dengan langkah maju dan melakukan pergerakan perekrutan perempuan serta menganggap bahwa kuota tersebut merupakan titik awal perjuangan perempuan di bidang politik.

Kuota 30% perempuan merupakan salah satu kebijakan afirmatif yang diupayakan untuk menciptakan representasi politik yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk membuka ruang partisipasi perempuan dalam ranah politik formal, khususnya dalam struktur legislatif dan eksekutif. Namun, kehadiran perempuan secara kuantitatif tidak secara otomatis menciptakan *gender ownership*, yakni kepemilikan dan pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan politik. Tanpa adanya penguatan dari segi kapasitas individu, akses terhadap sumber daya politik, serta ruang untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, kuota ini berisiko menjadi sekadar simbol representasi formal. *Gender ownership* yang sejati hanya bisa terwujud jika perempuan tidak hanya sekadar "masuk" ke dalam politik, tetapi juga mampu mengendalikan, mempengaruhi, dan bahkan mentransformasi sistem politik itu sendiri agar lebih adil secara gender. Hal ini menuntut adanya perubahan tidak hanya pada level personal, tetapi juga pada struktur dan budaya politik yang masih didominasi oleh sistem patriarkal.

> "...Menurut saya kuota keterwakilan itu sangat efektif apabila benar-benar diterapkan, soalnya masing-masing kelompok khususnya perempuan juga memiliki kepentingan sendiri, nah kalau keterwakilan perempuan masih terbatas otomatis suara perempuan juga menjadi teredam." **(wawancara, Laela 13 Juni 2025).**

Peraturan KPU mengenai keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang berhasil meningkatkan partisipasi di masyarakat. Aturannya tercantum pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dimana undang-undang tersebut mewajibkan partai politik untuk mencalonkan legislatif perempuan sebesar 30% pada setiap dapil. Selain itu, KPU juga mempertahankan regulasi turunan yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang adanya sanksi kepada partai politik yang tidak mencalonkan 30 % caleg perempuan pada setiap dapil, dengan begitu peraturan KPU bersifat memaksa partai untuk menempatkan pencalonan caleg perempuan pada posisi strategis.

2. Kepatuhan Partai Politik terhadap Kebijakan Kuota

Kepatuhan partai politik dalam menerapkan kuota 30% di Kabupaten Rembang merupakan sebuah proses panjang. Dimana kuota tersebut berfungsi

dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, terkhusus pada lembaga legislatif yang membentuk kebijakan, anggaran serta legislasi. Partai-partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan kuota keterwakilan 30%. Bahkan dari jumlah 18 partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang, persentase keterwakilannya telah mencapai 40%. Namun partai politik belum mampu memenuhi kuota 30% di parlemen. Kepatuhan tersebut di dasari pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, mengenai pengadaan sanksi bagi partai politik yang tidak mencalonkan caleg perempuan sebesar 30% pada setiap dapil.

Namun pemenuhan kuota tersebut hanya sebatas formalitas. Alasannya adalah masih banyak partai yang belum menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung calon perempuan, contohnya pada penempatan nomor urut strategis yang mempengaruhi peluang terpilih. Karena masyarakat cenderung lebih memilih calon dengan nomor urutan paling atas daripada bawah (Prihatini, 2019). Kebijakan kuota keterwakilan bagi perempuan tidak hanya mencakup pada pencalonan namun juga berlanjut pada kepengurusan partai politik. Dimana partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi dan penerapan setiap tiga bakal calon setidaknya terdapat satu perempuan. Namun, banyak partai politik yang merasa kesulitan untuk memenuhi ketentuan ini, dan jumlah perempuan yang terpilih tidak mencerminkan kuota yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan afirmasi yang dilakukan pemerintah telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, namun terdapat hambatan struktural serta patriarki di masyarakat. Padahal keterlibatan perempuan dalam politik tidak terletak pada pemenuhan kuota saja, lebih lanjut lagi yakni mengenai harapan akan kemampuan mereka dalam menyuarakan kepentingan serta hak-hak perempuan pada tingkat kebijakan. Banyaknya perempuan yang tergabung dalam politik diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

> “Sebenarnya saya itu ga ada niat untuk nyalon sama sekali, tapi di daerah saya kuota pencalonan masih kosong akhirnya saya di dorong bapak buat ngisi kuota itu, bisa dilihat kalo saya dapat urutan di nomor 4. Saya dapetin suara segitu udah alhamdulilah banget, soalnya suara yang ada itu harus dibagi-bagi, kayak di Kecamatan Pancur itu suaranya bukan milik saya

tapi milik calon lain, kalau saya suaranya mencakup Kecamatan Lasem aja." **(wawancara Laela 13 Juni 2025)**

Tabel 4. 3 Keterwakilan Perempuan pada Setiap Partai Politik

NO	Partai Politik Pengusung	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V	Dapil VI	Dapil VII	Persentase
1.	PKB	2	3	3	4	2	2	2	40 %
2.	Gerindra	2	2	3	3	2	2	3	37,7 %
3.	PDIP	3	3	4	3	2	2	2	42 %
4.	Golkar	2	3	3	4	2	2	3	43 %
5.	Nasdem	3	5	2	2	3	2	2	42 %
6.	Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gelora	3	1	1	1	1	2	1	45 %
8.	PKS	2	2	1	1	1	2	3	41 %
9.	PKN	1	0	0	0	0	0	0	33 %
10.	Hanura	1	2	3	2	2	1	1	40%
11	Garda Republik Indonesia	0	0	0	1	0	0	0	33 %
12.	PAN	3	2	4	5	2	2	3	46 %
13.	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Demokrat	2	2	3	3	2	2	2	40 %
15.	Solidaritas Indonesia	2	1	1	1	1	1	1	34,7 %
16.	Perindo	2	2	3	5	4	2	2	47 %
17.	PPP	2	2	3	3	2	2	2	37,7 %
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	25 %
Jumlah		30	30	36	38	26	24	27	0

Sumber: http//KPU.co.id

Keterwakilan perempuan di partai politik pada Pemilu 2024 cenderung menunjukkan peningkatan. Mayoritas partai sudah memenuhi kuota keterwakilan 30%. Bahkan terdapat juga partai yang angka keterwakilannya diatas 40% yakni Partai Perindo, PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, Gelora, dan PKB. Kemudian partai yang keterwakilannya diatas 30% meliputi Partai PKN, Partai PPP, Partai Gerindra, Partai Garda, dan Partai Solidaritas. Sedangkan partai yang angka keterwakilannya di bawah 30% adalah Partai Ummat.

D. POLITIK LOKAL DAN PREFERENSI PEMILIH

Proses demokrasi lokal yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Dimana mayoritas elite lokal melakukan polarisasi pendukungnya dalam menentukan pilihan seseorang calon. Sehingga memunculkan perilaku yang tidak murni karena terdapat imbalan tertentu yang ditawarkan.

1. Persepsi terhadap Caleg Perempuan di Basis Konservatif

Tindakan sosial merupakan proses dimana terjadi keterlibatan aktor dalam pengambilan-pengambilan keputusaan subjektif mengenai sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. Pengertian lain dari tindakan sosial adalah bahwa tindakan yang memiliki makna subjektif dan menjadi bagian dari aktor pelakunyay atas dasar tinfakan sosial tradisional, tindakan sosial rasional, tindakan sosial bermotif tertentu. Harapannya adalah memperoleh tindakan yang di dasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai, seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingka laku manusia dalam kehidupan.

Tindakan dan perilaku politik setiap individu banyak ditentukan oleh orientasi umum yang secara jelas menjadi pencerminan budaya politik. Dimana segala sesuatu yang menjadi perilaku seorang aktor politik menjadi tolak ukur bagaimana individu dalam bergaul. Pencerminan preferensi perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh situasi temporer, namun mempunyai pola orientasi secara umum yang nampak jelas sebagai pencerminan budaya politik. Dengan kata lain bahwa preferensi pemilih tumbuh berdasarkan tingkat kesadaran yang mendalam mengenai sistem politik.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari kata ideal. Dimana terdapat ketimpangan yang berasal dari persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan. Penyebabnya adalah masyarakat memiliki batasan pandangan yang mencerminkan preferensi perilaku pemilih karena latar belakang yang dimiliki oleh calon kandidat perempuan. Selain itu, faktor budaya dan agama juga mempengaruhi persepsi pemilih terhadap caleg perempuan.

> "Menurut saya perempuan nyalon di politik itu ga cocok, soalnya politik itu kejam banget apalagi perempuan sering berfikirnya pake perasaan" **(wawancara, masyarakat 14 Juni 2025)**

> "..Sebenarnya perempuan yang mencalonkan diri itu tidak sesuai dengan aturan agama, dalam agama kan pemimpin harus laki-laki. Kalau di isi perempuan nanti tugasnya di rumah bagaimana?" **(wawancara, masyarakat 14 Juni 2025)**

Kemudian faktor pendidikan dan informasi masyarakat sangat berdampak bagi persepsi yang diberikan masyarakat. Pengalaman serta rekam jejak dimana calon pemimpin perempuan yang memiliki rekam jejak bagus akan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat. Rekomendasi tokoh politik atau dukungan, dimana dinasti politik berperan besar terhadap persepsi masyarakat di tingkat lokal.

2. Klientalisme dan Transaksionalisme dalam Pilihan Publik

Klientelisme dan transaksionalisme merupakan konsep yang sering dikaitkan dengan politik terutama pada konteks demokrasi. Dimana Klientelisme merujuk pada hubungan timbal balik antara kandidat maupun partai politik dengan pemilih, artinya dukungan politik ditukar dengan janji-janji bantuan, materi bahkan akses terhadap sumber daya tertentu. Sedangkan transaksionalisme diartikan pada logika pertukaran yang sifatnya kalkulatif, dengan maksud bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan nilai manfaat yang diterima bukan karena ideologi maupun program yang dijanjikan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi menjadi praktik pertukaran jangka pendek antar warga dengan calon wakilnya.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang ikut menggelar pemilihan umum legislatif tahun 2024. Pada Pemilu 2024 klientelisme tumbuh

subur di tengah ketimpangan ekonomi serta lemahnya institusi representasi. Masyarakat hanya menilai bahwa suara politiknya merupakan aset yang dapat ditukar dan bukan untuk menuntut akuntabilitas. Dimana caleg-caleg dalam pemilu melakukan pertukaran dengan menggunakan sembako, bansos, hingga janji proyek lokal demi menarik dukungan pemilih khususnya masyarakat dengan penghasilan yang rendah karena rawan akan mitigasi kebutuhan sehari-hari.

> "Saya milih bu Rumini karna beliau janji mau memperbaiki akses jalan disini sama mau ngasih tontonan gratis entah dangdut atau kethoprak, makanya warga sini banyak yang milih beliau." **(wawancara masyarakat 22 Februari 2025)**

> "Saya dari awal udah ngomong sama tim kampanye yang nyatat nama saya, kalau saya bakal pilih calon yang ngasih uang bensin lebih besar. Berhubung bu Rumini ngasih yang paling besar saya pilih bu Rumini." **(wawancara, masyarakat 22 Februari 2025)**

Dalam praktiknya caleg tersebut dibantu oleh relasi jaringan informal seperti tokoh desa, keluarga maupun relasi patron-klien. Sementara itu, transaksionalisme politik terlihat jelas melalui praktik politik uang, serangan fajar serta pendanaan kampanye menggunakan dana pribadi atau publik. Petahana dapat memanfaatkan melalui anggaran pemerintah seperti pembagian bansos saat kampanye, sebagai sarana membangun patronase. Pemilih lebih cenderung memikirkann kebutuhan jangka pendek daripada program jangka panjang sehingga menganggu kualitas demokrasi. Berdasarkan hal diatas pemilih memilih anggota DPRD di Kabupaten Rembang memiliki niat untuk mendapatkan imbalan berupa uang, maupun janji politik. Maka dari itu, pesta demokrasi di Indonesia tergolong mahal karena tidak ada yang gratis termasuk suara pemilih.

BAB V

STRATEGI POLITIK LAELA UTARI WIDYANINGSIH DAN RUMINI

Pada bab ini akan membahas mengenai strategi politik yang dilakukan oleh Laela Utari Widyaningsih dan Rumini untuk memenangkan kursi DPRD di Kabupaten Rembang pada pemilu 2024. Bab ini akan penulis fokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memperoleh suara pemilih di masyarakat sebagai politisi perempuan baru. Selain itu, peneliti juga akan memfokuskan pada bagaimana kedua politisi apakah memanfaatkan isu perempuan atau memanfaatkan politik keluarga dalam kampanye. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung bersama beberapa narasumber yang berkaitan. Selain itu peneliti juga memanfaatkan data-data pendukung yang relevan dengan topik penelitian. kemudian peneliti melakukan analisa menggunakan teori-teori penelitian sehingga menjadi penulisan yang kompeherensif.

A. STRATEGI LAELA UTARI WIDYANINGSIH

Sebagai upaya untuk memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024, Laela memanfaatkan beberapa strategi yang relevan di masyarakat perdesaan. Strategi tersebut berupa mobilisasi jaringan keluarga, tokoh politik, dan partai PDI Perjuangan, kemudian memanfaatkan isu kesejahteraan masyarakat dalam narasi kampanye serta komunikasi melalui bisnis keluarga.

1. Mobilisasi Jaringan Keluarga, Tokoh, dan Partai PDI Perjuangan

Mobilisasi merupakan proses yang melibatkan masyarakat maupun kelompok untuk merekrut partisipan sebagai upaya mendapatkan dukungan khusus dalam suatu pemilihan. Mobilisasi politik banyak dilakukan oleh kandidat legislatif guna meraih simpati serta dukungan calon pemilih dalam pemilu dengan cara mengajak keluarga untuk ikut berperan dalam proses kampanye. Mobilisasi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Dimana perbedaannya terletak pada mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh jaringan keluarga, tokoh politik, partai maupun aktor politik. mobilisasi langsung dilakukan dengan memberikan arahan kepada pemilih untuk memberikan tindakan politik sesuai yang diinginkan partai atau aktor politik melewati sosialisasi langsung maupun kampanye terbuka. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dilakukan dengan mempengaruhi cara

pandang pemilih sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih seperti mempengaruhi pemilih melalui tokoh politik dan keluarga.

Widodo menjadi DPRD di Kabupaten Rembang tentu saja sudah banyak memberikan kontribusinya kepada masyarakat, dimana hal tersebut akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada keluarga Widodo. Maka dari itu, mobilisasi langsung melalui jaringan tokoh politik dan keluarga yang dilakukan Laela akan menjadi sangat efektif untuk meyakinkan pemilih dalam memilihnya. Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial antar dua aktor, yaitu individu dan partai. Konsepnya yakni pertama proses kepentingan dimana Laela dan jaringan keluarga ayahnya yang juga menjadi tokoh politik akan saling menguntungkan, Laela akan mudah mendapatkan dukungan dalam pemilu sedangkan keluarga Widodo akan melanggengkan kekuasaannya dalam politik. Kemudian kedua melalui pembentukan komunitas, dimana Partai PDI Perjuangan sebelumnya sudah membentuk komunitas di tingkat PAC maupun ranting, maka Laela menjadi lebih mudah untuk memobilisasi massa lewat komunitas partai yang berasal dari akar rumput tersebut.

Widodo menjadi senior politik di Kabupaten Rembang tentu saja memiliki banyak relasi di tingkat politik lokal. Dalam upaya suksesi anaknya, Laela ditemani ayahnya melakukan mobilisasi bersama beberapa tokoh politik di tingkat lokal.

> "Selain mendapatkan privillage menjadi anak seorang DPRD petahana, saya juga melakukan kunjungan langsung di beberapa desa Kecamatan Lasem untuk meminta bantuan dalam suksesi pemilihan menjadi DPRD." **(wawancara, Laela 13 Juni 2025)**

Merawat ketokohan dan memobilisasi basis-basis pendukung yang dimiliki merupakan sebuah keputusan strategis yang paling cocok bagi aktor atau elit politik dalam mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak. Pencapaian yang diperoleh Laela tidak terlepas dari dukungan ayahnya yang seorang tokoh politik dan beberapa tokoh politik lokal serta komunitas partai yang sebelumnya telah beliau mintai tolong. Peran yang diberikan ayahnya

sangat mempengaruhi kemulusan Laela untuk masuk dan berusaha menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Laela, dalam melakukan mobilisasinya menggunakan metode ketok pintu atau “door to door”. Dimana Laela sebagai kader baru turun langsung ke masyarakat untuk membangun kedekatan personal dan emosional.selain itu ayahnya berpendapat bahwasannya metode tersebut secara tidak langsung menghormati atau istilah jawanya ngajeni orang yang lebih tua apalagi akan menunaikan hajat.

> “Mau jadi wakil rakyat itu ya harus kenal rakyatnya. Kalau mau kenal rakyat, ya harus bertamu uluk salam. Kita membutuhkan bantuan mereka kita ya harus ngajeni mereka, saya biasakan Laela untuk bersikap sopan kepada siapapun.” **(wawancara: Widodo, 15 Juni 2025)**

PDI-P juga menerapkan strategi mobilisasi yang kuat berbasis jaringan keluarga serta struktur partai hingga akar rumput. Prinsip unik yang diterapkan oleh PDI Perjuangan adalah “satu keluarga satu partai” dimana seluruh anggota keluarga diberikan arahan untuk menjadi struktur partai dengan membentuk basis dukungan yang kuat dan berkesinambungan. Selain memobilisasi perangkat desa atau birokrasi. PDI-P juga melakukan pendekatan berbasis masyarakat dengan mengandalkan relasi langsung tanpa perantara birokrat. Hal tersebut menunjukan bahwa PDIP memadukan pendekatan tradisional dan modern dalam membangun basis elektoral yang kuat serta merakyat.

PDI-P sebagai partai dengan basis besar di Kabupaten Rembang memiliki mesin politik yang terbangun dari usia muda. PDI-P membangun komunitas kepartaian dari tingkat ranting, kecamatan hingga kabupaten, sehingga dalam memobilisasi suara PDI-P memiliki akses yang luas. Selain itu, PDI-P juga banyak memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sapi ataupun kambing untuk diternak masyarakat, kemudian kendaraan roda tiga untuk membantu masyarakat dalam mengangkut barang, hingga memberikan bantuan untuk membangun masjid maupun mushola.

2. Isu Kesejahteraan Masyarakat dalam Narasi Kampanye

Isu mengenai kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di setiap wilayah. Kekayaan alam yang melimpah serta kemerdekaan yang telah lama diperoleh ternyata tidak memberikan jaminan bahwa persoalan kemiskinan akan

terselesaikan. Angka kemiskinan yang terjadi masih begitu rentan, apalagi jika terjadi perubahan-perubahan mengenai ekonomi. kemiskinan bukan hanya sesuatu hal yang berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, namun mencakup akses pada layanan pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan dan infrastruktur dasar. Dimana hal tersebut melahirkan ketimpangan sosial yang sukar diatasi tanpa intervensi seluruh pihak. Pada berbagai daerah kemiskinan menjadi akar persoalan lainnya, seperti pengangguran, putus sekolah, gizi buruk, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Maka dibutuhkan penangan isu kemiskinan dengan pendekatan yang intensif serta partisipatif.

Isu kemiskinan sering dimanfaatkan para kandidat dalam prosesi kampanye. Karena kondisi tersebut adalah salah satu permasalahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga memiliki daya tarik yang lebih kuat dalam politik. Para kandidat sering menjadikan kemiskinan menjadi program utama dalam visi misi mereka, seperti janji pemberian bantuan sosial, peningkatan lapangan pekerjaan, dan program pemberdayaan ekonomi. Isu ini dimanfaatkan untuk membangun citra keperdulian kandidat, serta mampu memahami rakyat kecil,

> "...Masyarakat sini banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial PKH, ada juga yang belum punya BPJS nah saya ngasih janji ke mereka, bahwasannya bakal aku bantu secara administrasinya, nah yang BPJS itu karna kepala desa tidak memberikan penyuluhan untuk membuat BPJS jadi banyak masyarakat yang belum punya BPJS." **(wawancara Laela 13 Juni 2025)**

Laela sebagai salah satu kandidat yang mengangkat isu tersebut dengan memberikan janji-janji politik mengenai pembagian PKH secara merata. Selain itu masyarakat juga banyak yang tidak bisa membuat BPJS. Sehingga Laela memberikan bantuan secara administratif kepada masyarakat.

3. Komunikasi Politik melalui Bisnis Keluarga

Komunikasi politik merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan politisi untuk meraih tujuan tertentu. Menurut Miriam budiarjo komunikasi politik adalah gabungan antara sosialisasi dan budaya politik, komunikasi yang baik menjadikan sosialisasi politik berjalan baik sehingga budaya yang dilangsungkan akan berjalan semestinya. Kemudian menutu Harsono Suwardi, komunikasi politik merupakan penyampaian pesan berupa lambang-lambang maupun dalam

bentuk kata-kata tertulis atau terucap dengan tujuan mempengaruhi kedudukan seseorang dalam struktur kekuasaan tertentu. Pesan tersebut dapat berupa informasi mengenai kebijakan, visi politik, atau narasi politik tertentu. Komunikasi ini dapat menggunakan berbagai media atau saluran secara langsung. Upaya ini untuk meyakinkan pemilih, memobilisasi dukungan politik, serta memenangkan kepercayaan dari masyarakat.

Bisnis keluarga merupakan salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan strategi politik. Dimana bisnis keluarga tentu saja memiliki jaringan yang cukup luas. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi politik, membangun komunikasi politik melalui bisnis keluarga akan memberikan citra dan mempengaruhi politik pada tingkat lokal. Bisnis keluarga tersebut selain menjadi sumber ekonomi namun juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kedekatan bersama masyarakat. Interaksi langsung yang terjadi dapat mewujudkan hubungan yang lebih personal antara politisi dengan pegawai serta membentuk hubungan loyalitas dengan konsumen. Bisnis keluarga mayoritas mempunyai jaringan sosial yang kuat serta akar budaya di tingkat lokal, sehingga mampu menjadi penyambung dalam menyampaikan pesan-pesan politik secara informal.

Dalam praktiknya bisnis keluarga yang dimiliki oleh Laela berfungsi sebagai aktifitas ekonomi serta ruang interaksi sosial dan tempat penyampaian pesan politik. Anggota keluarga ataupun masyarakat yang terlibat dalam bisnis tersebut dapat memanfaatkan relasi dengan konsumen, mitra usaha serta komunitas sekitar untuk menyampaikan gagasan politik, membentuk persepsi positif tentang tokoh keluarga yang terjun ke dunia politik serta memperluas jejaring dukungan.

> “Selain saya minta tolong ke beberapa tokoh politik, saya juga memberi arahan ke pegawai bapak untuk ikut membantu pada saat pencalonan, nah pegawai bapak itu minta bantuan juga ke nasabah-nasabahnya, jadinya bisa merata semua gitu.” **(wawancara Laela 13 Juni 2025)**

B. STRATEGI RUMINI

Sebelum Pemilu 2024 terlaksana, Rumini sebagai kandidat perempuan baru telah melakukan strategi politik yang berfungsi untuk menarik masyarakat untuk

memilihnya. Strategi yang dilakukan Rumini berupa, modal sosial sebagai istri kepala desa, penguatan jaringan lokal: RT, PKK, dan kader posyandu, Representasi perempuan produktif dan rakyat kecil, serta politik relasional dan pendekatan emosional ke konstituen.

1. Modal Sosial sebagai Istri Kepala Desa

Modal sosial merupakan suatu sumberdaya yang dimiliki baik secara aktual maupun potensial, dimana hal tersebut berkaitan dengan hubungan kelembagaan tetap berasaskan saling kenal dan saling mengakui serta saling menguntungkan (Bourdieu, 1986). Lebih rincinya, bahwa modal sosial terletak pada level individu sehingga sumber daya yang dimiliki tergantung pada keinginan orang tersebut dalam melakukan mobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok maupun luar kelompok. Kedua, hubungan yang dibangun oleh seseorang tergantung pada kualitas hubungan, dimana jaringannya tidak bersifat alami akan tetapi dibangun melalui strategi investasi yang berorientasi pada kelembagaan kelompok sehingga dapat meraih keuntungan. Selanjutnya, modal sosial yang dibangun dari sebuah kelompok juga bergantung pada kualitas maupun kuantitas jaringan hubungan yang diciptakan.

Modal sosial merupakan sebuah dukungan yang diberikan kepada kandidat karena ketokohan sehingga akan membangkitkan kepercayaan di masyarakat serta membentuk interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang akan mendukung. Modal sosial yang dimiliki Rumini sebagai kandidat berupa, istri dari seorang Kepala Desa.

> "..Saya waktu istri mau nyalon sudah minta tolong ke beberapa tokoh desa dan saudara-saudara untuk membantu kampanye bu Rumini, nah karena mereka tahu kinerja saya dan bu Rumini akhirnya mereka menunjukkan loyalitasnya terhadap saya." **(wawancara, Ali 20 Februari 2025)**

Menjadi istri kepala desa, Rumini memiliki posisi yang strategis dalam struktur sosial masyarakat desa. Hal tersebut dapat menjadi modal sosial berupa jaringan relasi, kepercayaan masyarakat serta akses terhadap informasi dan sumber daya lokal yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Rumini seringkali aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti PKK, arisan, pengajian atau program desa yang menjadikan sosoknya dikenal luas dan dihormati. Dengan keberadaan suami Rumini yang menjadi Kepala Desa dapat memperkuat posisi

tersebut karena dapat memberikan akses informal terhadap kebijakan desa, jaringan antar elite lokal. Selain itu, Rumini juga memiliki saudara-saudara yang berada di dapil V, sehingga dalam pencalonannya Rumini juga meminta bantuan lewat suaminya, Bapak Ali.

2. Penguatan Jaringan Lokal: RT, PKK, dan Kader Posyandu (Mesin Politik Bagaimana)

Memiliki relasi sosial dengan sejumlah tokoh masyarat dan masyarakat luas menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan bagi seorang kandidat. Melalui berbagai kegiatan bersama komunitas sosial seperti arisan, kelompok tani, karang taruna, Kader Posyandu, RT, PKK dan organisasi lainnya dapat memperkuat jaringan kekuatan pada politik. Membangun relasi sosial melalui pengadaan kegiatan mampu menumbuhkan kedekatan personal dan kepercayaan publik terhadap kandidat yang diyakini agar dapat mempresentasikan kepentingannya sebagai delegator penyampai aspirasi.

Rumini menjadi istri kepala desa memanfaatkan penguatan jaringan lokal melalui RT, RW, PKK dan kader posyandu. Dimana penguatan tersebut memberikan peran yang strategis dalam mobilisasi politik dan sosialisasi program calon legislatif dan partai. RT sebagai unit pemerintahan terdekat menjadi ujung tombak penyebaran informasi politik serta pengorganisasian dukungan di tingkat lingkungan. Sementara PKK dan kader posyandu memiliki jaringan luas dalam membangun kepercayaan tinggi di masyarakat, dimana sering dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan kelompok pemilih terutama perempuan dan keluarga muda.

> "...Saya sebelumnya sudah cukup aktif di tingkat desa, bahkan sering ikut kegiatan PKK, saya sebagai ketua juga sering ngajak ibu-ibu untuk kegiatan. Kegiatannya yang paling sering itu arisan, karena setiap minggu dikocok, kedekatan kita terbangun juga dari situ." **(wawancara, Rumini 22 Februari 2025).**

Melalui keterlibatannya dalam kegiatan produktif desa, bukan hanya menunjukkan eksistensinya sebagai pendamping kepala desa, namun juga memperkokoh pengaruhnya terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilakukan, seperti arisan, pelatihan ketrampilan, pemberdayaan perempuan, hingga kesehatan berbasis masyarakat dijadikan Rumini ajang memperluas jejaring dan

membangun opini positif tentang dirinya. Keberedaannya di tengah masyarakat dalam kapasitas informal membuat komunikasi yang berjalan menjadi efektif, karena dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan keakraban. Strategi tersebut memungkinkan Rumini juga memperoleh dukungan dari lapisan masyarakat bawah secara langsung, dimana dukungan masyarakat menjadi basis penting dalam kontestasi lokal.

> "..istri saya dengan masyarakat itu dekat, bahkan di periode sebelumnya istri saya juga banyak berperan aktif di masyarakat, makanya waktu saya meminta tolong untuk membentuk tim kampanye mereka langsung mau." **(wawancara, Ali 20 Februari 2025)**

3. Representasi Perempuan Produktif dan Rakyat Kecil

Representasi dapat diartikan sebagai keterwakilan, dimana representasi tersebut akan terwujud dalam upaya menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama. Menurut Hanna F Pitkin (1976), terdapat dua kategori dalam memahami representasi, pertama stand for (berdiri sendiri), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena terdapat pihak yang terbebani tanggung jawab. Kedua, act for (beraksi menggantikan), terbangunnya relasi karena terdapat pihak yang memberikan tanggung jawab. Representasi act for terbagi menjadi representasi formal dan representasi substansif. Dimana representasi formal merupakan representasi yang diwakili oleh perwakilan politik yang berlangsung dalam lembaga. Sedangkan representasi substantif adalah model representasi yang mewakili, seperti representator membawa ide yang akan direpresentasikan dalam area kebijakan publik. Representasi ini menunjukkan sebuah ide yang memiliki tujuan bersama sehingga kepentingan dari segala pihak akan tercapai. Pemanfaatan representasi ini dalam kampanye dapat meningkatkan kepercayaan di masyarakat, karena kepentingan yang mereka inginkan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Rumini juga memanfaatkan representasi substansif ketika menjadi istri kepala desa. Representasi tersebut terbentuk melalui pemberian ruang gerak bebas kepada perempuan produktif dan rakyat kecil. Beliau paham bahwasannya perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga serta komunitas, sehingga pemberdayaan yang dilakukannya bukan hanya berdampak secara ekonomi

namun secara sosial dan politik. Rumini mengajak perempuan untuk lebih mandiri serta aktif melalui kegiatan seperti pelatihan ketrampilan, dukungan usaha mikro serta membentuk kelompok usaha bersama. Kegiatan yang dilakukan Rumini bukan hanya berdampak pada kekuatan perempuan dalam suatu keluarga, namun juga dapat membangun jaringan sosial yang erat serta loyal terhadap dirinya.

> "..Saya terbantu sekali dengan adanya pelatihan UMKM, bantuan UMKM, soalnya waktu pandemi kemarin usaha yang saya punya benar-benar merosot." **(wawancara, masyarakat 20 Februari 2024)**

Selain memberdayakan perempuan melalui berbagai pelatihan, Rumini juga melakukan pemberdayaan yang di prakarsai suaminya. Pemberdayaan yang dilakukan membidik kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah, seperti petani, buruh tani, buruh harian, serta pedagang kecil. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan berbagai program inisiatif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pembukaan akses terhadap program bantuan pemerintah.

> "..Masyarakat Sumbermulyo kan banyak yang dapat PKH, Bansos dan bantuan lainnya, nah saya memberikan akses kemudahan kepada mereka untuk mengambil PKH di tempat saya, soalnya masyarakat masihs sedikit gaptek." **(wawancara, Rumini 22 Februari 2024)**

4. Politik Relasional dan Pendekatan Emosional ke Konstituen

Sebagai suksesi dalam memperoleh kekuasaan penting untuk membangun komunikasi politik terhadap konstituen supaya terjadi hubungan yang kuat serta bermakna. Selain itu penting juga untuk memiliki kontrol terhadap opini publik untuk mencapai kemenangan. Kemudian membangun komunikasi politik sebagai upaya pendekatan emosional dapat menjadikan cara berpikir yang sama. Sehingga kepercayaan di masyarakat akan terjalin kuat. Kandidat juga diharap mampu memahami kebutuhan konstituen dengan melakukan dialog serta aspirasi pemilih guna mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya memberikan pelayanan berupa bantuan maupun solusi masalah yang dihadapi serta memberikan kesempatan untuk konstituen berpartisipasi dalam kegiatan

politik. Hal diatas dimanfaatkan oleh Rumini dalam melakukan pendekatan ke masyarakat.

Politik relasional merupakan pendekatan dalam praktik politik yang memberikan penekanan terhadap hubungan interpersonal, kedekatan sosial, dan kepercayaan antara aktor politik dan konstituen. Kekuatan politik tidak hanya dibentuk melalui program formal maupun janji kampanye, melainkan melalui hubungan yang bersifat personal, berkelanjutan serta emosional. Pendekatan ini sangat efektif digunakan dalam lingkup masyarakat perdesaan, karena mereka sangat menjunjung nilai kekeluargaan, kekerabatan, dan ikattan sosial tradisional. Seperti halnya yang dilakukan Rumini pada saat kampanye.

> "Bu Rumini itu orangnya ramah sekali, suka senyum tidak sombong, apalagi suaminya pak Ali, beliau kalau melihat warga itu langsung manggil dan diajak ngobrol, jadi kita merasa dekat dengan beliau" **(wawancara masyarakat 22 Februari 2025)**

> "..Sebenarnya saya sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, jadi kalau sewaktu-waktu saya membutuhkan bantuan mereka akan siap. Di sini jiwa kekeluargaannya masih cukup kental." **(wawancara, Ali 20 Februari 2025**.

Poitik relasional memberikan penekanan penting terhadap pembangunan jaringan kepercayaan yang dilakukan pada interaksi sehari-hari. Seringnya Rumini dan suaminya mengikuti kegiatan harian seperti arisan, gotong royong, hajatan, pengajian serta kegiatan lainnya menjadikan kedekatan emosional terbangun.

C. ANALISIS PERBANDINGAN STRATEGI

Strategi kemenangan yang dilakukan oleh Laela dan Rumini menjadi signifikan di tingkat lokal.

1. Peran Politik Keluarga dalam Kemenangan

Politik keluarga atau dinasti merupakan salah satu strategi dalam melibatkan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Tindakan tersebut berupa adanya suatu keluarga yang memperluas serta mempertahankan kekuasaannya ketika pendiri dinasti telah berakhir masa

jabatannya. Munculnya politik keluarga ditingkat lokal ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan. Pada dasarnya seorang politisi akan mengupayakan kekuasaan yang dimiliki agar tetap kokoh dengan cara melanggengkannya melalui orang-orang terdekat. Politisi akan membesarkan nama keluarganya apabila memiliki kesempatan serta mengandalkan jaringan keluarga.

Politik keluarga telah menunjukkan implikasinya terhadap peningkatan pragmatisme politik dengan mendorong keluarga atau kerabat menjadi pejabat publik. Dimana hal tersebut menghalangi partisipasi masyarakat karena status sosial serta hak mereka jauh dengan kandidat yang memiliki kekuatan politik keluarga. Dinamika yang terjadi semakin menggerogoti makna demokrasi yang sebenarnya. Akhirnya, jaringan politik yang dibangun oleh politik dinasti semakin menguat dan akan menjadikan rekrutmen politik terhambat.

Politik keluarga merupakan jaringan kekerabatan yang menjadi sumber daya politik inti untuk mempertahankan dan melebarkan kuasanya, dimana kerabat dekat adalah pendukung politik yang paling diandalkan. Hal tersebut bisa kita lihat di Kabupaten Rembang dimana kandidat politik akan memperoleh suara tertinggi di desa asal dan daerah sekitar dikarenakan terdapat ikatan keluarga dengan kandidat politik. Kemenangan Laela dan Rumini pada kontestasi Pemilu 2024 menunjukkan adanya politik dinasti di dapil masing-masing.

> "Saya jadi DPRD itu dibantu sama bapak, beliau yang mengarahkan gerak saya kedepan, selain itu saya dan bapak juga minta bantuan kerabat dekat di masing-masing desa" **(wawancara Rumini, 22 Februari 2025)**

> "Menjadi salah satu tokoh DPRD itu sebuah hal yang masih mustahil menurut saya, soalnya waktu pencalonan itu saya berangkat yang paling akhir, tapi saya banyak dibantu bapak waktu kampanye sama sowan ke beberapa kerabat, nah saking hecticnya di dapil II bapak sampai lupa mengurus dapilnya sendiri" **(wawancara Laela 13 Juni 2025)**

Latar belakang politik keluarga sangat memberikan peran yang besar terhadap pencalonan kandidat dalam memberikan dukungan (Perludem, 2018). Alasannya karena telah memiliki pengalaman sebagai legislator untuk membekali kandidat dengan pemahaman mendalam mengenai proses politik serta tata kelola pemerintahan. Peran politik keluarga sering kali menjadi faktor strategi dalam menentukan kemenangan pemilu maupun perebutan kursi

kekuasaan. Dimana politik keluarga menciptakan jaringan kekuasaan yang kuat karena di dukung oleh modal sosial, ekonomi, dan simbolik yang sudah tertanam di masyarakat. Nama keluarga besar terutama yang telah terjun dalam pemerintahan maupun politik secara tidak langsung memberikan keuntungan elektoral karena dianggap sudah kenal dan dipercaya publik. Selain itu, jaringan keluarga juga dapat memberikan dukungan melalui pendanaan kampanye, akses media, hingga mobilisasi masa.

Tabel Daftar Anggota Legislatif Terpilih yang Memiliki Ikatan Keluarga dengan senior tokoh politik lokal di Kabupaten Rembang.

Nama	**Dapil**	**Hubungan keluarga**
Laela Utari Widyaningsih	Dapil II	Anak dari senior DPRD Kabupaten Rembang
Ni'ma Diana	Dapil III	Istri dari senior DPRD Kabupaten Rembang dan adik ipar salah satu tokoh agama terkemuka di Kabupaten Rembang, Gus Baha
Rumini	Dapil V	Istri dari Kepala Desa 2 periode, Ali Suyu'udin

Kasus terpilihnya kandidat perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang menjadi sorotan. Dimana dari ke-lima pemenang kursi parlemen, terdapat tiga pemenang kontestasi memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh politik di Kabupaten Rembang. Tiga pemenangnya adalah Laela Utari Widyaningsih, anak dari seorang senior DPRD di Kabupaten Rembang

Widodo, Rumini istri Kepala Desa 2 periode Ali Suyu'udin, dan Ni'ma Diana istri dari mantan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2014-2019 Zaimul Umam serta adik ipar dari tokoh agama terkemuka Gus Baha. Perempuan yang terpilih di Kabupaten Rembang tersebut memiliki latar belakang keluarga yang populer, meskipun pada dasarnya mereka tidak terlalu mengakui secara terbuka, namun kekuatan serta pengaruh suami atau ayah mereka sangat berguna bagi strategi kampanye yang dilakukan.

> "...Pak widodo itu orangnya baik sekali dan melek kepada rakyat, jadi saya percaya kalau anaknya juga ngga kalah hebat" (**wawancara, Masyarakat dapil II 13 Juni 2025).**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Rembang, dapat kita simpulkan bahwasannya beberapa kandidat terpilih memenangkan suara karena memiliki pengaruh suami maupun orangtua mereka yang sebelumnya sudah memiliki basis memadai, keluarga dekat mereka sudah pasti akan memberikan dukungan karena faktor kepercayaan tersebut. Keberhasilan Laela menembus struktur formal DPRD tidak sepenuhnya menunjukkan kemandirian politik berbasis gender. Namun strategi adaptif perempuan dalam memasuki ruang maskulin melalui relasi personal dan simbolik. Begitu juga kasus akan keberhasilan Rumini mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Rembang yang memanfaatkan jaringan kekuasaan suaminya sebagai Kepala Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya perempuan yang memiliki jaringan kekerabatan terhadap tokoh politik cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan di masyarakat daripada perempuan yang baru memulai (Bani, 2016). Merujuk pada studi Aspinal serta Berenschoot (2019), bahwa modern ini konteks demokrasi di Indonesia didominasi oleh relasi patronase dan strategi klientelisme pada kontestasi pemilu di tingkat lokal. Aspek kekerabatan politik yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan "egois familisme", yaitu berhubungan dengan dinasti politik, keluarga politik maupun klan politik yang kuat di akar lokal. Sementara klientelisme merujuk bagaimana transaksi material serta mobilisasi dukungan kandidat terpilih dengan masyarakat. Dengan latar belakang kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan maka demokrasi menjadi sangat mahal dan

susah bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk bisa terpilih menjadi anggota parlemen.

2. Signifikasi Gender Identity dalam Menarik Pemilih

Modern ini kegiatan politik semakin memberikan perhatian terhadap representasi dan inklusivitas. Kehadiran kandidat perempuan maupun sosok dengan identitas gender menjadi sebuah perubahan, keberagaman, serta keadilan sosial yang menarik simpati dari kaum minoritas. Dalam kegiatan kampanye isu identitas gender kerap kali hadir untuk memberikan spirit kepada perempuan dalam bersaing secara publik bersama laki-laki. Dengan harapan bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan termasuk hak-hak perempuan dalam kebijakan publik. Selain itu juga untuk menarik perhatian perempuan terhadap keadilan serta meminimalisir sikap patriarki dalam dimensi publik. Karena bagaimanapun perempuan serta laki-laki memiliki peran keseimbangan dalam mencapai sesuatu hal yang lebih tinggi.

Tantangan yang diterima perempuan di masyarakat sangatlah besar. Hal tersebut menjadi lebih parah ketika terjadi rendahnya literasi politik serta kesetaraan gender di kalangan masyarakat, dimana banyak perempuan belum memiliki kepentingan serta keberpihakan terhadap calon perempuan. Akhirnya keterlibatan perempuan dalam politik hanya dianggap simbolis tanpa dukungan yang memadai. Kemudian masyarakat perdesaan yang masih patriarki menyebabkan preferensi politik di dominasi oleh kepala keluarga laki-laki, sehingga akan mempengaruhi pilihan politik keluarga lainnya

> "Perempuan mau jadi politikus di Rembang itu ga mudah, apalagi kalau melihat basis perdesaan. Perempuan akan dianggap bayang-bayang dari laki-laki. Bahkan jika kandidat memanfaatkan isu gender untuk menarik pemilih, itu tidak akan memberikan pengaruh besar karena masyarakat lebih tertarik akan isu kemiskinan" **(wawancara, masyarakat 1 juni 2025)**

Pemanfaatan isu gender dalam menarik pemilih bukanlah sebuah langkah konkrit. Masyarakat Kabupaten Rembang terkhusus dapil II dan Dapil V lebih tertarik mengenai isu kemiskinan. Alasannya karena mereka lebih mementingkan urusan perut dibanding kepentingan publik. Selain itu, budaya dan politik lokal memberikan hambatan yang sangat kuat. Masyarakat masih cukup bersikap

patriarkal, dimana gender menjadi sebuah hambatan elektoral. Maka dari itu pemanfaatan isu gender seharusnya dibarengi dengan interaksi erat yang di lakukan publik, isu kampanye serta strategi politik yang dijalankan.

3. Efektivitas Modal Sosial vs Modal Finansial

Menurut Robert D. Putnam bahwasannya modal sosial merupakan hubungan yang terjadi antara individu atau jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang timbul di antara mereka. Dengan pengertian tersebut munculah tiga elemen modal sosial yakni, kepercayaan, norma serta jaringan sosial yang mendorong kolaborasi dan kerjasama demi mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Modal sosial diibaratkan sebagai kepercayaan, semakin tinggi kepercayaan pada sebuah komunitas maka akan semakin tinggi terjalin kerjasama. Kepercayaan tersebut tumbuh melalui jaringan yang mengikat atau adanya norma timbal balik. Jaringan sosial terdiri atas jaringan formal dan informal yang berasal dari keanggotaan sebuah organisasi yang kemudian membentuk hubungan simpatik. Contohnya, jarigan kekerabatan, profesi, bisnis, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, birokrasi dan lain sebagainya.

Sedangkan modal finansial ialah sumber daya material berupa uang, investasi yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitas, usaha, atau suatu proyek. Adanya modal finansial akan memberikan kemudahan kandidat untuk melakukan pendanaan terhadap kampanye. Modal finansial berperan sebagai tenaga penggerak serta pelumas dalam menjalankan mesin politik (Pantouw, 2012). Sebagai contoh bahwasannya dalam kampanye membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembuatan poster, spanduk, iklan, serta kegiatan transaksionalisme maupun klientelisme. Dalam mengukur sebuah modal ekonomi terdapat indikator yang dimiliki, yakni dukungan dana kepada calon dan kemampuan finansial calon itu sendiri (Pantouw, 2012).

Modal sosial dan modal finansial merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam dunia politik. Modal sosial seperti jaringan keluarga, relasi komunitas serta reputasi sosial menjadikan kandidat perempuan memiliki kepercayaan, mendapatkan dukungan emosional serta menggerakkan massa

secara organik. Di sisi lain modal finansial memiliki peran dalam membiayai proses kampanye, membeli ruang iklan, logistik dan mengakses media. Kandidat dengan dukungan sosial kuat namun tanpa memiliki modal finansial akan sulit menjangkau pemilih luas. Sementara itu kandidat yang memiliki modal finansial kuat namun minim akan modal sosial seringkali mengalami kegagalan membangun kedekatan dengan konstituen. Maka dari itu efektifitas keduanya bersifat saling melengkapi dan seringkali dimanfaatkan secara bersamaan untuk menciptakan kemenangan elektoral yang solid.

Laela dan Rumini dalam pencalonanya memiliki modal sosial berupa latar belakang keluarga yang sebelumnya sudah terjun dalam dunia politik. Ayah Laela dan suami dari Rumini memiliki peran besar dalam membangun mobilitas politik. Dimana dengan relasi yang mereka miliki memberikan kemudahan serta tempat strategis untuk Laela dan Rumini dalam memperoleh suara kemenangan. Sementara modal financial yang dimiliki oleh mereka juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksional dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat tergerak untuk memilih politisi perempuan di tingkat lokal.

D. REFLEKSI TEORITIS

1. Korelasi antara Temuan Lapangan dengan Teori Gender

Kegiatan kontestasi pemilu 2024 telah sedikit menunjukkan perubahan. Keterwakilan perempuan telah mengalami peningkatan walau hanya pada tahap pencalonan. Meskipun begitu keterwakilan pada Pemilu 2024 menunjukan rasio sebesar 40% pada tahap pencalonan. Kuota tersebut sebanyak 211 calon perempuan yang dicalonkan partai politik. Namun, ironisnya keterwakilan tersebut berhenti pada tahap pencalonan saja. Dimana dari sekian banyak calon perempuan yang lolos menjadi DPRD hanya berjumlah lima politisi. Lima politisi itu, tersebar di tiga dapil saja rasionya sebesar 11% dari jumlah total sebanyak 45 kursi DPRD Kabupaten Rembang.

Konsep kesetaraan gender yang diatur dalam undang-undang mengenai kuota keterwakilan implementasinya masih menjadi sebuah cita-cita. Gugurnya calon politisi perempuan pada dasarnya banyak disebabkan oleh kaumnya sendiri. Alasannya mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa perempuan

bukanlah entitas yang cocok untuk duduk pada kursi kekuasaan. Masyarakat juga lebih percaya terhadap calon laki-laki daripada perempuan, karena perempuan dianggap memiliki tugas domestik yang tidak tergantikan.

Modern ini pembahasan mengenai kesetaraan gender memang sudah bukan hal asing lagi. Namun bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan pembahasan mengenai kesetaraan gender terkesan tidak penting. Karena mereka lebih memiliki ketertarikan terhadap persoalan yang dianggap mendesak, seperti kemiskinan, pengangguran, serta akses terhadap layanan dasar. Selain itu, isu gender juga sering dipandang sebagai hal yang tidak relevan bagi kehidupan sehari-hari. Padahal ketimpangan tersebut justru memberikan kontribusi terhadap kemiskinan itu sendiri, misalnya perempuan yang tidak memiliki akses setara dalam mengejar pendidikan.

Temuan lapangan dalam penelitian menjelaskan bahwa manifestasi ketidakadilan gender di Kabupaten Rembang meliputi:

Gender dan marginalisasi, dimana sumbernya berasal dari kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan menjadikan keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang tidak mengalami peningkatan. Mayoritas masyarakat yang berpedoman pada tafsir agama "pemimpin adalah laki-laki" berfikiran bahwa perempuan tidak cocok masuk dalam ranah pemerintahan.

Gender dan subordinasi, menganggap bahwa perempuan memiliki sisi emosional yang tinggi menjadikan perempuan pada posisi tidak penting. Mayoritas masyarakat juga menganggap bahwa cara berfikir perempuan hanya dibataskan pada perasaan saja, dimana perempuan tidak akan mampu mengambil keputusan yang sifatnya publik. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa tugas domestik rumah tangga itu milik perempuan, sedangkan politik adalah domain bagi laki-laki.

Gender dan stereotip, pelabelan terhadap kelompok tertentu. Masyarakat menganggap bahwa perempuan memiliki tugas umum untuk melayani suami dan tempat seharusnya hanya berada di dapur. Dimana pemikiran tersebut menjadikan perempuan keterbatasan dalam mengakses pendidikan.

Gender dan kekerasan, serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Bentuknya seperti kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan mengenai pelecehan seksual.

Gender dan beban kerja, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, sehingga tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga. Karena pekerjaan domestik dikerjakan dalam waktu lama dan dianggap lebih rendah dari pada pekerjaan laki-laki. Dimana pekerjaan perempuan dinilai tidak produktif.

Teori gender menunjukkan rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang politik terkhusus di perdesaan disebabkan oleh ketidakadilan gender yang menguat pada akar lokal. Teori gender lebih memperhatikan adanya hambatan struktural yang bersifat sistemik, seperti minimnya akses perempuan terhadap pendidikan politik, rendahnya representasi dalam kelembagaan desa, serta keterbatasan peluang dalam menempati posisi strategis pada pengambilan keputusan. Selain itu, norma-norma tradisional masyarakat seperti norma patriarki masih berakar kuat di masyarakat, akhirnya keterwakilan perempuan menjadi terbatas. Masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak layak serta tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik, alasannya adalah perempuan perannya hanya pada ranah domestik. Secara hukum keterwakilan perempuan dalam politik sudah diatur sedemikian rupa, namun dalam praktiknya mereka masih mendapatkan diskriminasi sosial serta simbolik yang menghambat partisipasi. Artinya upaya dalam efektifitas keterwakilan perempuan pada lingkup perdesaan tidak cukup dengan membuka akses formal, namun memerlukan perubahan budaya serta struktur sosial yang lebih mendalam.

2. Pembuktian Teori Politik Keluarga dalam Konteks Lokal

Dalam konteks politik lokal, keberadaan politik keluarga menjadi fenomena yang menonjol dan memberikan peran penting dalam proses pencalonan maupun kemenangan kandidat dalam pemilihan umum. Terjadinya politik keluarga didasarkan pada adanya warisan politik untuk keluarganya, seperti istri, anak, atau saudara dari pejabat sebelumnya. Fenomena tersebut banyak berkembang di daerah yang masih kental dengan budaya patron-klien, dimana loyalitas politik masih bergantung pada hubungan personal dan jaringan

sosial ketimbang pada program maupun ideologi. Pada konteks lokal, keluarga politik sering memiliki modal sosial yang kuat di masyarakat, seperti adanya pengaruh tokoh politik serta status ekonomi. Selain itu mereka juga memiliki akses besar terhadap sumber daya kampanye dan birokrasi lokal, sehingga mempermudah proses pencalonan serta konsolidasi dukungan politik. Tidak jarang bahwa masyarakat lebih tertarik pada kandidat yang berasal dari keluarga, karena faktor ketokohan yang tertanam sejak lama.

Keterwakilan perempuan yang masih sedikit dalam forum diskusi maupun politik lokal, serta minimnya pendidikan pemilih yang responsif gender menjadikan banyak isu relevan terabaikan dalam agenda kampanye. Dampaknya adalah kandidat perempuan kesulitan membangun kekuatan politik, bukan karena tidak kompeten, melainkan ekosistem politik yang tidak memberikan ruang dukung cukup, terlebih dari kaum perempuan. Selain itu kompromi perempuan dan laki-laki terkadang dibatasi oleh kebuntuan untuk berfikir yang lokalitas dengan mengedepankan sikap adat istiadat.

Dalam tingkat lokal fenomena mengenai politik kekeluargaan sering muncul. Dimana perkembangannya melalui kekuatan informal yang dimiliki masyarakat untuk menguasai jalannya pemerintahan. Fungsinya adalah untuk regenerasi kaum muda dari keluarga penguasa, dengan begitu transisi kekuasaan akan terletak pada garis linier keturunan yang sama. Hal tersebut merupakan bentuk dari investasi jangka panjang oleh elit lokal dalam menyiapkan penggantinya.

Dalam lanskap politik lokal, relasi kekuasaan berbasis gender memberikan dinamika kompleks antara keterwakilan simbolik dan kontrol substansif atas ruang politik. Nama besar familisme menjamin bahwa politik keluarga mampu eksis terus menerus. Familism tersebut terbentuk karena tiga hal, yakni figur, klientelisme, dan tribalisme, dimana hal tersebut merupakan kunci dari mengurai basis-basis tren familisme kekuasaan dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal Indonesia (Allen, 2012). Ketiga proses tersebut berperan dalam suksesi pemerintahan lokal yang dilakukan melalui *by design* dan *by accident.* Dengan pengertian bahwa *by design* merupakan dinasti politik yang sudah terbentuk sjeak lama dan jejaring

familsm dalam pemerintahan sudah disiapkan sejak awal untuk menempati tempat tertentu. Sedangkan *by accident* adalah suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikan demi menjaga kekuasaan "informal" terhadap penggantinya kelak.

Kasus terpilihnya Laela Utari Widyaningsih menjadi contoh bahwasannya akses perempuan terhadap kekuasaan sering kali dipengaruhi oleh jaringan kekerabatan serta dukungan dari sosok laki-laki. Jaringan kekeluargaan yang dimiliki oleh Laela melalui familism *by design*, dimana dia memiliki hubungan darah langsung dengan ayahnya yang seorang senior DPRD dan sudah disiapkan untuk regenerasi. Dengan begitu Laela mendapatkan jejaring yang lebih besar serta mengikat keluarga lainnya. Tujuan dari familisme adalah untuk menjaga keistimewaan politik yang di dapat. Sedangkan keberhasilan Rumini mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Rembang juga memanfaatkan politik kekeluargaan familsm dengan *by design*, dimana beliau merupakan seorang istri dari kepala desa 2 periode dan sudah disiapkan untuk menjadi anggota DPRD menggantikan pencalonan suaminya.

Keberhasilan yang dicapai Laela dan Rumini dalam menembus struktur formal DPRD tidak sepenuhnya menunjukkan kemandirian politik berbasis gender. Namun strategi adaptif perempuan dalam memasuki ruang maskulin melalui relasi personal dan simbolik. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya perempuan yang memiliki jaringan kekerabatan terhadap tokoh politik cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan di masyarakat daripada perempuan yang baru memulai (Bani, 2016). Pola suksesi dinasti politik menjadikan transisi kekuasaan daerah hanya terjadi dalam satu rumah saja. Terpilihnya Laela Utari Widyaningsih dan Rumini selain berasal dari latar belakang yang dimiliki juga dari *money politik* yang dilakukan oleh mereka melalui tim kemenangan kampanye. Sehingga masyarakat yang menganggap bahwa pemilu merupakan kegiatan transaksional cenderung memilih kandidat dengan "sangu" yang lebih banyak.

BAB VI
KESIMPULAN

Pada bab peneliti akan menyajikan hasil dari temuan lapangan serta refleksi teoritis yang menjawab pertanyaan utama penelitian secara lugas dan terstruktur.

A. KESIMPULAN

1. Jawaban atas pertanyaan: Mengapa Keterwakilan Perempuan Rendah?

Rendahnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang disebabkan oleh partai politik yang hanya sekedar memenuhi syarat kuota tanpa benar-benar mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam pencalonan. Hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen partai dalam mendorong kesetaraan gender. Dimana perempuan tidak diberikan dukungan yang memadai dari struktur partai, pembiayaan, pelatihan politik serta akses terhadap jaringan pemilih. Lebih lanjut lagi, bahwa perempuan dianggap sebagai pelengkap daftar caleg tanpa dipersiapkan untuk bertarung pada kontestasi politik. hal tersebut menunjukkan bahwa, partai berpihak kepada perempuan hanya sebatas simbolik saja dan tidak menjadi bagian dari strategi politik yang menyeluruh.

Kemudian adanya tantangan berupa norma sosial serta budaya yang memberikan hambatan kepada perempuan. Dimana norma sosial yang ada di masyarakat sering membuat perempuan terpinggirkan dalam dunia politik (Wahyuningsih, 2018). Keterwakilan perempuan memiliki hambatan yang cukup signifikan, bukan hanya yang bersifat individual saja namun juga diperngaruhi oleh struktural dan budaya lokal. Dimana secara struktural budaya lokal didominasi oleh kekuasaan laki-laki, sehingga akses terhadap sumber daya politik seperti dana kampanye, jaringan politik, dan media promosi cenderung sulit dan terbatas.

Hambatan struktural dan budaya lokal yang terjadi pada keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang meliputi: pertama adanya budaya patriarki dan peran tradisional perempuan. Budaya patriarki yang mendarah daging menjadikan perempuan berada pada kelas dua dan hanya mengutamakan perasaan. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa perempuan sudah seharusnya berada di rumah untuk mengerjakan pekerjaan domestiknya. Kedua kurangnya modal logistik dan relasi politik. Dimana perempuan yang

mencalonkan diri tidak memiliki akses besar untuk masuk ke dalam ranah politik. alasannya karena sumber daya ekonomi tidak cukup memadai untuk membiayai proses kampanye, di sisi lain partai politik menjadikan perempuan cukup sulit mendapatkan dukungan struktural.

2. Jawaban atas pertanyaan: Strategi Laela Utari Widyaningsih dan Rumini

Strategi politik yang dijalankan oleh Laela dalam pencalonanya sebagai kandidat legislatif memperlihatkan pendakatan terstruktur dan berbasis kekuatan jaringan sosial-politik. salah satu strategi utamanya adalah melakukan mobilisasi jaringan keluarga, tokoh politik dan Partai PDI Perjuangan sebagai roda politiknya. Laela memanfaatkan hubungan kekeluargaan sebagai modal sosial untuk memperoleh dukungan, baik dalam lingkup partai maupun masyarakat. Dukungan yang diberikan tidak hanya memberi pondasi awal, namun juga membantu untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, dengan membangun komunikasi intensif bersama tokoh-tokoh politik di wilayahnya, seperti mantan pejabat, kepala desa, pemuka masyarakat akan memberikan pengaruh besar terhadap konstituen. Kehadiran mereka merupakan sebuah dukungan terbuka yang diberikan sebagai penguat citra dan meningkatkan elektabilitas di mata pemilih. Peran partai PDI Perjuangan juga digunakan Laela dalam membangun jaringan internal partai dengan memanfaatkan strukturnya hingga ranting.

Kemudian strategi selanjutnya adalah isu kesejahteraan masyarakat dalam narasi kampanye, Laela menyadari bahwa persoalan ekonomi dan kesejahteraan menjadi perhatian utama masyarakat, terkhusus di wilayah perdesaan yang banyak menghadapi tantangan dalam akses pekerjaan, pendidikan, bantuan sosial, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Strategi ketiga adalah melalui komunikasi bisnis keluarga. Bisnis keluarga bukan hanya sebagai sarana ekonomi namun menjadi upaya untuk memperluas jaringan sosial, memperkuat citra personal serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Usaha yang dibangun menumbuhkan ruang interaksi informal dengan masyarakat sehingga aspirasi yang diberikan akan mengalir secara natural.

Sedangkan strategi politik yang dilakukan oleh Rumini meliputi, pertama modal sosial sebagai istri kepala desa. Status sebagai istri kepala desa menjadi

posisi strategis dalam membangun kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, akses terhadap struktur sosial desa, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok-kelompok perempuan menjadi lebih mudah. Modal sosial tersebut bukan hanya sebagai simbol, namun sarana membangun hubungan dengan masyarakat. Kemudian Rumini juga memanfaatkan jaringan lokal seperti RT, PKK, dan kader posyandu untuk memperoleh dukungan di tingkat lokal. Jaringan ini merupakan struktur sosial yang memberikan pengaruh besat terhadap kedekatan serta komunikasi bersama masyarakat. Sehingga jaringan lokal berbasis komunitas akan menumbuhkan kampanye yang lebih hidup dan daya jangkau menjadi luas.

Ketiga melalui representasi perempuan produktif dan rakyat kecil. Dalam berbagai keadaan Rumini memposisikan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat yang kurang mendapat perhatian. Rumini memberdayakan perempuan dan rakyat kecil sebagai komunikasi politik utama melalui pelatihan ketrampilan, kegiatan wirausaha, bantuan usaha kecil. Keempat politik relasional dan pendekatan emosional ke konstituen. Politik relasional memfokuskan pada hubungan antarpribadi yang berkelanjutan, bukan hanya interaksi menjelang pemilu. Sehingga kedekatan emosional akan terbangun di masyarakat. Dimana hal tersebut menciptakan ikatan yang bersifat personal dan sosial, akhirnya rasa kepercayaan akan muncul di masyarakat.

Tabel Strategi Kemenangan Laela dan Rumini pada pemilu 2024 di Kabupaten Rembang

Politisi Perempuan	Strategi
Laela Utari Widyaningsih	Mobilisasi jaringan keluarga, tokoh politik, dan partai PDI-Perjuangan
	Memanfaatkan isu kesejahteraan masyarakat berupa program PKH
	Komunikasi melalui bisnis keluarga
Rumini	Modal sosial istri Kepala Desa
	Penguatan jaringan lokal: RT, PKK, dan kader posyandu

	Pemberdayaan perempuan aktif dan rakyat kecil
	Politik relasional dan pendekatan ke konstituen

Sumber: penelitian kualitatif penulis

3. Validitas dan Relevansi Teori Gender dan Politik Keluarga

Realita menunjukkan bahwasannya masyarakat belum melek terhadap pemahaman mengenai gender. Sehingga kuota keterwakilan yang dicanangkan oleh pemerintah hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Begitu juga yang terjadi di masyarakat, bahwa konsep mengenai kesetaraan gender dianggap tidak penting, karena masyarakat lebih tertarik pada konsep yang membahas mengenai isu kemiskinan. Masyarakat cenderung melakukan tindakan yang tidak responsif gender.

Selanjutnya kedua politisi yakni, Laela Utari Widyaningsih dan Rumini sepenuhnya telah memanfaatkan politik keluarga dengan model familsm *by accident* dan *by design.* Dimana Laela sudah disiapkan untuk menggantikan ayahnya, sedangkan Rumini mencalonkan diri menjadi DPRD karena dorongan dari suaminya. Dengan begitu demokrasi yang terjadi di tingkat desa seringkali bersifat hubungan personal antar kandidat.

B. KETERBATASAN PENELITIAN DAN AGENDA RISET LANJUTAN

1. Keterbatasan Lokasi dan Waktu

Keterbatasan penelitian ini terletak pada aspek lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi penelitian yang berjudul “Politik dan Perempuan: Strategi Politisi Perempuan Laela Utari Widyaningsih dan Rumini dalam memenangkan kursi DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang” hanya dilakukan pada wilayah tertentu sehingga hasil yang diperoleh belum mampu memperlihatkan karakteristik sosial, politik, dan budaya secara menyeluruh. Sementara itu, keterbatasan waktu menjadikan peneliti tidak dapat menjangkau lebih banyak responden atau melakukan observasi lapangan secara mendalam serta berulang serta mmenghambat proses triangulasi data dan observasi lanjutan. Sehingga dalam kajian yang diperoleh mengenai perubahan opini publik maupun strategi

kampanye kandidat menjadi terbatas. Maka dari itu penelitian ini bersifat deskriptif untuk konteks dan waktu tertentu, serta membutuhkan studi lanjutan dengan cakupan lokasi serta waktu yang lebih luas agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

2. Rekomendasi untuk Riset Kuantitatif atau Komparatif di Masa Depan

Sebagai upaya untuk memperdalam kajian mengenai konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Rembang, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan riset melalui metode kuantitatif. Karena melalui riset ini peneliti dapat mengumpulkan data melalui survei, kuesioner atau data statistik pemilu guna menguji hubungan antar variabel secara statistik agar memberikan pemahaman yang lebih luas, objektif serta terukur terhadap fenomena sosial-politik. Riset tersebut memungkinkan peneliti mengolah data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasikan pola, hubungan antarvariabel, serta menguji hipotesis secara statistik. Sehingga dalam mengukur modal sosial, finansial maupun identitas gender terhadap perilaku pemilih menjadi lebih spesifik dan objektif..

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2003). *Sangkan Para Gender* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, I. (2003). *Sangkan Paran Gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aji, W. (2024, November Jumat, 1). *Tim Hukum Vivit-Umam Laporkan Dugaan Tak Netral Oknum Kades di Sale Rembang*. Retrieved from Radarkudus: https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695264144/tim-hukum-vivit-umam-laporkan-dugaan-tak-netral-oknum-kades-di-sale-rembang?utm_source=chatgpt.com

Ariella A. Yoteni, A. R. (2023). Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Action Research Literature,* Vol. 7 No. 9.

Aristo. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019).

Bani, A. S. (2016). *Ilmu Budaya Dasar dalam Perspektif Baru.* Pustaka Setia.

Bobbi Noptin Anggra, S. (2022). Kinship Politics in the Implementation of Tanjung Pauh Mudik Village Government. *Perspektif*, 1230-1241.

Crawford, R. U. (1993). Sex and Gender (The Troubled Relationship Between Terms and Concepts). *Psychological science*, 122-124.

Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setya, Dwi Dinda S. (2020). Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. *Skripsi*, -.

Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi*, Volume 18 Nomor 2.

Rowa, Drs. Hyronimus, M. (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia.* Jatinangor: Institut Pemerintah dalam Negeri Kementerian dalam Negeri .

Windyastuti, Dwi B. H. (2017). Perempuan Dalam Kontestasi Politik: Representasi Deskriptif Perempuan Pada Pileg 2014dan Pilkada 2015. *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 22 Nomor 1.

Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Insist Press.

Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Insist Press.

Fatmawati, S. M. (2022). Stereotip Partai dan Gender dalam Serangan Kampanye. *Jurnal Sosiologi Indonesia* , Vol. 1, No. 1 Februari .

Umari, Firdha S. I. (2020). Strategi Komunikasi Politik Caleg Perempuan dalam Pileg 2019 di Kota Malang. *Jurnal Komunikasi Nusantara,* Vol. 2 No. 2.

Fizahrin, N. A. (2022). Feminisme dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Ambon. *Jurnal Al Muqaranah*, Vol. 1 Nomor. 1.

Handoko, T. (2009). *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.

Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuandalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2.

Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 138-159.

Usman, Husaini (2009). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.

Kawasati, I. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.*

Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak.*

Mahyuddin, E. M. (2019). The Power of Emak-Emak: Perempuan dalam Pusaran Kampanye Politik Pemilihan Presiden 2019. *Al-Maiyyah*, Volume 12 No. 2 Desember.

Mahsun, Muhammad M. Z. (2020). Female Candidates, Islamic Women's Organization, and Clientelism in the 2019 Indonesian Elections. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, -.

Mukarom, Z. (2008). Perempuandan Politik di Aceh:Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Mediator*, Vol.9 No.2.

Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Jember: STAIN Press.

Mustofa, A. (2024, Mei Kamis, 11). *Ramai Diperbincangkan, Dua Mantan Ketua Parpol di Rembang Gabung Hanura untuk Berebut Kursi Lasem-Pancur*. Retrieved from Jawa Pos Radar Kudus: https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691654921/ramai-diperbincangkan-dua-mantan-ketua-parpol-di-rembang-gabung-hanura-untuk-berebut-kursi-lasempancur

Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nivada, A. (2015). Rekam Jejak Pemilu 2014: Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh. -, -.

Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan.* Surakarta: Cakra Books.

Oakley, A. (1972). *Sex, gender, and Society.* London: Temple Smith.

Park, T.-H. (2009). The Influence of Familism and Interpersonal Trust of Korean Public Officials. *International Review of Public Administration*, 121-136.

Prihatini, E. (2019). Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, experience, and List Position. *Women's Studies International Law Forum*, 72.

Firmanzah, P. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, Volume 1.

Putra, D. K. (2012). *Media dan Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press.

Ramadhona, E. s. (2020). Strategi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 Kota Padangsimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, -.

Surbakti , Ramlan d. (n.d.). *Meningkatkan Keterwakilan perempuan.* Jakarta: Kemitraan bagi Tata Pemerintah.

Rasyidin. (2016). *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita dalam Politik* . Sulawesi: UNIMALPRESS.

Rasyidin, A. (2016). *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik.* Sulawesi: UNIMALPRESS.

Rembang, B. P. (2025, juni 19). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Triwulan I-2025*. Retrieved from rembangkab.bps: https://docs.google.com/document/d/1v6GrVNxAxHnNqb8kSj6cHvVq4hOja672zgeqh6ZtU04/edit?usp=sharing

Rembang, K. K. (2023). Keputusan KPU Kab. Rembang No. 335 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggotta DPRD Kab. Rembang dalam Pemilu Tahun 2024.

Robby Milana, N. N. (2021). Kampanye Politik Calon Legislatif Perempuan (Studi Fenomenologi Pada Pemilihan Umum 2019). *KAIS*, 158-168.

Sakaria, S. N. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik(Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014). *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, Vol. 1 No. 2.

Samsa, A. (2021). Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka). *Jurnal Aristo*, -.

Sastrawaty, N. (2023). Pro-Kontra Perempuan dan Politik Dalam Perspektf Feminisme Muslim. *Sippakalebbi*, vol. 7. No. 1.

Schroder, P. (2010). *Strategi Politik* . Indonesia: Friedrich Nauman Stiftung For Die Freihet.

Semiawan, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan keunggulannya.* Cikarang: Grasindo.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. (2016). Perempuandan Politik di Aceh:Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, Vol. 1, No. 2.

Vitayala, A. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa.* Bogor: IPB Press.

Wahyuningsih, R. (2018). *Peran Perempuan dalam Politik Lokal: Studi Kasus di Nusa Tenggara Barat.* Malang: Universitas Negeri Malang.

Zainul Djunadin, M. F. (2023). Strategi Kampanye Nilam Sari Lawira dalam Pemilu Legislatif Sulawesi Tengah Tahun 2019: Analisis Kualitatif. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume. 5 No. 1.

LAMPIRAN



Foto bersama Laela Utari Widyaningsih selaku politisi perempuan dapil II



Foto bersama Rumini selaku politisi perempuan dapil V



Foto bersama masyarakat di Kabupaten Rembang setelah wawancara



Foto bersama masyarakat Kabupaten Rembang setelah wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lu'luatul Qomariyah
TTL : Rembang, 08 September 2002
Alamat : Ds. Sale RT 01 RW 03, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Semarang Jawa Tengah.
NIM : 2106016081
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3,83
Agama : Islam
E-mail : luluatulqomariyah3@gmail.com
HP : 087719426436

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA AL AZHAR SALE
2. MI NEGERI 2 REMBANG
3. MTs RIYADLOTUT THALABAH SEDAN
4. MA AL AZHAR SALE
5. S-1 ILMU POLITIK UIN WALISONGO SEMARANG

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekertaris Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MA Al Azhar Sale
2. Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MA Al Azhar Sale
3. Anggota Saka Bakti Husada (SBH) Kwarran Sale
4. Sekertaris Forum Osis Kabupaten Rembang (FOKAR) Kabupaten Rembang
5. Wakil ketua Forum Osis Kabupaten Rembang (FOKAR) Kabupaten Rembang
6. Wakil ketua I Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Sale